

INDONESIA  
ECONOMIC  
QUARTERLY

Maret 2015

# Harapan besar



**PERKEMBANGAN TRIWULANAN  
PEREKONOMIAN INDONESIA**  
*Harapan besar*

Maret 2015





## Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly/IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan *IEQ* ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

*IEQ* merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomic and Fiscal Management Global Practice*, dibawah bimbingan Shubham Chaudhuri, *Practice Manager*, Ndiame Dip, *Lead Economist*, dan Ashley Taylor, *Senior Economist*. Tim utama penyusun laporan ini dipimpin oleh Alex Sienaert, *Country Economist* dan bertanggung jawab di bagian A, pengeditan dan produksi, tim inti terdiri dari Arsianti, Magda Adriani, Masyita Crystallin, Fitria Fitriani, Ahya Ihsan, Yue Man Lee, Elitza Mileva, Bede Moore dan Violeta Vulovic dengan bantuan sebagian pengeditan oleh Peter Milne. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto. Diseminasi dilakukan oleh Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Desy Mutialim dan Nugroho Sunjoyo dibawah bimbingan Dini Sari Djalal.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Ekaterine Vashakmadze (Bagian A, konteks internasional), Monica Wihardja, Taufik Indrakesuma, Matthew Wai-Poi dan Edgar Janz dibawah bimbingan Vivi Alatas (Bagian B.1, harga beras), Della Temenggung dan Connor Spreng (Bagian B.2, OSS), Elitza Mileva (Bagian B.3, Pertumbuhan potensial PDB), Yue Man Lee dan Arvind Nair (Bagian C.1, sektor sumber alam). Data dan masukan utama juga diterima dari Dwi Endah Abriningrum, Dani Nugroho, David Elmaleh, Cindy Paladines, Michaelino Mervisiano, Imam Setiawan, Daim Sukriyah dan Ikuko Uochi. Laporan ini juga mendapat tambahan masukan yang penting dari Mohammad Ikhsan, dan David Nellor (*Australia Indonesia Partnership for Economic Governance*).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Foto sampul depan merupakan Hak Cipta Bimo Nurendro. Foto-foto untuk bagian lain diambil oleh Puguh Imanto dan Arsianti dan merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

### Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini [www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id)

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi [madrani@worldbank.org](mailto:madrani@worldbank.org). Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi [asienaert@worldbank.org](mailto:asienaert@worldbank.org).

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF: HARAPAN BESAR.....</b>	<b>I</b>
<b>A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI.....</b>	<b>1</b>
1. Pertumbuhan global mengalami percepatan namun penurunan harga komoditas terus berlanjut.....	1
2. Pertumbuhan Indonesia telah melemah tanpa tanda peningkatan dalam waktu dekat .....	3
3. Perubahan harga BBM bersubsidi sebagai pendorong utama inflasi .....	7
4. Penurunan harga minyak mendukung neraca perdagangan.....	10
5. Rupiah menguat secara efektif riil .....	14
6. Realokasi belanja yang besar dan target penerimaan yang ambisius pada APBN-P 2015.....	17
7. Membuat kemajuan yang kredibel menuju target fiskal dan pembangunan yang ambisius adalah tantangan utama tahun 2015.....	26
<b>B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA.....</b>	<b>28</b>
1. Harga beras Indonesia yang tinggi dan bergejolak secara internasional.....	28
a. Pasar beras Indonesia menghadapi tantangan struktural dan belanja Pemerintah belum efektif dalam mendukung produktivitas...	30
b. ...dan kebijakan stabilisasi harga tidak berperan efektif	32
2. Mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia .....	35
a. Perizinan usaha adalah prioritas reformasi utama dari pemerintah baru...	35
b. ...dengan momentum reformasi awal yang kuat	36
c. Tantangan berikut: perlunya rencana reformasi yang kredibel dan implementasi yang efektif	37
3. Laju pertumbuhan PDB yang berkelanjutan di Indonesia: pandangan yang lebih dekat .....	40
a. Harga komoditas mempengaruhi tren dan siklus pertumbuhan ...	40
b. ...yang kini berada pada kisaran 5,5 persen...	41
c. ...yang menunjukkan bahwa percepatan kembali pertumbuhan akan membutuhkan dorongan dari kebijakan	42
<b>C. INDONESIA 2016 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN .....</b>	<b>45</b>
1. Memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan Indonesia .....	45
a. Evolusi produksi sektor sumber daya alam selama lonjakan harga	46
b. Kontribusi sektor sumber daya alam terhadap hasil sumber daya manusia dan ekonomi makro selama lonjakan komoditas	47
c. Pasca masa lonjakan harga: prospek jangka menengah yang menantang	52
d. Memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari sumber daya alam	55
<b>LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Harga komoditas ekspor utama Indonesia terus berangsur turun.....	2
Gambar 2: ...dan impor Cina dari Indonesia mencatat kontraksi yang sangat tajam.....	2
Gambar 3: Konsumsi swasta menopang pertumbuhan walau diiringi dengan melemahnya investasi dan ekspor bersih.....	4
Gambar 4: PDB nominal dan penjualan final riil menunjuk ke tekanan penurunan pertumbuhan hingga akhir tahun 2014.....	4
Gambar 5: Sektor jasa kini memiliki kontribusi yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.....	7
Gambar 6: ...namun perhitungan baru juga menunjukkan sedikit perlambatan pertumbuhan PDB dan sektor jasa pada tahun-tahun terakhir.....	7
Gambar 7: Defisit neraca transaksi berjalan sedikit berkurang di kuartal empat namun “neraca dasar” melebar.....	10
Gambar 8: Lemahnya penerimaan ekspor komoditas terus membebani ekspor secara keseluruhan.....	11
Gambar 9: ...sementara impor turun tajam di kuartal empat 2014 karena penurunan biaya BBM.....	11
Gambar 10: Ekspor menurun sejak 2011, terutama karena perlemahan penerimaan komoditas... ..	13
Gambar 11: ...yang tertekan oleh penurunan harga dan volume, kecuali untuk CPO dan batubara.....	13
Gambar 12: Ekspor ke Jepang dan Cina, dua pasar teratas Indonesia, turun tajam sejak 2011... ..	13
Gambar 13: ...mendorong turunnya lebih dari setengah ekspor agregat pada periode 2011-2014.13	
Gambar 14: Rupiah turun terhadap dolar AS sejak medio 2014 namun meningkat secara tertimbang-perdagangan riil... ..	15
Gambar 15: ...dengan apresiasi efektif riil yang signifikan sejak 2013 mendekati tren jangka panjang.....	15
Gambar 16: Pertumbuhan kredit bank terus melambat, namun persetujuan hutang naik sejak medio 2014.....	17
Gambar 17: Kredit dalam negeri bagi perusahaan non-finansial meningkat pada kuartal akhir 2014.....	17
Gambar 18: Realisasi penerimaan tahun 2014 hanya mencapai 94 persen dari target APBN-P 2014... ..	19
Gambar 19: ...karena pertumbuhan penerimaan nominal terus turun di 2014, terutama akibat lemahnya pertumbuhan PPN.....	19
Gambar 20: APBN-P 2015 memotong subsidi energi dan meningkatkan belanja infrastruktur... ..	21
Gambar 21: ...dan meningkatkan anggaran untuk kementerian-kementerian utama yang secara signifikan terlibat dalam infrastruktur.....	21
Gambar 22: Kebutuhan pembiayaan bruto lebih tinggi pada 2015 walau dengan anggaran defisit fiskal yang lebih rendah.....	24
Gambar 23: Harga beras melonjak pada bulan Februari, mengikuti tren kenaikan harga dan harga yang tinggi di Indonesia.....	29
Gambar 24: Produksi beras menurun pada 2014... ..	31
Gambar 25: ...berkontribusi terhadap penurunan stok yang signifikan pada akhir 2014 dan awal 2015.....	31
Gambar 26: Ukuran rata-rata lahan usaha pertanian yang beroperasi di Indonesia lebih rendah dibanding Filipina dan Thailand... ..	32
Gambar 27: ...dan usaha pertanian beras Indonesia masih tetap padat karya.....	32
Gambar 28: OP, impor dan Raskin hanya bagian kecil dari jumlah produksi beras.....	33
Gambar 29: PTSP Pusat yang terencana dan direvitalisasi dengan percepatan prosedur permohonan perizinan.....	37

Gambar 30: Potensi pertumbuhan melambat sejak tahun 2012 .....	42
Gambar 31: Pertumbuhan potensi produksi di Indonesia mengikuti tren harga komoditas secara melekat .....	44
Gambar 32: Pertumbuhan produksi lebih banyak didorong oleh produktivitas dibanding modal fisik sejak tahun 2001.....	44
Gambar 33: Harga komoditas energi dan non-energi dunia meningkat signifikan antara 2002 dan 2012.....	46
Gambar 34: ...mendorong kenaikan yang signifikan dalam produksi sejumlah komoditas Indonesia.....	46
Gambar 35: Sektor sumber daya alam berkontribusi signifikan pada pertumbuhan PDB nominal.....	49
Gambar 36: ...namun kontribusi sektor sumber daya alam ke pertumbuhan PDB riil tidak besar .....	49
Gambar 37: Kontribusi komoditas ke kenaikan ekspor melampaui kontribusi dari produk manufaktur.....	49
Gambar 38: Komoditas, termasuk sumber daya alam, mendukung keseluruhan neraca perdagangan.....	49
Gambar 39: Indonesia menjadi importir bersih minyak sejak tahun 2004... ..	50
Gambar 40: ...dan defisit minyak melebar hingga 2014, didorong oleh kenaikan harga minyak mentah.....	50
Gambar 41: Bagian sektor sumber daya alam dalam penerimaan negara mengalami penurunan .....	50
Gambar 42: Daerah kaya sumber daya alam memiliki sumber daya fiskal terbesar berkat bagi hasil... ..	51
Gambar 43: ...namun memiliki hasil layanan publik yang buruk, termasuk akses ke layanan dasar .....	51
Gambar 44: Harga komoditas menurun sejak tahun 2011 dan diperkirakan tetap rendah hingga tahun 2019.....	52
Gambar 45: Belanja eksplorasi tetap rendah selama lonjakan harga minyak mentah dan gas alam .....	52
Gambar 46: Produksi minyak dan gas diperkirakan menurun selama jangka menengah .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB.....	57
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran .....	57
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi .....	57
Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor .....	57
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen.....	57
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri.....	57
Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran .....	58
Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan .....	58
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang.....	58
Lampiran Gambar 10: Impor barang.....	58
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal .....	58
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter.....	58
Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK.....	59
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara.....	59
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional .....	59
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran.....	59
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional .....	59
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS.....	59

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal.....	60
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI.....	60
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito.....	60
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan.....	60
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah .....	60
Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Dalam skenario dasar ( <i>baseline</i> ), pertumbuhan PDB diproyeksikan sebesar 5,2 persen pada tahun 2015.....	IV
Tabel 2: Skenario dasar ( <i>base case</i> ), PDB diperkirakan akan tumbuh ke 5,2 persen pada 2015, dan 5.5 persen pada 2016.....	9
Tabel 3: Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan 3,0 persen dari PDB pada tahun 2015 ..	14
Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,5 persen dari PDB untuk tahun 2015.....	25
Tabel 5: Harga eceran dan grosiran beras telah meningkat dengan cepat selama tahun lalu .....	29
Tabel 6: Sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk petani, adalah konsumen bersih beras	29
Tabel 7: Jumlah pertumbuhan produksi beras tetap lambat, didorong oleh kenaikan produktivitas yang rendah .....	30
Tabel 8: Sumber daya alam berkontribusi secara signifikan kepada ekspor, penerimaan dan produksi ( <i>output</i> ) .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah.....	61
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran.....	61
Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi Indonesia .....	62
Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia .....	63

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Perubahan tahun dasar dan revisi PDB Indonesia .....	6
Kotak 2: Berakhirnya lonjakan ekspor Indonesia .....	12
Kotak 3: Reformasi harga BBM telah menurunkan biaya subsidi, namun realisasi manfaat sepenuhnya akan membutuhkan implementasi yang transparan dan konsisten.....	22
Kotak 4: Prakarsa reformasi pada masa lalu untuk mengembangkan PTSP Pusat dan menyederhanakan izin usaha.....	39
Kotak 5: Memperkirakan hasil potensi pertumbuhan di Indonesia .....	43



## Ringkasan eksekutif: Harapan besar



**Reformasi besar subsidi BBM dan anggaran yang ambisius meningkatkan harapan dan menempatkan fokus pada implementasi**

Sejak tanggal 1 Januari 2015, pemerintah Indonesia yang baru mengambil langkah tegas dengan menerapkan sistem harga BBM yang baru, yang secara drastis menurunkan beban subsidi bensin dan solar. Kebijakan ini membuka jalan bagi anggaran pertama pemerintah baru, yang disetujui pada bulan Februari, untuk mengarahkan belanja kepada prioritas-prioritas pembangunan, terutama bidang infrastruktur, dengan alokasi sebesar dua kali lipat dari realisasi pada tahun 2014. Namun keberhasilan pelaksanaan visi anggaran yang berani ini akan membutuhkan upaya penyelesaian hambatan administratif terhadap belanja dan meningkatkan kinerja pendapatan secara drastis. Keberhasilan dalam mencapai hal tersebut, dan manfaat yang mengalir dari percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, tampaknya akan membutuhkan waktu, terutama dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang sebagian disebabkan oleh penurunan harga-harga komoditas. Di luar sektor fiskal, reformasi-reformasi yang diambil pada bulan-bulan awal masa pemerintahan di bidang-bidang utama seperti perizinan investasi juga menghadapi tantangan yang rumit agar dapat beroperasi dengan baik. Pemerintah mengisyaratkan tekad reformasinya yang kuat, dan meningkatkan harapan. Kemajuan awal kini harus dikonsolidasi dengan pelaksanaan reformasi besar secara efektif dan perbaikan strukturanggaran, dengan latar belakang ekonomi global yang masih menantang bagi Indonesia.

**Kondisi ekonomi global terus membaik, namun penurunan permintaan dari Cina mengurangi ekspor Indonesia...**

Tren-tren perekonomian dunia utama yang mempengaruhi prospek Indonesia masih secara umum serupa dengan yang dilaporkan pada Triwulanan yang lalu. - Perekonomian negara berpenghasilan tinggi menguat, didukung oleh pemulihan berkelanjutan di AS, percepatan kegiatan secara bertahap di daerah Euro, dan kembalinya pertumbuhan di Jepang. Kondisi ekonomi lintas negara-negara berkembang lebih bervariasi. Sebagai contoh, India mencatat pertumbuhan produksi yang kuat pada kuartal akhir tahun 2014, namun ekonomi-ekonomi utama lainnya

mencatat kontraksi atau pertumbuhan yang sangat lambat. Prospek pertumbuhan dunia diperkirakan terus meningkat pada kuartal-kuartal yang akan datang, namun hanya pada level moderat dari rata-rata 2,5 persen pada tahun 2012-14 menjadi 3,2 persen pada tahun 2015-17. Pertumbuhan perdagangan dunia diperkirakan akan tetap lambat, yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia, yang terhambat dengan kembalinya apresiasi nilai tukar efektif riil sejak pertengahan tahun 2014, dan lemahnya permintaan komoditas (terutama dari Cina), akan tetap menjadi tantangan.

**...berkontribusi terhadap defisit neraca transaksi berjalan yang sulit berubah, walau penurunan harga minyak dunia membawa sejumlah keringanan**

Rendahnya harga-harga komoditas dunia telah menekan penerimaan ekspor Indonesia, defisit neraca berjalan secara keseluruhan masih terus bertahan, sekitar 2,8 persen dari PDB pada kuartal akhir tahun 2014. Satu pengecualian adalah turunnya harga minyak dunia sejak bulan Juni 2014, yang merupakan hal positif bagi neraca perdagangan Indonesia karena besarnya jumlah impor bersih (23,9 miliar dolar AS, atau 2,7 persen dari PDB, pada tahun 2014). Namun harga minyak dunia yang lebih rendah juga diperkirakan akan membebani penerimaan ekspor Indonesia yang berasal dari gas alam (12,1 miliar dolar AS pada tahun 2014), yang membatasi perbaikan neraca berjalan dari penurunan harga minyak sejauh ini menjadi di bawah 0,5 persen dari PDB. Impor masih tetap lemah, turun 9,8 persen (*year-on-year, yoy*) dalam dolar AS secara rata-rata bergerak 3-bulanan selama bulan Januari, terutama yang termasuk barang-barang modal (-14,0 persen), yang secara historis adalah indikator awal yang baik untuk investasi tetap.

**Pertumbuhan PDB turun menjadi 5,0 persen pada kuartal terakhir, lemahnya ekspor masih membebani ekonomi, dan tanda-tanda berlanjutnya tekanan dari turunnya permintaan**

Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen tahun-ke-tahun *yoy* pada kuartal akhir tahun 2014, dan juga sebesar 5,0 persen untuk setahun penuh, yang meneruskan tren pertumbuhan moderat sejak tahun 2012. Badan Pusat Statistik telah menghitung ulang tahun dasar PDB dari 2000 menjadi 2010, dan merevisinya menurut standar-standar internasional terbaru, yang menghasilkan pengukuran *output* yang lebih besar sekitar 35 miliar dolar AS pada tahun 2014 dibanding angka sebelumnya (kenaikan PDB nominal sebesar 5,3 persen), dan penurunan kecil dalam perkiraan tingkat riil pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun terakhir (rata-rata sebesar 0,1 poin persentase per tahun untuk periode tahun 2011-2014). Sementara pertumbuhan permintaan dalam negeri merayap naik menjadi 4,4 persen *yoy* pada kuartal akhir 2014, pertumbuhan riil investasi tetap, pada 4,3 persen *yoy*, tetap relatif lemah, dan perbedaan statistik yang besar antara PDB yang diukur menurut dasar produksi dan pengeluaran (naik masing-masing 5,0 dan 2,4 persen *yoy*) mempersulit penarikan kesimpulan. Permintaan luar negeri terus menjadi rintangan yang jelas terhadap pertumbuhan, dengan pertumbuhan ekspor bersih tahun-ke-tahun menurun sebesar 2,0 poin persentase. Perlemahan yang signifikan ini sebagian disebabkan oleh sangat tingginya dasar perbandingan dengan melonjaknya ekspor mineral menjelang penutupan tahun 2013 (sebelum berlakunya pelarangan ekspor sebagian bahan mineral mentah pada bulan Januari 2014), namun melihat tahun 2014 secara keseluruhan, volume ekspor meningkat hanya sebesar 1 persen. Data kegiatan ekonomi berfrekuensi tinggi tetap lemah pada awal tahun 2015.

**Dengan perlambatan kredit dan inflasi, BI menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin pada bulan Februari**

Reformasi sistem harga BBM Indonesia telah memungkinkan perubahan harga ke-ekonomian BBM (non-subsidi) yang lebih rendah bisa lebih cepat dirasakan oleh konsumen, yang telah mengalami kenaikan signifikan rata-rata harga bensin dan solar sebesar 34 persen pada bulan November 2014. Karenanya, deflasi harga yang jarang dijumpai terjadi selama dua bulan berturut-turut pada Januari dan Februari, menurunkan inflasi IHK menjadi 6,3 persen *yoy*, dari 8,4 persen *yoy* pada bulan Desember. Tekanan inflasi yang mendasari juga tampaknya dapat dikendalikan,

dengan IHK inti tetap berada sedikit di bawah 5,0 persen *yoY* pada bulan-bulan melewati Februari, sementara pertumbuhan kredit terus melemah, kira-kira setengah dari nilai puncaknya pada tahun 2013, menjadi 11,4 persen *yoY* pada bulan Desember 2014. Bank Indonesia (BI) menurunkan fasilitas FASBI dan *BI Rate* sebesar 25 basis poin pada tanggal 17 Februari.

**Walaupun inflasi rendah secara keseluruhan, harga beras naik pada bulan Februari**

Walau inflasi mengalami moderasi secara keseluruhan, harga beras melonjak pada bulan Februari, dengan harga eceran meningkat 12 persen *yoY*, didorong oleh penurunan yang signifikan dalam persediaan secara keseluruhan. Musim panen diperkirakan akan membantu memutarbalikkan kenaikan ini, namun bahkan bila kenaikan itu hanya sementara, kenaikan itu mengikuti tren yang konsisten sejak tahun 2004 bahwa harga-harga beras Indonesia meningkat dengan laju yang lebih cepat dibanding harga di pasar internasional. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah konsumen bersih beras dan karenanya terpengaruh oleh kenaikan harga beras. Faktor-faktor struktural secara negatif mempengaruhi produksi beras Indonesia, termasuk penurunan ukuran sawah yang memproduksi, tingginya penggunaan tenaga kerja, buruknya infrastruktur, tingginya biaya logistik, dan rendahnya penggunaan teknologi dan aliran informasi. Selain itu, sementara belanja publik untuk pertanian telah meningkat secara keseluruhan, pentargetan belanja belum efisien, sebagai contoh untuk subsidi pupuk daripada untuk irigasi, atau untuk penelitian atau perluasan lahan. Informasi yang terbatas dan tidak akurat tentang produksi, konsumsi dan persediaan akan meningkatkan ketidakpastian pasar tentang kondisi permintaan dan penawaran pada suatu waktu, sehingga meningkatkan gejolak harga. Peningkatan kualitas data pasar beras merupakan kebutuhan yang mendesak. Akhirnya, operasi-operasi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga juga menimbulkan ketidakpastian tentang persediaan yang sesungguhnya dan mendistorsi pasar, sebagai contoh, isyarat terbaru dari pemerintah yang tidak akan melakukan impor beras.

**Pada skenario dasar (*baseline*), pertumbuhan PDB diperkirakan tetap mendekati 5 persen pada kuartal-kuartal mendatang, dan sedikit meningkat ke 5,5 persen pada tahun 2016...**

Melihat ke depan, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan PDB tahun 2015 akan mencapai 5,2 persen, dan kemudian meningkat tipis menjadi 5,5 persen pada tahun 2016 (Tabel 1, keduanya tidak berubah dari proyeksi yang lalu pada Triwulanan edisi bulan Desember 2014). Proyeksi dasar (*baseline*) tersebut disusun berdasarkan asumsi laju pertumbuhan konsumsi swasta yang relatif stabil, bersama-sama dengan percepatan dalam investasi tetap ke lebih dari 6 persen pada kuartal pertama tahun 2016. Volume ekspor diperkirakan akan pulih secara bertahap namun impor juga akan meningkat karena proyeksi penguatan investasi, termasuk peningkatan belanja infrastruktur. Secara bersama-sama, ekspor dan impor (ekspor bersih) diperkirakan tidak akan berkontribusi pada pertumbuhan menurut proyeksi hingga tahun 2016.

**...tetapi risiko-risiko menunjukkan pada penurunan**

Risiko-risiko menunjukkan pada penurunan prospek pertumbuhan, dengan tekanan penurunan yang terus berlangsung terhadap belanja rumah tangga dan pertumbuhan investasi dari relatif ketatnya kredit dan tekanan margin keuntungan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sumber utama risiko kenaikan adalah percepatan investasi yang naik lebih cepat dari perkiraan, namun bila hal itu tidak disertai dengan kenaikan peningkatan ekspor, rintangan-rintangan pertumbuhan yang berasal dari pembiayaan luar negeri dapat kembali mengetat dengan cepat. Walau dengan penurunan bersih biaya impor minyak, harga-harga komoditas yang relatif lemah, yang diikuti dengan kenaikan permintaan impor, diperkirakan akan tetap membuat defisit neraca berjalan mendekati 3,0 persen dari PDB secara rata-rata.

Tabel 1: Dalam skenario dasar (*baseline*), pertumbuhan PDB diproyeksikan sebesar 5,2 persen pada tahun 2015

		2013	2014	2015p	2016p
<b>PDB riil</b>	(Persen perubahan tahunan)	5,6	5,0	5,2	5,5
<b>Indeks harga konsumen</b>	(Persen perubahan tahunan)	6,4	6,4	6,5	5,1
<b>Saldo neraca transaksi berjalan</b>	(Persen dari PDB)	-3,2	-3,0	-3,0	-3,2
<b>Saldo anggaran*</b>	(Persen dari PDB)	-2,2	-2,2	-1,9	n.a

Catatan: \* Angka pemerintah – realisasi (2013), realisasi sementara (2014) dan APBN-P (2015).

Sumber: BI; BPS; Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

**Perbaikan efisiensi alokasi APBN-P 2015 merupakan hal yang sangat positif, namun target penerimaan yang terlalu besar akan membutuhkan penyesuaian pengeluaran**

Mencerminkan agenda reformasi pemerintah yang baru, APBN-P 2015 yang disetujui pada bulan Februari menyertakan realokasi belanja yang besar dari subsidi BBM ke prioritas pembangunan utama, terutama infrastruktur, dan juga program-program pertanian dan sosial. Realokasi menuju belanja yang produktif ini merupakan perkembangan yang positif. Namun pelaksanaan anggaran yang efektif akan membutuhkan pemecahan tantangan-tantangan administratif terhadap belanja dan meningkatkan kinerja pengumpulan penerimaan secara drastis. Menimbang kondisi ekonomi makro, terutama lebih rendahnya pertumbuhan nominal PDB dan harga minyak, tampaknya penerimaan akan mencatat kekurangan. Karenanya, pelaksanaan anggaran yang baru secara penuh akan membutuhkan waktu, dan sepanjang tahun 2015 pihak yang berwenang tampaknya akan menghadapi tantangan dalam penyesuaian belanja untuk merealisasikan penerimaan. Karenanya proyeksi dasar (*baseline*) Bank Dunia adalah bahwa aturan yang membatasi defisit fiskal pemerintah pusat untuk tidak melampaui 2,5 persen dari PDB akan mengikat pada tahun 2015, dan bahwa defisit akan dibatasi pada tingkat tersebut dengan membatasi pengeluaran melalui pemotongan anggaran atau rendahnya pencairan anggaran pada beberapa bidang, termasuk belanja modal.

**Terdapat momentum yang kuat untuk mereformasi perizinan usaha di Indonesia...**

Realokasi anggaran pemerintah menuju belanja modal, dan juga peningkatan belanja infrastruktur oleh BUMN (yang menerima suntikan modal Rp 70,4 triliun pada APBN-P 2015), akan memberikan dorongan yang diharapkan bagi belanja investasi. Pemerintah memproyeksikan partisipasi sektor swasta yang signifikan dalam mendorong belanja infrastruktur yang lebih besar, dan untuk mencapai pertumbuhan investasi tetap, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat secara keseluruhan. Namun salah satu rintangan terhadap investasi adalah kenyataan bahwa proses-proses bagi perusahaan untuk mendaftarkan kegiatan-kegiatannya dan memperoleh izin-izin yang diperlukan merupakan hal yang rumit, mahal dan menghabiskan waktu; Indonesia kini berada pada peringkat 114 dari 189 negara dalam hal kemudahan berusaha (*ease of doing business*), seperti diukur oleh Bank Dunia. Pemerintah yang baru telah kembali menempatkan peningkatan perizinan pada bagian atas agenda reformasi, dengan kuatnya momentum reformasi awal, termasuk pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada bulan Januari. Namun implementasi reformasi yang rumit masih dibutuhkan untuk mencapai perizinan usaha yang lebih terpadu (termasuk lintas tingkat nasional dan daerah) dan efisien, membutuhkan penyederhanaan dan pemetaan proses perizinan, peningkatan teknologi komunikasi dan informasi, dan perubahan organisasi dan koordinasi di BKPM dan kementerian-kementerian lainnya.

**...yang akan membantu meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang lebih cepat, yang diperkirakan akan turun ke 5,5 persen per tahun, sebagian karena lemahnya harga komoditas**

Tantangan meningkatkan investasi dan pertumbuhan semakin penting dengan berlanjutnya perlemahan ekonomi yang didorong oleh penurunan harga komoditas dunia. Proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB potensial (*potential output*) Indonesia, dengan memperhitungkan penurunan harga komoditas, saat ini adalah sekitar 5,5 persen per tahun. Laju ini mengikuti pertumbuhan potensial selama satu dekade terakhir yang mencapai 6 persen atau lebih. Bagian besar dari perlambatan ekonomi yang belakangan terjadi, menjadi 5,0 persen pada kuartal akhir 2014, dapat berasal dari penurunan laju pertumbuhan potensial, sebagian disebabkan oleh penurunan harga-harga komoditas, dan bukan hanya penurunan pertumbuhan yang bersifat sementara (*cyclical*). Oleh karena itu, para pembuatkebijakan tidak dapat mengharapkan bahwa pertumbuhan akan kembali meningkat dengan mudah ke laju yang lebih tinggi seperti pada periode tahun 2010-2012. Akan dibutuhkan reformasi kebijakan dan implementasi yang signifikan, termasuk dalam bidang perizinan investasi yang dibahas di atas, karena jumlah dan kualitas belanja investasi merupakan faktor penentu yang sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan.

**Dengan berakhirnya lonjakan harga komoditas dunia, dibutuhkan manajemen yang efektif bagi sektor sumber daya alam Indonesia untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari sektor tersebut**

Indonesia memiliki kekayaan alam dalam hidrokarbon (batubara, minyak dan gas alam), bahan mineral (logam dasar dan logam mulia) dan juga komoditas pertanian yang berlimpah. Kenaikan harga komoditas yang signifikan dari tahun 2002 hingga 2012 menyebabkan sektor sumber daya alam memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan nominal, ekspor dan investasi selama tahun 2000an. Namun dampak sektor tersebut terhadap hasil-hasil pertumbuhan riil, penerimaan negara dan pembangunan daerah ternyata lebih terbatas. Pada jangka menengah, prospek bagi sektor sumber daya alam lebih menantang – dengan berlanjutnya moderasi harga-harga dan proyeksi penurunan produksi, terutama untuk minyak mentah. Karenanya sangatlah penting bagi pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan sektoral untuk mengelola kerentanan yang berasal dari perlambatan sektor tersebut dan untuk memaksimalkan keuntungan, untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam Indonesia dalam mendukung sasaran-sasaran pembangunan.

## A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



### 1. Pertumbuhan global mengalami percepatan namun penurunan harga komoditas terus berlanjut

**Ekonomi negara  
berpenghasilan  
tinggi membaik  
sementara gambaran  
perekonomian  
negara berkembang  
lebih beragam...**

Indikator-indikator utama perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap prospek ekonomi Indonesia hanya mengalami sedikit perubahan dari yang dilaporkan di laporan Triwulanan edisi bulan Desember 2014. Ekonomi negara-negara berpenghasilan tinggi menguat, didukung oleh pemulihan berkelanjutan di AS dan percepatan aktivitas perekonomian secara bertahap di daerah Euro. Sementara Jepang juga kembali mencatat pertumbuhan positif pada kuartal akhir 2014. Kondisi ekonomi lintas negara berkembang lebih bervariasi. Sebagai contoh, India mencatat pertumbuhan PDB yang kuat sebesar 7,5 persen tahun-ke-tahun di kuartal akhir tahun 2014, namun beberapa negara utama lain, seperti Brasil, Rusia dan Afrika Selatan mencatat kontraksi atau mengalami pertumbuhan yang sangat lambat.

**...yang terpengaruh  
oleh penurunan  
harga minyak yang  
tajam...**

Harga minyak dunia jatuh dengan tajam selama paruh kedua tahun 2014 dan berlanjut ke bulan Januari 2015 sebelum kembali naik, dan pada bulan Februari harganya mencapai 40 persen di bawah tingkat yang tercatat pada medio 2014. Penurunan yang drastis ini mendukung perekonomian global dalam jangka menengah tetapi juga berkontribusi pada pelebaran kinerja ekonomi antar eksportir dan importir minyak bersih. Di antara negara-negara berkembang pengimpor minyak yang besar, gabungan dampak terjaganya inflasi searah dengan sasaran kebijakan, membaiknya neraca berjalan dan melemahnya pertumbuhan telah memungkinkan sejumlah bank sentral untuk memotong tingkat suku bunga sejak awal tahun. Namun untuk negara-negara pengekspor minyak bank sentral harus menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga inflasi yang stabil dan kepercayaan investor di tengah tekanan valuta. Bagi Indonesia, yang

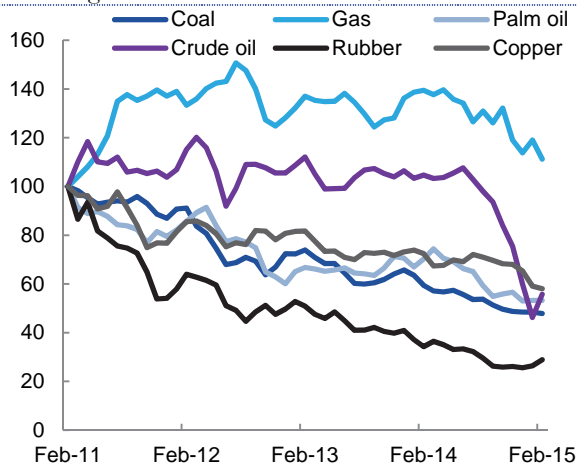
merupakan pengimpor bersih minyak dengan defisit migas bersih sebesar 11,8 miliar dolar AS pada tahun 2014 (1,3 persen dari PDB), penurunan harga minyak secara signifikan telah meningkatkan nilai tukar perdagangannya (*terms-of-trade*) dan mendorong terjadinya reformasi harga BBM sebagaimana yang sangat dibutuhkan. Namun demikian, seperti dibahas pada Bagian 6 dan Bagian C, rendahnya harga minyak juga menurunkan penerimaan pemerintah dan menciptakan tantangan bagi sektor energi yang besar.

**...dengan harga-harga komoditas bukan minyak terus melemah**

Selain minyak, lemahnya harga-harga komoditas terus membebani penerimaan ekspor Indonesia. Harga produk ekspor utama Indonesia terus menurun pada dua bulan pertama tahun 2015 (Gambar 1) dengan batubara turun sebesar 1,3 persen, tembaga turun sebesar 11,11 persen. Secara keseluruhan, nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) untuk komoditas utama Indonesia diproyeksikan akan turun perlahan sebesar 1,3 persen selama dua bulan pertama tahun 2015. Indeks tersebut telah kembali meningkat dari nilai rendahnya pada bulan September 2014, berkat penurunan harga minyak, namun pada bulan Februari indeks tersebut masih tetap 40 persen di bawah nilai puncaknya pada 4 tahun yang lalu. Penurunan permintaan impor Cina dari Indonesia, terutama untuk barang-barang komoditas, menjadi sumber penurunan yang terus berlangsung (Kotak 2). Walau pertumbuhan PDB Cina hanya turun tipis sejak tahun 2012 hingga akhir tahun 2014, impor Cina dari Indonesia telah turun sangat tajam dalam nilai dolar AS (Gambar 2). Kebijakan moneter yang akomodatif di Zona Euro dan Jepang bersama-sama dengan inflasi yang rendah juga memberikan kontribusi yang semakin besar pada melemahnya permintaan impor dan persaingan ekspor dari negara-negara tersebut.

**Gambar 1: Harga komoditas ekspor utama Indonesia terus berangsur turun...**

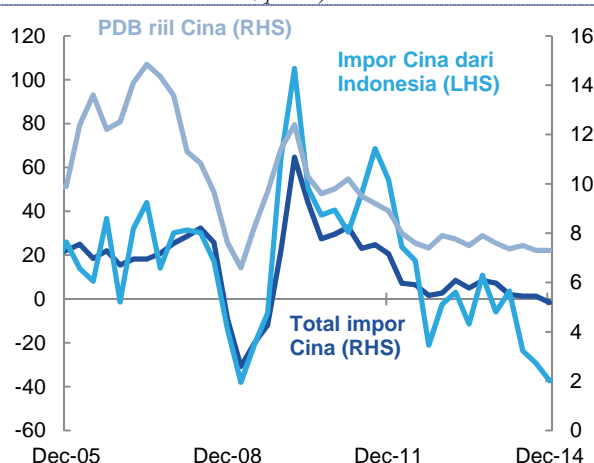
(Indeks harga acuan dunia dalam dolar AS, Februari 2011=100)



Sumber: Bank Dunia

**Gambar 2: ...dan impor Cina dari Indonesia mencatat kontraksi yang sangat tajam**

(pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Catatan: Impor dalam dolar AS; seluruh rangkaian pada frekuensi kuartalan.  
Sumber: CEIC

**Ekonomi global diproyeksikan akan membaik, namun lambatnya pertumbuhan perdagangan dan**

Maret 2015

Pertumbuhan global diproyeksikan meningkat perlahan pada kuartal-kuartal selanjutnya, dari rata-rata 2,5 persen pada tahun 2012-14 menjadi 3,2 persen pada tahun 2015-17, diikuti oleh lemahnya pertumbuhan perdagangan. Lambatnya laju pertumbuhan perdagangan dunia menunjukkan peningkatan ekspor Indonesia secara signifikan kemungkinan tidak dapat dicapai kecuali Indonesia berhasil memperbesar pangsa pasar dunianya pada produk-produk yang ada atau memasuki

**semakin ketatnya kondisi keuangan tampaknya akan membawa tantangan**

pasar-pasar baru. Hal-hal penting lain dalam rangka pemulihan kelesuan ekonomi yang sedang berlangsung adalah dengan dilakukannya kebijakan-kebijakan moneter yang akomodatif di negara-negara utama dan kemungkinan besar bertahannya perlemahan harga-harga komoditas, walau kondisi finansial akan berangsur-angsur menegat. Dengan kebijakan moneter yang mulai menegat di Amerika Serikat, aliran modal ke negara-negara berkembang akan mengalami perlambatan. Aliran itu akan melambat secara tidak merata lintas negara, di mana para investor akan lebih menyoroti kelemahan-kelemahan spesifik tiap negara dengan menganalisa perbedaan dalam prospek pertumbuhan dan kebijakan ekonomi, politik dan moneter. Untuk Indonesia, pergeseran aliran modal tersebut merupakan sebuah tantangan yang signifikan di tahun 2015 dan selanjutnya.

## 2. Pertumbuhan Indonesia telah melemah tanpa tanda peningkatan dalam waktu dekat

**Pertumbuhan PDB di kuartal akhir 2014 dan tahun 2014 secara keseluruhan adalah 5,0 persen...**

Pada kuartal akhir tahun 2014, PDB riil Indonesia meningkat 5,0 persen secara tahun-ke-tahun (yoy), setara dengan kuartal ketiga yang mencatat peningkatan sebesar 4,9 persen – menurut PDB Indonesia yang baru direvisi dan disesuaikan (lihat Kotak 1). Pertumbuhan PDB selama 2104 secara keseluruhan mencapai 5,0 persen, turun dari 5,6 persen pada tahun 2013 dan menandai pertumbuhan tahunan yang paling lambat sejak tahun 2009, ketika ekonomi tumbuh 4,7 persen di tengah-tengah krisis keuangan global tahun 2008/9.

**...didukung oleh permintaan dalam negeri, terutama konsumsi...**

Permintaan dalam negeri terus menopang pertumbuhan, dengan kenaikan 4,4 persen yoy pada kuartal akhir 2014, setara dengan 4,3 persen yoy pada kuartal sebelumnya. Komponen utama dari pengeluaran, yaitu konsumsi swasta, naik 4,9 persen yoy, sehingga kontribusinya mencapai 2,8 poin persentase dari pertumbuhan kuartal keempat, sama seperti pada kuartal yang lalu. Konsumsi pemerintah naik sebesar 2,8 persen yoy pada kuartal keempat, naik dari pertumbuhan yang hanya meningkat 1,3 persen yoy pada kuartal yang lalu, dan menambah 0,4 poin persentase ke keseluruhan pertumbuhan PDB. Investasi tetap meningkat sebesar 4,3 persen yoy pada kuartal akhir 2014, naik dari peningkatan sebesar 3,9 persen yoy pada kuartal ketiga namun masih berada pada tingkat yang lemah, dan menambahkan 1,4 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB.

**...sementara permintaan bersih luar negeri membebani pertumbuhan pada kuartal akhir 2014**

Volume ekspor barang-barang dan jasa-jasa lebih rendah secara signifikan sebesar 4,5 persen pada kuartal akhir 2014 dibanding kuartal yang sama pada 2013. Perbandingan ini menarik dengan adanya lonjakan naik volume ekspor sejak kuartal akhir 2013 karena para produsen memperbesar ekspor sebelum berlakunya larangan ekspor sebagian mineral mentah pada bulan Januari 2014 (lihat Triwulanan edisi bulan Maret 2014). Namun, melihat tahun 2014 secara keseluruhan, ekspor hanya naik sebesar 1,0 persen. Sebaliknya volume impor mencatat gerakan yang lebih merata pada kuartal keempat, meningkat sebesar 3,2 persen yoy, sebagian karena kenaikan sementara dari naiknya impor BBM menjelang kenaikan harga subsidy bulan November 2014. Karenanya permintaan luar negeri yang lemah sangat membebani ekonomi pada kuartal akhir 2014, mengurangi pertumbuhan PDB sebesar 2,0 poin persentase secara tahun-ke-tahun.

**Pada sisi produksi, hal yang menarik pada kuartal akhir 2014 adalah kuatnya**

Dari sudut pandang produksi, pertumbuhan produksi sektor primer melemah pada kuartal keempat, dengan pertumbuhan pertanian yang rendah sebesar 2,8 persen yoy dibanding 3,6 persen pada kuartal ketiga, dan kenaikan produksi pertambangan dan penggalian yang juga masih lemah (naik 2,2 persen yoy). Pada sektor sekunder,



**pertumbuhan sektor konstruksi**

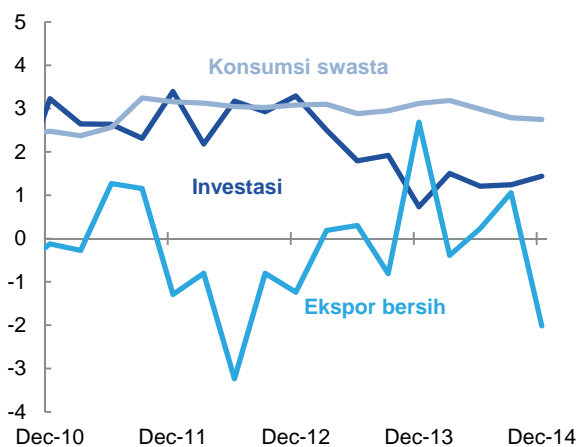
pertumbuhan manufaktur melemah menjadi 4,2 persen yoy pada kuartal akhir 2014, turun dari 5,0 persen yoy pada kuartal yang lalu, sementara konstruksi mencatat pertumbuhan yang kuat sebesar 7,7 persen yoy pada kuartal keempat, dibanding dengan 6,5 persen yoy pada kuartal ketiga. Di antara sektor-sektor jasa, perlemahan terpusat pada sektor-sektor perdagangan ritel dan perkulakan dan perbaikan, yang meningkat sebesar 3,5 persen yoy dibanding pertumbuhan sebesar 4,8 persen pada kuartal ketiga 2014, dan pada akomodasi, makanan dan minuman (naik 4,9 persen yoy dibanding 5,9 persen yoy pada kuartal ketiga).

**Walaupun pertumbuhan PDB riil cukup stabil selama paruh kedua 2014, hal lainnya dalam neraca nasional menunjukkan perlemahan yang sedang berlangsung dalam pertumbuhan permintaan...**

Secara keseluruhan, laporan terakhir neraca nasional tahun 2014 meneruskan pola kuartal-kuartal terakhir dengan melemahnya pertumbuhan PDB secara bertahap karena lemahnya pertumbuhan investasi, yang sebagian mencerminkan kelemahan sektor ekspor dan komoditas dan tanggapan kebijakan untuk mengelola stabilitas ekonomi makro. Walaupun pertumbuhan PDB riil mencapai tingkat 5,0 persen selama paruh kedua tahun 2014, ada indikasi bahwa tekanan turun terhadap pertumbuhan permintaan tetap bertahan hingga akhir tahun. Pada kuartal akhir 2014, deflator PDB, pengukuran harga-harga paling luas di dalam ekonomi, hanya sedikit meningkat ke 3,7 persen yoy, turun dari 5,1 persen pada kuartal ketiga. Diukur dengan harga saat ini, PDB meningkat 8,9 persen yoy, turun dari 10,3 persen yoy pada kuartal ketiga. Akhirnya, pertumbuhan PDB dari sisi produksi mencatat angka yang cukup besar, 2,5 poin persentase lebih tinggi dari pengukuran pada sisi pengeluaran (tidak menyertakan perubahan catatan pada persediaan). Perbedaan yang signifikan karena kesulitan pengukuran bukanlah sesuatu yang aneh, namun besarnya perbedaan di kuartal empat juga tampaknya konsisten dengan penawaran yang terhambat permintaan, sampai sejauh mana penjualan akhir riil tidak mencapai *output*, yang akan menjadi rintangan bagi pertumbuhan *output* yang akan datang.

**Gambar 3: Konsumsi swasta menopang pertumbuhan walau diiringi dengan melemahnya investasi dan ekspor bersih**

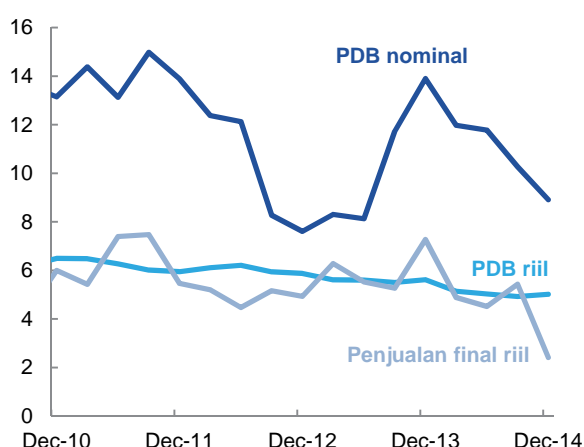
(kontribusi ke pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 4: PDB nominal dan penjualan final riil menunjuk ke tekanan penurunan pertumbuhan hingga akhir tahun 2014**

(pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Catatan: Penjualan final riil = jumlah konsumsi+investasi+ekspor bersih

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**...sementara indikator kegiatan**

Indikator-indikator ekonomi berfrekuensi tinggi juga memperlihatkan perlemahan yang berkelanjutan, yang berlanjut ke bulan-bulan awal tahun 2015. Penjualan kendaraan dan sepeda motor mengalami kontraksi sebesar 15,6 dan 9,7 persen

**ekonomi juga tetap lemah secara umum**

secara rata-rata bergerak tiga-bulanan (3mma) dibandingkan dengan nilai di periode yang sama satu tahun yang lalu sampai bulan Januari, dirintangi oleh kredit yang relatif ketat dan, pada beberapa hal, antisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014. Penjualan ritel secara keseluruhan seperti diukur oleh BI meningkat 9,2 persen 3mma yoy, lebih rendah dari 14,4 persen yang tercatat pada medio 2014. Penjualan semen selama 3 bulan hingga Januari memperlihatkan perkembangan yang mendatar dibanding tahun yang lalu, sementara pada sektor manufaktur, indeks pembelian manajer (*purchasing managers index*, PMI) yang disusun oleh HSBC turun menjadi 47,5 pada bulan Februari, menandai kontraksi selama empat bulan berturut-turut, dan angka paling rendah selama hampir 4 tahun terakhir. Impor barang-barang modal, suatu indikator investasi tetap yang umumnya dapat diandalkan, turun sebesar 14,0 persen 3mma yoy pada bulan Januari.

**Pada skenario *base case* pertumbuhan PDB diperkirakan akan sedikit meningkat ke 5,2 persen pada tahun 2015 dan 5,5 persen pada tahun 2016**

Melihat ke depan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 5,2 persen untuk tahun 2015, dan sedikit meningkat ke 5,5 persen pada tahun 2016 (Tabel 2, kedua proyeksi itu tidak berubah dari proyeksi yang lalu dalam Triwulanan edisi bulan Desember 2014). Proyeksi dasar (*baseline*) tersebut adalah berdasarkan pertumbuhan konsumsi swasta yang relatif stabil, bersama-sama dengan percepatan dalam belanja investasi tetap menjadi diatas 6 persen pada kuartal pertama tahun 2016. Volume ekspor diperkirakan akan mencatat pemulihan bertahap namun impor juga akan meningkat karena proyeksi penguatan investasi, termasuk kenaikan belanja infrastruktur. Secara gabungan, ekspor dan impor (ekspor bersih) tidak diproyeksikan memberikan tambahan kepada pertumbuhan selama masa proyeksi hingga tahun 2016. Risiko-risiko terhadap proyeksi pertumbuhan dasar (*baseline*) menunjukkan pada penurunan pertumbuhan, karena tekanan yang sedang berlangsung terhadap pertumbuhan investasi dan belanja rumah tangga dari tekanan margin keuntungan dan kredit yang ketat dapat terus mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sumber utama kenaikan adalah bila terjadi investasi yang lebih cepat dari yang diperkirakan, namun bila tidak diikuti oleh pertumbuhan ekspor, maka rintangan-rintangan luar negeri terhadap pertumbuhan dapat mengetat dengan cepat.

**Kotak 1: Perubahan tahun dasar dan revisi PDB Indonesia**

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan laporan statistik neraca nasional pada tanggal 5 Februari. Selain memberikan data kuartal akhir 2014, laporan ini juga menyertakan dua perubahan yang signifikan terhadap data statistik PDB Indonesia: pertama, dasar perhitungan diubah dari tahun 2000 ke tahun 2010 dan, kedua, laporan itu menggunakan pembaruan yang signifikan pada metodologi dan penyajian data statistik, memperbaharui neraca nasional Indonesia dari Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts*, SNA) tahun 1993 menjadi SNA 2008.

Karena perubahan itu, ekonomi Indonesia tampak lebih besar secara signifikan, dan mencatat pertumbuhan yang sedikit lebih lambat, dibanding laporan sebelumnya. Total produksi (*output*) pada harga sekarang sekitar 4,4 persen lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya pada tahun 2014 (dan 5,2 persen lebih besar secara rata-rata selama periode tahun 2010-2014). Perubahan itu merupakan perubahan yang signifikan, menambah Rp 448 triliun, atau sekitar 35 miliar dolar AS pada nilai tukar pasar yang sekarang berlaku, kepada proyeksi ukuran ekonomi tahun 2014. Sekitar sepertiga dari tambahan pengukuran produksi tersebut berasal dari penyertaan jenis-jenis kegiatan ekonomi baru sesuai dengan SNA 2008, dan sekitar dua per tiga berasal dari pengukuran yang lebih akurat dari jenis-jenis produksi yang sebelumnya pernah diukur menurut BPS. Walau peningkatan pengukuran hasil produksi tersebut menghasilkan tingkat PDB yang lebih tinggi, pengukuran itu juga menghasilkan pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah secara signifikan sejak tahun 2011, sebesar 0,3 poin persentase untuk tahun 2011, sekitar 0,2 poin persentase untuk tahun 2012 dan 2013, dan hanya 0,04 poin persentase untuk tahun 2014.

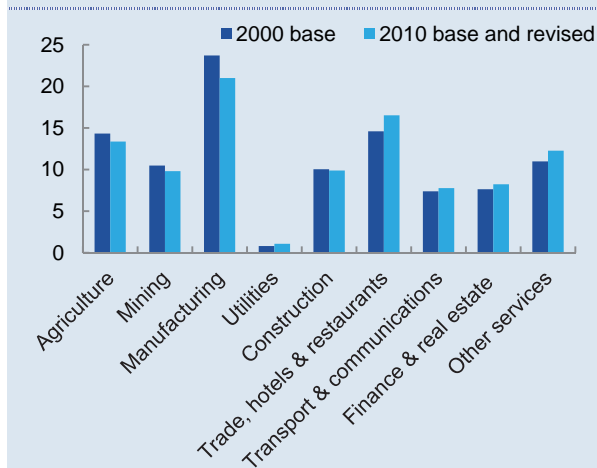
PDB adalah satuan pengukur yang sangat penting bagi persediaan-persediaan dan aliran-aliran ekonomi utama. Sebagai akibat dari revisi tersebut, dan dalam hal data fiskal ketersediaan PDB kuartal empat 2014, perubahan-perubahan terhadap rasio yang penting termasuk:

- Defisit neraca berjalan (atau surplus belanja investasi dibanding tabungan): 26,2 miliar dolar AS pada tahun 2014, sebelumnya setara dengan 3,1 persen dari PDB, kini lebih kecil menjadi 3,0 persen dari PDB.
- Hutang luar negeri: 293,6 miliar dolar AS pada bulan Desember 2014 (menurut Bank Indonesia), sebelumnya setara dengan 34,7 persen dari PDB untuk tahun 2014, kini lebih kecil menjadi 33,0 persen
- Defisit fiskal, pada Rp 227,4 triliun pada 2014, sebelumnya adalah 2,3 persen dari PDB, kini lebih kecil menjadi 2,2 persen. Penerimaan pajak, pada Rp 1.143 triliun pada tahun 2014, sebelum setara dengan 11,4 persen dari PDB, kini menyusut menjadi 10,8 persen dari PDB.

Seperti ditunjukkan pada contoh-contoh di atas, besarnya perubahan rasio PDB di Indonesia tidak cukup kuat untuk mendorong perkiraan ulang akan kondisi-kondisi dan risiko-risiko ekonomi. Sebaliknya, sejumlah revisi historis dan metodologi di negara lain menghasilkan perbedaan yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, pada bulan April 2014, revisi PDB Nigeria meningkatkan ukuran ekonomi yang diukur hampir dua kali lipat, sehingga menjadi yang terbesar di Afrika dan melampaui ekonomi Afrika Selatan.

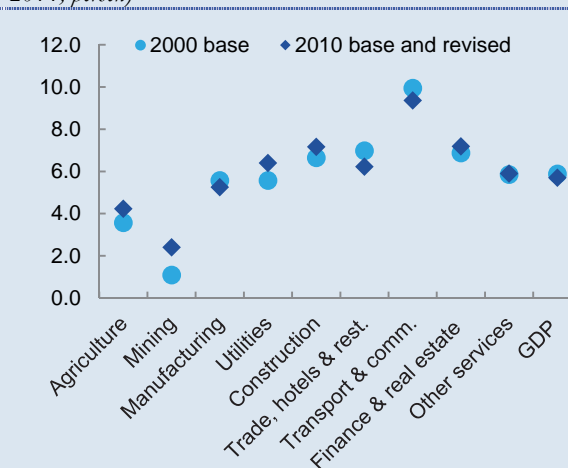
Diatas perubahan garis besar PDB dan sejumlah rasio utama, angka-angka yang direvisi juga menandai suatu langkah maju yang penting dalam proses berkelanjutan untuk meningkatkan pencatatan statistik ekonomi Indonesia yang besar dan cepat berubah. Berkat metodologi baru itu, kini tersedia data sektoral yang lebih rinci, dengan jumlah sektor-sektor utama meningkat dari 9 ke 17. Penggunaan sektor-sektor yang lalu sebagai dasar perbandingan memperlihatkan bahwa, dengan menggunakan cara yang baru, sektor jasa secara bersama-sama memberikan sumbangan produksi terukur yang lebih besar (Gambar 5), sementara rata-rata pertumbuhan dari sektor jasa pada beberapa tahun terakhir ternyata sedikit lebih lambat dibanding pengukuran sebelumnya, kecuali untuk keuangan dan real estate (Gambar 6).

**Gambar 5: Sektor jasa kini memiliki kontribusi yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi...**  
(bagian PDB pada harga tahun 2014 menurut PDB yang direvisi dan dengan dasar baru, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 6: ...namun perhitungan baru juga menunjukkan sedikit perlambatan pertumbuhan PDB dan sektor jasa pada tahun-tahun terakhir**  
(rata-rata laju pertumbuhan tahun pada harga konstan, 2011-2014, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

### 3. Perubahan harga BBM bersubsidi sebagai pendorong utama inflasi

**Inflasi meningkat tajam pada akhir 2014, karena kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, namun dasar tekanan inflasi tetap terkendali...**

Kenaikan harga bensin dan solar rata-rata sebesar 34 persen pada bulan November 2014 mendorong kenaikan inflasi yang tajam, menjadi 8,4 persen *yoY* pada bulan Desember, naik dari 4,8 persen *yoY* pada bulan Oktober. Kenaikan ini, walau besar, mencerminkan pengaruh langsung dan cakupan dari biaya masukan (*input*) harga BBM terhadap keseluruhan tingkat indeks harga konsumen (IHK), daripada kenaikan tingkat harga lainnya sepanjang waktu. Hal ini konsisten dengan pengaruh inflasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang lalu, di bulan Juni 2013, yang mempunyai dampak yang besar pada tingkat harga-harga. Perbedaan besar terjadi dengan membandingkan inflasi tahun-ke-tahun di bulan Juli dan di bulan Agustus 2014, di mana inflasi tahun-ke-tahun turun dari 6,7 persen di bulan Juni 2014 menjadi 4,0 persen di bulan Agustus 2014. Diluar dampak kenaikan harga BBM bulan November tersebut, hal-hal yang mendasari tekanan inflasi masih tetap terkendali. Bila harga BBM tidak berubah hingga akhir tahun 2014, IHK umum tampaknya akan meningkat sebesar 0,4 poin persentase selama bulan November dan Desember, menutup tahun dengan inflasi yang datar sebesar 4,9 persen.

**...dan penurunan harga BBM pada bulan Januari telah mendorong deflasi harga**

Setelah reformasi harga BBM yang efektif pada 1 Januari 2015 (lihat Kotak 3), harga-harga bensin RON88 yang sebelumnya disubsidi, dan solar, diturunkan sebesar rata-rata 18,1 persen dari harganya pada bulan November 2014, mencerminkan harga BBM yang lebih rendah. Hal ini berkontribusi pada penurunan IHK umum sebesar 0,2 persen bulan-ke-bulan (*month-on-month*, mom) pada bulan Januari, menurunkan inflasi menjadi 7,0 persen tahun-ke-tahun, dan penurunan lebih lanjut sebesar 0,4 persen mom pada bulan Februari, sehingga menurunkan inflasi tahun-ke-tahun menjadi 6,3 persen. Inflasi inti, yang mengukur inflasi dengan tidak menyertakan harga-harga yang cepat berubah seperti bahan pangan dan bahan bakar, bertahan sedikit di bawah 5,0 persen sejak bulan Desember. Namun harga beras melonjak pada bulan Februari, seperti dibahas pada Bagian B.1.

**Momentum inflasi diperkirakan akan tetap moderat, dengan inflasi IHK yang tidak melampaui batas rata-rata sebesar 6,5 persen untuk tahun 2015**

Prospek inflasi sangat bergantung kepada perubahan harga ritel BBM di masa depan, yang pada gilirannya bergantung pada harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Harga bensin premium RON88 naik tipis sebesar Rp 200 per liter mulai tanggal 1 Maret, sementara harga solar masih tetap tidak berubah (lihat Kotak 3). Menurut asumsi-asumsi dasar (*baseline*), inflasi diproyeksikan akan turun hingga di bawah 5,0 persen yoy pada akhir tahun 2015. Hal ini mendorong inflasi rata-rata tahunan 2015 menjadi 6,5 persen, yang mencerminkan dasar momentum inflasi yang stabil dan dengan mengabaikan bagian kenaikan harga yang besar di November 2014 dari perbandingan tahunan tersebut. Risiko-risiko terhadap prospek inflasi bersifat seimbang. Tekanan sisi permintaan harus dibatasi dengan laju pertumbuhan yang moderat relatif terhadap yang telah berlangsung di Indonesia pada tahun-tahun terakhir, walau kini hanya dengan kesenjangan produksi (*output gap*) yang kecil (lihat Bagian B.3.). Risiko-risiko inflasi yang lebih tinggi umumnya berasal dari berlanjutnya depresiasi rupiah, maupun kenaikan harga BBM di masa depan. Pengaruh depresiasi rupiah terhadap inflasi belum terlihat sejauh ini (dan perkiraan regresi menunjukkan bahwa 10 persen depresiasi rupiah hanya menyebabkan kenaikan harga sekitar 0,3 poin persentase). Namun pengaruh (*pass-through*) nilai tukar diperkirakan akan lebih kuat setelah harga solar dan bensin yang sebelumnya disubsidi, menjadi bergantung kepada harga keekonomian dalam denominasi rupiah.

Tabel 2: Skenario dasar (*base case*), PDB diperkirakan akan tumbuh ke 5,2 persen pada 2015, dan 5.5 persen pada 2016 (*persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain*)

	Tahunan				Tahun-ke-tahun pada kuartal empat				Revisi tahunan	
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2015	2016
<b>1. Indikator ekonomi utama</b>										
Jumlah pengeluaran konsumsi	5,6	4,8	4,5	4,9	5,7	4,5	4,5	4,9	-0,3	-0,1
Pengeluaran konsumsi swasta	5,4	5,3	4,7	5,2	5,7	4,9	4,8	5,3	-0,2	0,0
Konsumsi pemerintah	6,9	2,0	3,8	3,2	6,1	2,8	3,2	3,2	-0,6	-0,1
Pembentukan modal tetap bruto	5,3	4,1	5,2	6,1	4,7	4,3	5,9	6,1	0,3	0,0
Ekspor barang dan jasa	4,2	1,0	2,6	5,7	3,2	-4,5	5,1	5,7	-1,5	-0,6
Impor barang dan jasa	1,9	2,2	4,0	6,1	5,0	3,2	4,8	6,6	1,0	0,2
<b>Produk Domestik Bruto</b>	5,6	5,0	5,2	5,5	5,1	5,0	5,4	5,5	0,0	0,0
<b>2. Indikator luar negeri</b>										
Neraca pembayaran (AS\$ miliar)	-7,1	17,4	9,0	8,9	-	-	-	-	-0,7	-2,5
Saldo neraca transaksi berjalan (AS\$ miliar)	-29,1	-26,2	-29,1	-34,5	-	-	-	-	-2,0	-5,3
<i>Sebagai bagian dari PDB (persen)</i>	-3,2	-3,0	-3,0	-3,2	-	-	-	-	-0,2	-0,4
Neraca perdagangan (AS\$ miliar)	-6,2	-3,6	-3,9	-4,6	-	-	-	-	-3,7	-5,8
Saldo neraca keuangan (AS\$ miliar)	22,0	43,6	38,0	43,2	-	-	-	-	1,2	2,6
<b>3. Indikator Fiskal</b>										
Penerimaan pem. pusat (% dari PDB)	15,1	14,6	12,8		-	-	-		-1,7	-
Belanja pem. pusat (% dari PDB)	17,3	16,7	15,4		-	-	-		-1,1	-
Neraca fiskal (% dari PDB)	-2,2	-2,2	-2,5		-	-	-		-0,5	-
Neraca primer (% dari PDB)	-1,0	-0,9	-1,2		-	-	-		-0,5	-
<b>4. Pengukuran ekonomi lainnya</b>										
Indeks harga konsumen	6,4	6,4	6,5	5,1	8,0	6,5	5,3	5,3	-1,0	-0,1
Deflator PDB	4,7	5,4	4,1	5,3	7,8	3,7	4,7	5,3	-3,5	0,0
PDB nominal	10,6	10,7	9,4	11,1	12,0	8,9	10,4	11,1	-3,8	0,0
<b>5. Asumsi ekonomi</b>										
Nilai tukar (Rp/AS\$)	10563	11800	12600	12600	-	-	-		500,0	500,0
Harga minyak mentah Indonesia (AS\$/barel)	106	98	55	57	-	-	-		-30,0	-29,0

Catatan: Angka ekspor dan impor merujuk kepada volume dari neraca nasional. Semua angka-angka, termasuk rasio fiskal, berdasarkan PDB yang direvisi dan diuba dasarnya. Nilai tukar dan harga minyak mentah adalah asumsi berdasar rata-rata terbaru. Revisi-revisi adalah relatif dibanding proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Desember 2014.

Sumber: Kemenkeu; BPS; BI; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia

## 4. Penurunan harga minyak mendukung neraca perdagangan

**Defisit neraca transaksi berjalan tak banyak berubah dan “neraca dasar” kembali melebar di kuartal akhir 2014...**

Dinamika neraca pembayaran Indonesia didominasi oleh aliran masuk modal portofolio yang sangat kuat pada tahun 2014, yang menjaga keseluruhan neraca pembayaran dalam keadaan surplus walau defisit neraca transaksi berjalan hanya mencatat penurunan yang kecil. “Neraca dasar”, yang merupakan ukuran ketergantungan terhadap aliran investasi yang mudah berubah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan neraca transaksi berjalan, meningkat ke 3,6 miliar dolar AS di kuartal keempat tahun 2014, mendekati ke rata-rata tiga-tahunnya yang persisten sebesar 3,2 miliar dolar AS per kuartal. Ke depan, penurunan harga minyak diperkirakan akan menurunkan defisit perdagangan bersih minyak, namun melemahnya harga berbagai komoditas, dan juga kenaikan permintaan impor barang modal, termasuk karena kenaikan investasi infrastruktur, akan tetap membuat neraca berjalan dalam keadaan defisit selama tahun 2015.

**... penurunan harga minyak berkontribusi terhadap penurunan kecil defisit neraca berjalan menjadi 2,8 persen dari PDB**

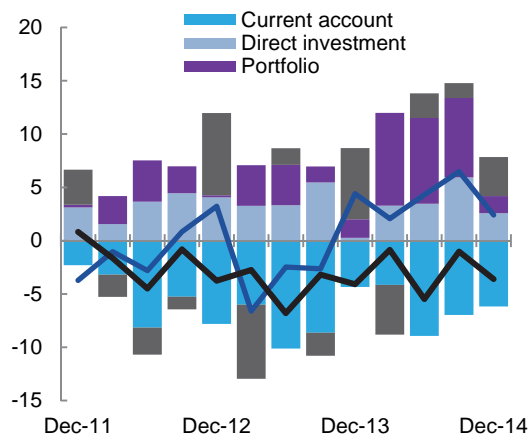
Defisit neraca transaksi berjalan menyusut ke 6,2 miliar dolar AS pada kuartal akhir tahun 2014 (2,8 persen dari PDB), dari 7,0 miliar dolar AS (3,0 persen dari PDB) pada kuartal yang lalu. Defisit perdagangan migas, pada 2,8 miliar dolar AS, sedikit menyusut sebesar 354 juta dolar AS dibanding kuartal yang lalu. Surplus perdagangan non-migas meningkat sebesar 526 juta dolar AS, menjadi 4,9 miliar dolar AS, sebagian besar karena peningkatan dalam penerimaan ekspor sementara impor tetap relatif datar. Data bea cukai bulan Januari menunjukkan surplus perdagangan yang besar sejumlah 709 juta dolar AS, atau naik dari 187 juta dolar AS pada bulan Desember, terutama akibat turunnya biaya impor minyak mentah. Ke depan, biaya impor bersih minyak diperkirakan akan semakin menyusut sejalan dengan pengaruh dari penurunan harga minyak dunia dibandingkan harga tahun 2014 kepada harga bahan bakar pasca penyulingan. Namun manfaat terhadap defisit neraca transaksi berjalan secara keseluruhan diperkirakan akan diimbangi sebagian dengan penurunan penerimaan ekspor gas alam karena pengaruh kontraksi harga yang mengikuti penurunan harga patokan minyak dunia (lihat Bagian C untuk pembahasan prospek sektor migas). Sub neraca lain neraca berjalan terus stabil antara kuartal ketiga dan keempat 2014; defisit perdagangan jasa meningkat sebesar 190 juta dolar AS ke 2,79 miliar dolar AS di kuartal keempat, dan defisit penerimaan menyusut sebesar 170 juta dolar AS ke 5,76 miliar dolar AS.

**Tekanan terhadap penerimaan ekspor komoditas berlanjut di kuartal empat 2014**

Ekspor di kuartal terakhir 2014 berjumlah 43,2 miliar dolar AS, 10,1 persen lebih rendah dibanding satu tahun yang lalu, merupakan angka yang terendah sejak kuartal ketiga tahun 2010. Penerimaan ekspor terkait komoditas, terutama migas, termasuk batubara dan produk-produk mineral lainnya, mengalami penyusutan sebesar 29,1

**Gambar 7: Defisit neraca transaksi berjalan sedikit berkurang di kuartal empat namun “neraca dasar” melebar**

(miliar dolar AS)



Catatan: Neraca dasar = saldo neraca transaksi berjalan + bersih

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

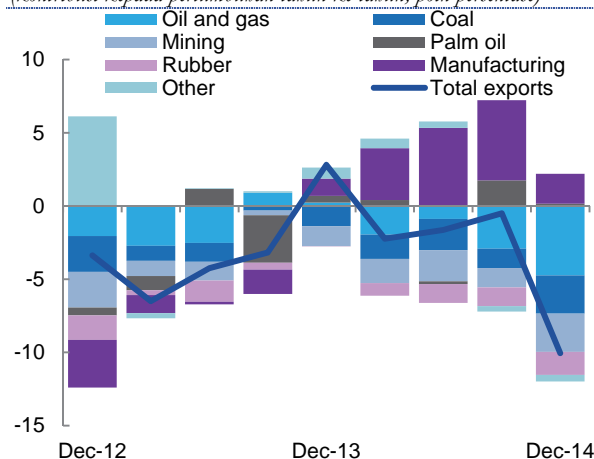
persen *yy*, yang mendorong penurunan (Gambar 8). Penurunan penjualan komoditas ke Cina dan Jepang merupakan salah satu sumber utama penurunan ekspor Indonesia (Kotak 2). Ekspor manufaktur meningkat 5,2 persen tahun-ke-tahun ke 19,8 miliar dolar AS di kuartal empat tahun 2014, dan ini sedikit meredam kontraksi ekspor secara keseluruhan sebesar 2,0 poin persentase, namun tanpa momentum kenaikan yang berkelanjutan.

### Impor tetap lemah, terutama karena turunnya biaya impor minyak

Impor turun sebesar 5,9 persen *yy* di kuartal akhir tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya impor BBM, namun semua kelompok impor utama—barang-barang konsumen, bahan mentah dan barang-barang modal—masih tetap lebih rendah secara signifikan dibanding tingkat harganya satu tahun yang lalu (Gambar 9). Impor barang-barang konsumen turun sebesar 10,3 persen *yy*, yang mendorong keseluruhan impor sebesar 0,7 poin persentase, sementara impor barang modal dan bahan mentah secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 1,5 poin persentase kepada keseluruhan kontraksi impor pada kuartal empat dibanding tingkatnya satu tahun yang lalu. Berlanjutnya perlemahan impor, walau dengan tanda-tanda stabilisasi impor barang modal belakangan ini, masih konsisten dengan indikator-indikator lain yang menunjuk kepada kondisi permintaan dalam negeri yang lemah sepanjang akhir tahun 2014 (lihat Bagian 2).

**Gambar 8: Lemahnya penerimaan ekspor komoditas terus membebani ekspor secara keseluruhan...**

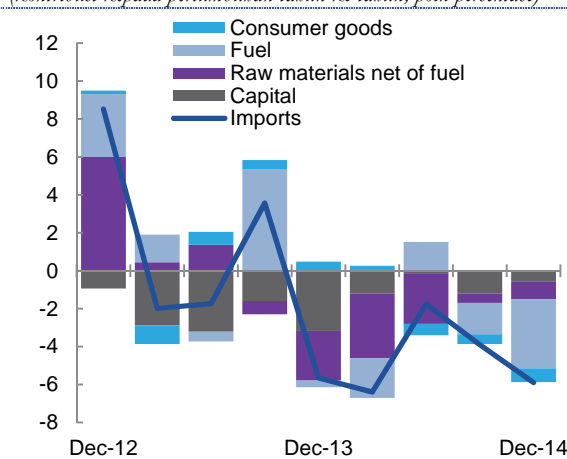
(kontribusi kepada pertumbuhan tahun-ke-tahun, poin persentase)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 9: ...sementara impor turun tajam di kuartal empat 2014 karena penurunan biaya BBM**

(kontribusi kepada pertumbuhan tahun-ke-tahun, poin persentase)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

### Aliran masuk bersih PMA dan portofolio lebih lemah pada kuartal empat dibanding empat kuartal sebelumnya

Aliran masuk modal turun signifikan pada sisi modal dan finansial neraca pembayaran pada kuartal empat, menjadi 7,8 miliar dolar AS dari 14,7 miliar dolar AS pada kuartal ketiga. Investasi langsung turun ke 2,6 miliar dolar AS dari 6,0 miliar dolar AS pada kuartal ketiga, terutama karena penurunan investasi ke dalam negeri (pada 5,5 miliar dolar AS pada kuartal empat, turun dari 8,2 miliar dolar AS pada kuartal ketiga). Sejalan dengan itu, setelah aliran masuk modal portofolio yang sangat kuat selama tiga kuartal (yang berjumlah 24,2 miliar dolar AS selama kuartal satu hingga tiga tahun 2014) yang didorong oleh pembelian bersih sekuritas pemerintah oleh investor asing, aliran masuk modal portofolio turun ke 1,6 miliar dolar AS. Aliran masuk investasi “lain” meningkat sebesar 1,4 miliar dolar AS dari kuartal yang lalu menjadi 3,7 miliar dolar AS, terutama didorong oleh kenaikan hutang swasta (naik dari 3,0 miliar dolar AS pada kuartal ketiga menjadi 4,4 miliar dolar AS).



**Kotak 2: Berakhirnya lonjakan ekspor Indonesia<sup>1</sup>**

Indonesia mencatat lonjakan ekspor pada periode 2003-2011, dengan nilai ekspor dalam dolar AS meningkat hampir tiga kali lipat. Penerimaan ekspor turun pada tahun 2009 karena krisis keuangan dunia, namun pertumbuhannya kembali pulih dengan cepat, dan mencapai puncaknya pada tahun 2011. Ekspor komoditas<sup>2</sup> mendorong pertumbuhan ini, dan meningkat dari 52 persen dari jumlah penerimaan ekspor pada tahun 2001 menjadi 68 persen pada tahun 2011, dengan ekspor manufaktur dan lain-lain tumbuh pada laju yang lebih lambat dan mengalami kontraksi sebagai bagian ekspor dari 48 ke 32 persen. Namun ekspor mulai turun sejak tahun 2011. Ekspor barang dagangan, yang berkontribusi 24,1 persen dari PDB pada tahun 2011, turun menjadi 21,1 persen dari PDB pada tahun 2014. Ekspor mengalami kontraksi dalam tiga tahun terakhir, dengan penurunan sebesar 13,4 persen dalam dolar AS pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan nilai puncaknya pada tahun 2011, yang besar penurunannya dapat dibandingkan dengan penyusutan sebesar 15,1 persen yang terjadi pada krisis keuangan dunia tahun 2009, walau penurunan tersebut terjadi dalam periode yang jauh lebih panjang (Gambar 10).

Seperti kenaikan ekspor sebelum tahun 2011, penurunan ekspor pada tiga tahun terakhir disebabkan oleh ekspor yang berhubungan dengan komoditas. Penerimaan ekspor komoditas berada pada kisaran seperlima lebih rendah (-21,7 persen) pada tahun 2014 dibanding 2011, yang menurunkan bagian ekspor komoditas menjadi 62 persen dari keseluruhan ekspor pada tahun 2014. Ekspor non-komoditas, terutama komoditas, meningkat dengan sangat perlahan selama periode tersebut, sebesar 5 persen lebih tinggi pada tahun 2014 dibanding 2011, dengan rata-rata 65 miliar dolar AS per tahun selama periode 2011-2014 (Gambar 10 dan Gambar 11).

Penurunan tajam harga-harga komoditas global mendorong sebagian besar penurunan dalam penerimaan ekspor komoditas Indonesia. Indeks harga-harga patokan dunia untuk enam komoditas ekspor utama Indonesia, dengan tertimbang menurut porsi penerimaan ekspor, adalah 40 persen lebih rendah pada bulan Februari 2015 dibanding puncak bulannya pada Februari 2011 (Gambar 12). Selain itu, ekspor komoditas Indonesia juga terpengaruh oleh penurunan permintaan batubara dari Cina (walau sebagian diimbangi oleh peningkatan permintaan dari India, dengan volume ekspor batubara sedikit meningkat secara keseluruhan), penurunan produksi migas, dan penghentian ekspor yang dipengaruhi oleh larangan ekspor untuk sebagian bahan mineral mentah pada bulan Januari 2014 (lihat Bagian C). Pertumbuhan volume yang kuat telah mengimbangi penurunan harga untuk minyak kelapa sawit (CPO), dengan dukungan peningkatan permintaan dari Pakistan, beberapa negara Eropa, dan penambahan 25 pasar ekspor baru (negara-negara tujuan ekspor CPO) dari tahun 2011 ke 2014 (Gambar 11).

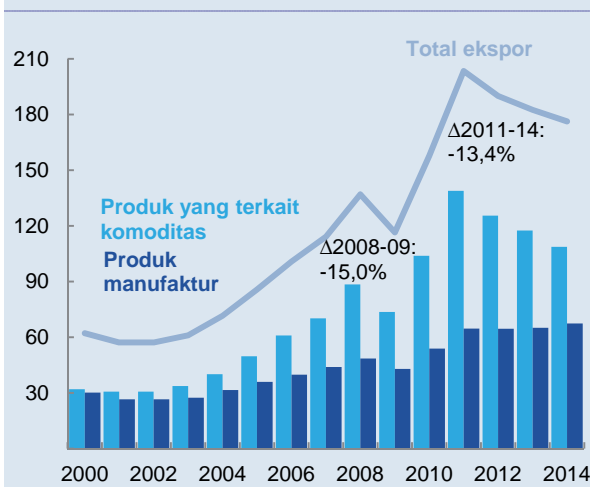
Ekspor Indonesia ke Jepang dan Cina sebagai dua negara tujuan utama belakangan ini menjadi sumber penurunan. Kenaikan ekspor sejak krisis keuangan dunia tahun 2009 hingga tahun 2011 sangat terkait dengan peningkatan permintaan dari kedua negara tersebut. Ekspor ke Cina meningkat dua kali lipat dari tahun 2009 menjadi sekitar 23 miliar dolar AS pada tahun 2011, mendorong Cina menjadi negara tujuan ekspor utama, melampaui AS, Eropa dan Singapura, dan hanya setingkat di belakang Jepang sejak tahun 2011 (Gambar 12). Namun selama tiga tahun terakhir, penjualan ekspor ke Cina dan Jepang telah mengalami penurunan yang tajam, yang menjadi sebab utama penurunan dalam jumlah ekspor. Produksi minyak dan gas yang lebih rendah bersamaan dengan kejatuhan harga minyak belakangan ini menjadi penyebab utama turunnya ekspor ke Jepang, yang 31,2 persen lebih rendah di tahun 2014 dibanding tahun 2011. Ekspor ke Cina turun sebesar 23,5 persen dari tahun 2011 hingga 2014, dengan sebagian besar penurunan terjadi pada tahun yang lalu dengan berlanjutnya perlambatan ekonomi Cina, penurunan harga dan permintaan mineral yang terkait, dan larangan ekspor mineral pada bulan Januari 2014 mengikis ekspor sebesar 22,3 persen yoy. Ekspor batubara ke Cina mengalami penurunan sebesar 23 persen menjadi 4 miliar dolar AS pada tahun 2014 dari 5,6 miliar dolar AS pada tahun 2011, sementara ekspor bahan mineral dan karet turun masing-masing sebesar 70 persen dan 64 persen pada periode yang sama, yang menyebabkan ekspor bagi masing-masing komoditas tersebut berjumlah kurang dari 800 juta dolar AS pada tahun 2014 dibanding lebih dari 1,7 miliar dolar AS pada tahun 2011. Secara bersama-sama, ekspor komoditas yang lebih lemah ke Jepang dan Cina memberikan kontribusi sebesar 7,3 poin persentase kepada penurunan ekspor secara total dari tahun 2011 hingga 2014 (Gambar 13).

Ekspor tampaknya memiliki prospek yang menantang, karena harga komoditas dan aliran perdagangan dunia secara umum tidak diproyeksikan akan meningkat dengan tajam. Peningkatan ekspor Indonesia secara signifikan merupakan hal yang sulit dicapai kecuali Indonesia berhasil memperluas pangsa pasar dunia untuk produk-produknya yang telah ada atau masuk ke pasar-pasar baru, yang pada gilirannya akan membutuhkan peningkatan dalam daya saing internasional Indonesia.

<sup>1</sup> Lihat Bagian C untuk analisis mendetil tentang dampak lonjakan komoditas dalam evolusi sektor sumber daya alam Indonesia, dampak dari perubahan pada sektor sumber daya alam pada ekonomi makro (pertumbuhan, sektor luar negeri dan penerimaan) dan hasil-hasil pembangunan sumber daya manusia dari tahun 2002 hingga 2013, dan pengelolaan kerentanan yang timbul dari proyeksi penurunan dalam produksi dan harga komoditas.

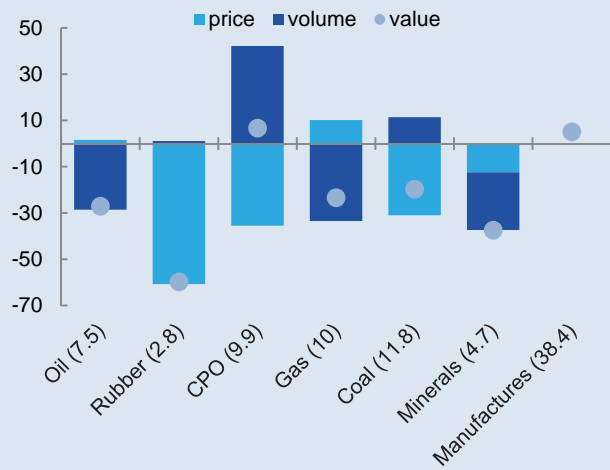
<sup>2</sup> Pada kotak ini komoditas termasuk sektor-sektor sumber daya alam (migas dan pertambangan) dan juga komoditas pertanian seperti CPO dan karet. Pembahasan pada Bagian C memfokuskan pada sektor-sektor sumber daya alam (migas dan pertambangan).

**Gambar 10: Ekspor menurun sejak 2011, terutama karena pelemahan penerimaan komoditas...**  
(miliar dolar AS)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

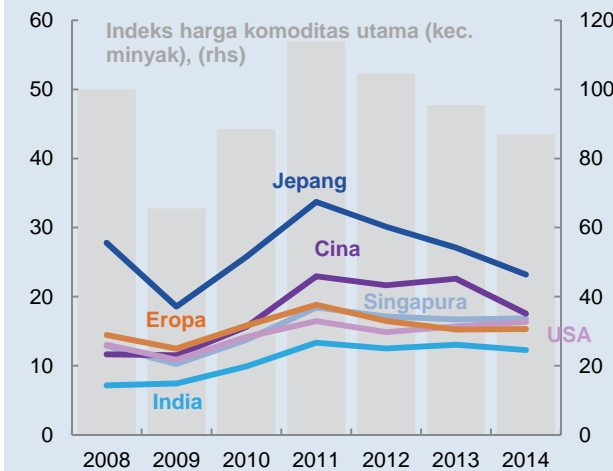
**Gambar 11: ...yang tertekan oleh penurunan harga dan volume, kecuali untuk CPO dan batubara**  
(perubahan nilai ekspor karena perbedaan dalam volume dan harga, Jan-Okt 2011 ke Jan-Okt 2014, persen)



Catatan: Angka dalam kurung adalah bagian persentase ekspor tahun 2014; mineral termasuk tembaga, nikel, bauksit, timah dan biji besi.

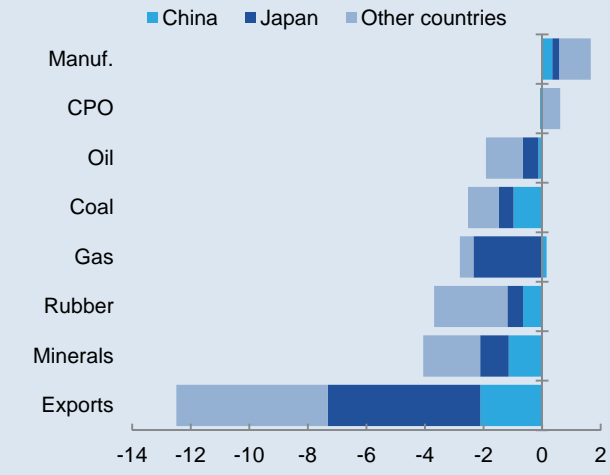
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 12: Ekspor ke Jepang dan Cina, dua pasar teratas Indonesia, turun tajam sejak 2011...**  
(ekspor ke tujuan utama, miliar dolar AS; indeks harga, '08= 100)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 13: ...mendorong turunnya lebih dari setengah ekspor agregat pada periode 2011-2014**  
(rincian pertumbuhan nilai ekspor menurut negara dan produk, Jan-Okt 2011 ke Jan-Okt 2011, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Neraca transaksi berjalan diproyeksikan tak akan banyak berubah di tahun 2015 dan melebar di tahun 2016 karena melemahnya harga-harga komoditas dan kenaikan investasi

Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan sedikit melebar dalam dolar AS pada tahun 2015 dan berlanjut ke tahun 2016, dan akan tetap berada pada kisaran 3,0 persen dari PDB untuk tahun 2015 secara keseluruhan, sedikit melebar menjadi 3,2 persen pada tahun 2016. Penurunan harga minyak sejak bulan Juni 2014, dengan semua hal lain diasumsikan sama, diperkirakan akan menurunkan defisit neraca transaksi

berjalan hingga sebesar 0,5 persen dari PDB. Namun, memasuki tahun 2016, percepatan belanja investasi diperkirakan akan mendorong naik impor dan defisit neraca berjalan. Dibandingkan dengan Triwulanan edisi bulan Desember 2014, proyeksi saldo neraca berjalan tetap tidak berubah untuk tahun 2015 dan telah direvisi turun sebesar 0,4 poin persentase untuk tahun 2016, yang mencerminkan harga komoditas yang lebih rendah dan proyeksi peningkatan belanja investasi.

## 5. Rupiah menguat secara efektif riil

Sementara mengalami depresiasi terhadap dolar AS, rupiah mencatat apresiasi secara efektif riil...

Sejak bulan Juli 2014, rupiah mencatat depresiasi terhadap dolar AS, sebesar 10,2 persen (sampai 13 Maret 2015). Hal ini harus dilihat dari sudut pandang menguatnya dolar terhadap tidak hanya rupiah, namun juga terhadap sebagian besar mata uang dunia. Indeks umum dolar AS meningkat sebesar 17,2 persen selama periode Juli 2014-Februari 2015, yang secara historis merupakan peningkatan yang sangat besar. Hal ini dapat dikaitkan terhadap kenaikan relatif dalam pertumbuhan ekonomi di AS, dan perbedaan kebijakan moneter antara AS (dengan Bank Sentral AS diperkirakan akan mulai meningkatkan suku bunga pada tahun 2015), zona Euro (dengan Bank Central Eropa, ECB memulai program “pembelian sekuritas” besar sejak bulan Januari) dan Jepang. Mempertimbangkan kinerja rupiah dibanding mata uang asing lainnya (Gambar 14), rupiah lebih kuat pada bulan Januari sebesar 3,9 persen *yoy* berdasarkan perhitungan perdagangan tertimbang (efektif) (seperti diukur oleh *Bank International for Settlement, BIS*). Secara riil (yaitu menyesuaikan dengan inflasi dalam negeri Indonesia yang relatif lebih tinggi), kurs tukar dengan tertimbang perdagangan telah menguat sejak bulan Juni 2014, dan meningkat sebesar 10,0 persen *yoy* menurut perkiraan *BIS* yang terakhir tersedia, yaitu untuk bulan Januari. Karenanya sampai bulan Januari rupiah hanya 3,2 persen berada di bawah tren 10-tahunnya, dibandingkan dengan 12,2 persen di bawah tren pada akhir tahun 2013, mengikuti penyesuaian mata uang yang besar pada tahun tersebut (Gambar 15).

Tabel 3: Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan 3,0 persen dari PDB pada tahun 2015

(miliar dolar AS kecuali dinyatakan lain)

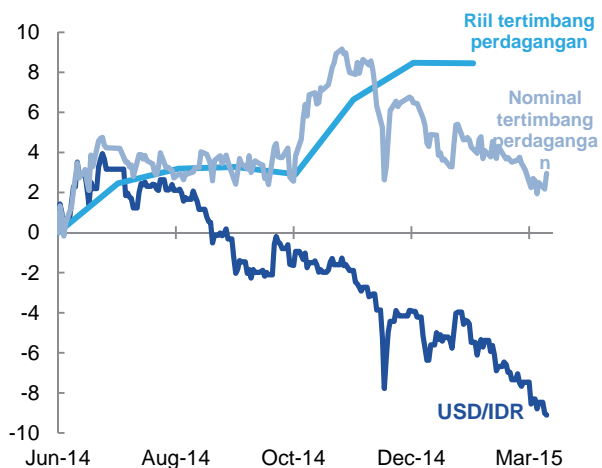
	2013	2014	2015	2016
Keseluruhan neraca pembayaran	-7,1	17,4	9,0	8,9
<i>Sebagai % dari PDB</i>	-0,8	2,0	0,9	0,8
Neraca transaksi berjalan	-29,1	-26,2	-29,1	-34,5
<i>Sebagai % dari PDB</i>	-3,2	-3,0	-3,0	-3,2
Neraca perdagangan barang	5,8	6,9	6,6	6,1
Neraca perdagangan jasa	-12,1	-10,5	-10,5	-10,7
Penerimaan	-27,1	-27,8	-30,8	-35,5
Transfer	4,2	5,2	5,7	5,8
Neraca keuangan dan modal	22,0	43,6	38,0	43,2
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	2,4	4,9	4,0	4,1
Investasi langsung	12,3	15,3	15,5	17,0
Investasi portofolio	10,9	25,8	20,0	23,5
Investasi lain	-1,2	2,5	2,5	2,7
<i>Catatan:</i>				
Neraca dasar	-16,8	-11,0	-13,5	-17,4
<i>Sebagai % dari PDB</i>	-1,8	-1,2	-1,4	-1,6

Catatan: Neraca dasar = saldo neraca berjalan + PMA bersih

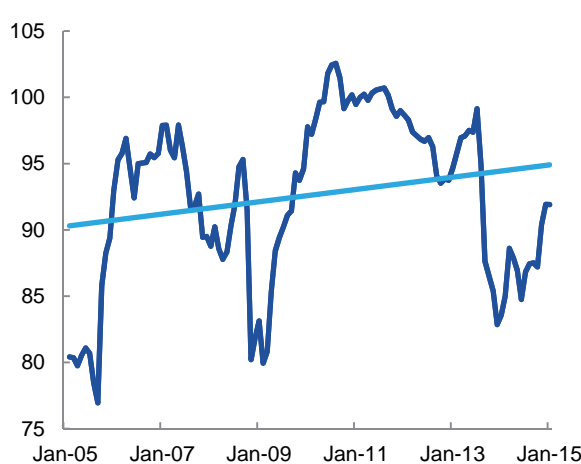
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 14: Rupiah turun terhadap dolar AS sejak medio 2014 namun meningkat secara tertimbang-perdagangan riil...**

(akumulasi apresiasi sejak akhir Juni 2014, persen)



**Gambar 15: ...dengan apresiasi efektif riil yang signifikan sejak 2013 mendekati tren jangka panjang**  
(kurs tukar efektif riil, 2010=100, dan tren linear 10-tahun)



Catatan: Rangkaian riil tertimbang perdagangan adalah rata-rata bulanan hingga 15 Jan. Rangkaian nominal tertimbang perdagangan menggunakan bobot BIS, frekuensi harian  
Sumber: CEIC; BIS; perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: BIS; perhitungan staf Bank Dunia

**...dan aliran masuk modal investasi portofolio hingga awal bulan Maret mendukung harga aset dalam negeri**

Pasar keuangan Indonesia mencatat awal yang baik pada tahun 2015, dengan Indeks Harga Saham Gabungan meningkat 3,8 persen dan imbal hasil (*yield*) obligasi menyusut sebesar 30-50 basis poin (bps) pada berbagai masa jatuh tempo, sampai tanggal 13 Maret 2015. Aliran masuk modal asing ke aset-aset pembiayaan Indonesia, terutama ke obligasi pada bulan Januari, mendukung harga-harga, hingga paruh pertama bulan Maret, yang mencatat penjualan bersih obligasi ke investor asing; pembelian bersih oleh investor asing untuk ekuitas dan obligasi mencapai Rp 32,6 triliun (sekitar 2,5 miliar dolar AS) hingga 12 Maret 2015. Setelah mencatat nilai tertinggi pada tahun 2014 untuk keseluruhan aliran masuk portofolio, kepemilikan sekuritas dalam negeri pemerintah oleh investor asing meningkat ke nilai tertinggi yang pernah tercatat (40,0 persen dari obligasi yang beredar pada akhir bulan Februari), sebelum sedikit berkurang karena aliran keluar bersih modal yang kembali mulai dan berlanjut pada bulan Maret.

**Suku bunga BI diturunkan sebesar 25bps pada bulan Februari, mengembalikan kenaikan pada bulan November 2014**

Bank Indonesia menurunkan suku bunganya sebesar 25bps pada tanggal 17 Februari 2015 menjadi 7,5 persen, tiga bulan setelah kenaikan sebesar 25bps sebagai jawaban atas kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014. Tingkat fasilitas simpanan (FASBI) juga diturunkan sebesar 25bps, untuk mendukung likuiditas bank dengan menurunkan biaya kesempatan (*opportunity cost*) bank-bank untuk pemberian pinjaman keseluruhan, sementara fasilitas pinjaman BI tetap dipertahankan pada tingkat 8 persen. Untuk mendukung keputusan ini, BI menyatakan keyakinannya bahwa inflasi akan terus berkurang menuju targetnya untuk tahun 2015 sebesar 3-5 persen. Bank sentral juga menyatakan bahwa depresiasi rupiah nominal yang belakangan terjadi dapat bermanfaat bagi penyesuaian berkelanjutan pada neraca eksternal Indonesia karena lemahnya harga-harga komoditas.<sup>3</sup> Cadangan devisa meningkat sebesar 3,7 miliar dolar AS dari bulan Desember 2014 menjadi 115,3 miliar dolar AS pada bulan Februari 2015.

<sup>3</sup> Rilis pers BI No. 17/12/DKom.

**Pertumbuhan kredit terus melambat namun kenaikan simpanan tampaknya telah stabil...**

Pertumbuhan kredit terus melambat, kira-kira setengah dari nilai tertingginya pada tahun 2013, menjadi 11,4 persen yoy pada bulan Desember 2014. Pertumbuhan simpanan secara keseluruhan bertahan relatif datar, pada 12,1 persen pada bulan Desember, yang terutama didukung oleh penguatan deposito berjangka. Karenanya rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio*, LDR) turun menjadi 89,4 persen pada bulan November (turun dari 92,2 persen pada bulan Juli 2014). Kualitas pinjaman bank secara agregat juga masih tetap kuat, dan bahkan sedikit meningkat seperti ditunjukkan oleh penyusutan tingkat kredit macet ke 2,2 persen dari pinjaman pada bulan Desember, turun dari 2,4 persen pada bulan November.

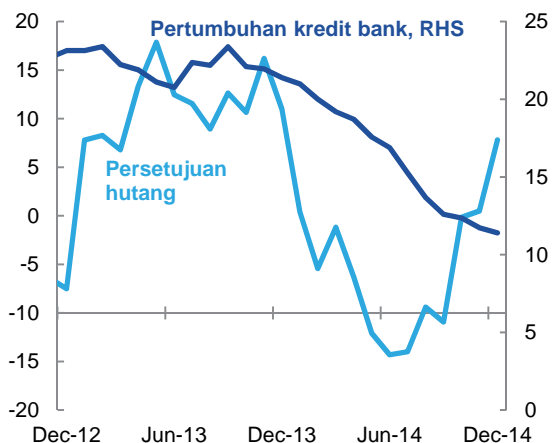
**...dan kenaikan persetujuan kredit dapat menunjukkan stabilisasi pertumbuhan kredit**

Walau pertumbuhan kredit masih lemah, persetujuan pinjaman, yang cenderung akan mendorong pertumbuhan kredit, mulai meningkat sejak bulan Juli 2014, dari kontraksi sebesar 14 persen pada waktu itu menurut rata-rata bergerak 3-bulan dibandingkan dengan tingkat satu tahun yang lalu, ke 7,8 persen yoy pada bulan Desember 2014 (Gambar 16). Namun masih terlalu awal untuk menyatakan bahwa siklus kredit telah berputar, dengan kondisi penawaran yang lebih mendukung namun prospek pertumbuhan permintaan kredit tetap tidak pasti dengan masih ketatnya posisi kebijakan moneter dan lemahnya laju pertumbuhan investasi tetap.

**Penerbitan obligasi dalam negeri dan kenaikan kredit bank yang berurutan mengimbangi rendahnya pinjaman bersih luar negeri perusahaan pada kuartal empat...**

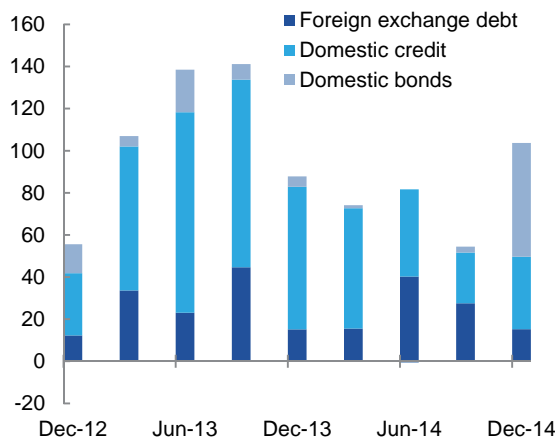
Pembiayaan hutang keseluruhan terhadap sektor korporasi non-bank meningkat pada kuartal keempat tahun 2014, berkat kenaikan yang tajam dalam penerbitan obligasi korporat bersih dalam negeri, menjadi Rp 54 triliun (Gambar 17). Namun pembiayaan luar negeri kepada sektor korporat turun dari lebih dari Rp 40 triliun pada kuartal kedua 2014 menjadi Rp 15,2 triliun pada kuartal keempat, mengkonsolidasikan tren perlemahan yang belakangan terjadi. Kredit bank dalam negeri kepada sektor korporasi meningkat menjadi Rp 34,4 triliun pada kuartal empat, dari Rp 24,1 triliun pada kuartal yang lalu, yang cukup untuk mengimbangi penurunan dalam pembiayaan bersih luar negeri, namun seperti terlihat dari angka-angka pertumbuhan kredit bank secara keseluruhan yang dibahas di bawah, masih relatif rendah dibanding laju yang dicatatkan pada tahun-tahun terakhir.

**Gambar 16: Pertumbuhan kredit bank terus melambat, namun persetujuan hutang naik sejak medio 2014**  
(rata-rata bergerak 3-bulan persetujuan hutang baru, pertumbuhan kredit; persen yoy)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 17: Kredit dalam negeri bagi perusahaan non-finansial meningkat pada kuartal akhir 2014**  
(peningkatan bersih kuartalan, triliun Rp)



Catatan: Hutang dalam mata uang asing termasuk kontrak pinjaman, sekuritas hutang dan kredit perdagangan; data obligasi dalam negeri hanya hingga bulan November 2014.  
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

**...dan pertumbuhan hutang luar negeri telah mencapai puncaknya**

Apresiasi dolar AS memberikan tekanan naik pada biaya jasa hutang dalam rupiah bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang memiliki hutang dalam dolar AS. Hutang luar negeri swasta berjumlah besar, mencapai 162,9 miliar dolar AS untuk sektor swasta secara keseluruhan, dan 121,2 miliar dolar AS untuk perusahaan non-finansial pada bulan Desember 2014, walau perbandingan terhadap hutang eksternal PDB tetap moderat pada 32,9 persen seperti diukur oleh BI. Pertumbuhan pinjaman luar negeri swasta turun dari 11,9 persen yoy pada bulan September 2014 menjadi 9,9 persen pada bulan Desember. Disamping tren perlemahan kurs tukar dapat membatasi pinjaman luar negeri baru, BI mendorong lindung nilai (*hedging*) mata uang yang lebih besar dan menekan tingginya hutang luar negeri melalui penetapan rasio lindung nilai, rasio likuiditas dan persyaratan peringkat kredit.

## 6. Realokasi belanja yang besar dan target penerimaan yang ambisius pada APBN-P 2015

**APBN-P tahun 2015 disetujui pada pertengahan Februari, dan mencerminkan agenda reformasi yang ambisius**

Pemerintahan Indonesia yang baru mengajukan anggaran-nya yang pertama pada bulan Januari lalu, sebagai APBN-P 2015 dari anggaran yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya pada bulan September 2014. Versi APBN-P tersebut telah disetujui DPR pada pertengahan Februari. Sebagai cerminan dari agenda reformasi pemerintahan yang baru, anggaran itu menyertakan realokasi belanja yang besar dari subsidi BBM ke program-program prioritas pembangunan utama, khususnya program infrastruktur, pertanian, dan sosial. Realokasi ke belanja yang produktif ini merupakan perkembangan positif yang cukup signifikan. Namun, pelaksanaan anggaran yang efektif akan membutuhkan penanganan berkelanjutan terhadap tantangan-tantangan dalam belanja modal, dan kenaikan penerimaan yang sangat besar telah dianggarkan yang dibutuhkan untuk mendanai kenaikan belanja yang ditetapkan. Karenanya, implementasi sepenuhnya anggaran baru tersebut tampaknya akan membutuhkan waktu, dan selama tahun 2015 Pemerintah akan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan belanja terhadap realisasi penerimaan

yang lebih rendah dari yang dianggarkan, dan pada saat yang sama tetap harus menjaga peningkatan efisiensi dari realokasi APBN-P tersebut.

**Realisasi defisit fiskal tahun 2014 hanya 2,2 persen dari PDB, walau rendahnya kinerja penerimaan...**

APBN-P 2015 mewarisi tantangan fiskal yang signifikan. Defisit fiskal sementara tahun 2014 berjumlah Rp 227,4 triliun (2,2 persen dari PDB<sup>4</sup>), sedikit lebih kecil dari tingkat yang dianggarkan pada 2014 APBN-P sebesar 2,4 persen dari PDB. Penerimaan negara pada tahun 2014 jauh lebih rendah dari targetnya, yaitu 6 persen lebih rendah (dibahas lebih lanjut di bawah). Namun hal ini diimbangi dengan upaya-upaya penyesuaian belanja utama, termasuk pemotongan anggaran kementerian-kementerian, kenaikan harga BBM bersubsidi yang tajam pada bulan November, dan penurunan belanja modal.

**...dan anggaran defisit fiskal turun ke 1,9 persen untuk tahun 2015...**

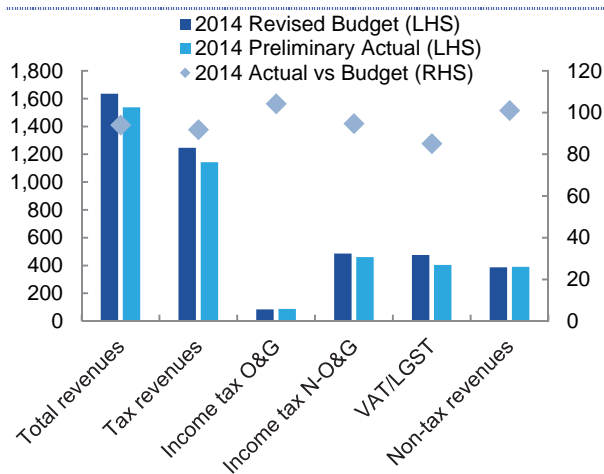
APBN-P 2015 menargetkan defisit fiskal yang lebih kecil dibanding tahun 2014, sebesar 1,9 persen dari PDB (Tabel 4). Asumsi-asumsi ekonomi makro yang mendasari juga direvisi dari APBN 2015, agar lebih selaras dengan perkembangan-perkembangan terbaru, termasuk pertumbuhan riil PDB yang sedikit lebih rendah (5,7 persen dari sebelumnya 5,8 persen) dan inflasi yang lebih tinggi (5,0 persen dari 4,4 persen). Kurs tukar rupiah-dolar AS diasumsikan rata-rata Rp 12.500, naik dari Rp 11.900 dalam APBN. Mengikuti turunnya harga minyak internasional yang belakangan terjadi, asumsi harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2015 kini ditetapkan pada 60 dolar AS per barel, turun secara signifikan dari 105 dolar AS per barel dari APBN. Asumsi produksi migas juga diturunkan menjadi 825.000 barel per hari dan 1.221 juta barel ekuivalen minyak per hari, mengikuti lemahnya realisasi dibanding sasaran pada tahun 2014 (Tabel 4).

**...berdasarkan target penerimaan yang sangat ambisius...**

Sasaran penerimaan menurut APBN-P 2015 meningkat sebesar 14,6 persen dibanding hasil realisasi tahun 2014. Kenaikan yang signifikan ini ditetapkan walau dengan proyeksi harga minyak internasional yang lebih rendah pada tahun 2015 dibanding tahun 2014, yang dipengaruhi oleh penerimaan yang terkait dengan migas yang dianggarkan akan turun sebesar 43,4 persen untuk pajak penghasilan dan 62,5 persen untuk penerimaan bukan pajak. Yang menjadi pendorong kenaikan kuat dalam total penerimaan walau dengan penurunan tajam penerimaan terkait migas (menyumbang sekitar seperlima dari penerimaan pada tahun 2014 – lihat Bagian C untuk pembahasan lebih lanjut tentang gambaran jangka menengah untuk penerimaan migas) adalah kenaikan yang signifikan dalam penerimaan pajak lain-lain, terutama pajak pertambahan nilai (PPN). PPN ditargetkan untuk meningkat sebesar 42,5 persen dibanding realisasi tahun 2014, dan pajak penghasilan dari sektor-sektor terkait non-migas ditargetkan akan meningkat sebesar 36,9 persen dari hasil yang dicapai pada tahun 2014.

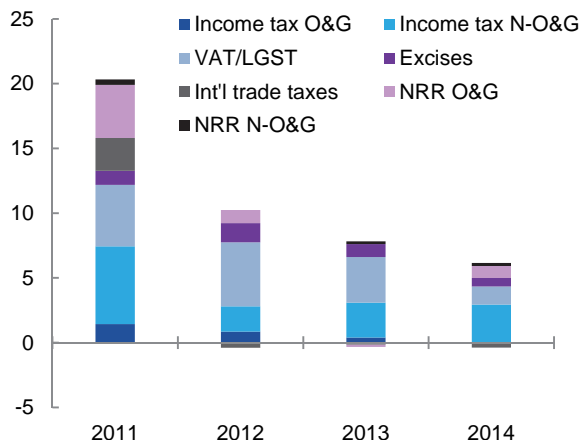
<sup>4</sup> PDB yang direvisi dan menggunakan tahun dasar baru 2010.

**Gambar 18: Realisasi penerimaan tahun 2014 hanya mencapai 94 persen dari target APBN-P 2014...**  
(Rp triliun (kiri); persen (kanan))



Catatan: O&G adalah migas, N-O&G adalah non-migas; LGST adalah PPNBM.  
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 19: ...karena pertumbuhan penerimaan nominal terus turun di 2014, terutama akibat lemahnya pertumbuhan PPN**  
(kontribusi ke pertumbuhan penerimaan nominal keseluruhan tahun-ke-tahun, persen)



Catatan: O&G adalah migas, N-O&G adalah non-migas; LGST adalah PPNBM; NRR adalah "penerimaan sumber daya alam".  
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

**...terutama ditengah lemahnya kinerja penerimaan di 2014, akibat kondisi ekonomi makro dan perubahan kebijakan...**

Realisasi penerimaan pada 2014 hanya mencapai 94 persen dari sasaran APBN-P sebesar Rp 1.635,4 triliun (Gambar 18), dengan berlanjutnya tren penurunan pertumbuhan penerimaan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan penerimaan nominal dalam negeri mencapai 6,8 persen pada tahun 2014, turun dari 7,5 persen pada tahun 2013 (Gambar 19). Penurunan pertumbuhan penerimaan secara keseluruhan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk perlambatan pertumbuhan PDB nominal, penurunan harga komoditas, dan menurunnya produksi minyak (lihat Triwulanan edisi bulan Desember 2014). Selain itu, sejumlah langkah-langkah kebijakan yang baru turut berkontribusi kepada penurunan pertumbuhan penerimaan. Sebagai contoh, penerapan larangan ekspor mineral<sup>5</sup> pada bulan Januari berdampak negatif terhadap penerimaan pajak badan dan pajak ekspor. Ekspor konsentrat tembaga berjalan kembali pada paruh kedua tahun 2014, namun penerimaan komoditas non-migas secara keseluruhan masih berada di bawah tekanan, dengan royalti meleset 11,5 persen kurang dari sasaran APBN-P 2014.

**...termasuk sejumlah perubahan kebijakan pajak yang tampaknya berdampak negatif pada penerimaan**

Penurunan pertumbuhan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi kontributor utama untuk perlemahan kinerja penerimaan pada tahun 2014. Pertumbuhan penerimaan PPN hanya mencapai 5,8 persen pada tahun 2014, dibanding rata-rata sebesar 18,8 persen untuk periode tahun 2009-2013 dan hanya mencapai 85,1 persen dari sasaran APBN-P 2014. Penerapan pajak final sebesar 1 persen dari penjualan bruto tahunan untuk perusahaan dengan penjualan bruto di bawah Rp 4,8 miliar pada bulan Juli 2013,<sup>6</sup> dan peningkatan batas pendaftaran PPN yang mengikutinya menjadi Rp 4,8 miliar,<sup>7</sup> dapat membawa pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak badan dan PPN. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), sekitar 20 persen dari penerimaan PPN pada tahun 2013 dibayarkan oleh wajib pajak dengan penjualan di bawah Rp 4,8 miliar, yang terdiri dari penerimaan PPN yang terdahulu karena

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2014.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2013.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 197 Tahun 2013.



perubahan kebijakan pada tahun 2014. Realisasi pajak pendapatan non-migas berada 5,3 persen di bawah target.

**Sasaran penerimaan yang ambisius diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan pungutan, sementara langkah-langkah kebijakan yang spesifik masih belum diumumkan**

Realisasi sasaran penerimaan sebesar Rp 1.762 triliun untuk tahun 2015 pada APBN-P disebutkan akan bergantung pada “upaya tambahan” dalam pungutan pajak, dan sebagian juga pada perubahan kebijakan pada masa depan (belum diperinci). Catatan Keuangan untuk APBN-P menyatakan bahwa peningkatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan pajak termasuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pungutan, bergantung kepada peningkatan kelembagaan dan organisasi, termasuk kapasitas di bidang sumber daya manusia dan teknologi informasi (TI), serta pertukaran informasi yang lebih baik antar badan-badan dan lembaga-lembaga. Pada sisi kebijakan pajak, telah dibuat sejumlah pengumuman tentang langkah-langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan oleh Pemerintah, namun belum ada keputusan akhir yang diambil. Pengumuman mencakup larangan perjalanan dan hukuman penjara untuk debitur pajak berukuran besar,<sup>8</sup> kemungkinan pengampunan pajak, kenaikan tingkat royalti pertambangan, dan pajak-pajak baru untuk pemegang kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*, PSC) yang baru.

**APBN-P 2015 mendapat manfaat dari reformasi besar subsidi BBM pada bulan Januari 2015...**

Pada sisi pengeluaran, APBN-P menunjukkan peningkatan yang besar dalam efisiensi alokatif. Bagian subsidi BBM dianggarkan turun secara tajam menjadi Rp 65 triliun (0,6 persen dari PDB) dari Rp 276 triliun (2,5 persen dari PDB) dalam APBN, setelah reformasi besar subsidi BBM. Memanfaatkan momentum turunnya harga minyak internasional, Pemerintah meluncurkan penetapan harga baru yang berani, berlaku per tanggal 1 Januari 2015, dengan harga solar dan bensin oktan rendah akan menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan dalam harga-harga patokan (Kotak 3).

**... melakukan realokasi belanja ke belanja modal yang sangat dibutuhkan...**

Belanja modal meningkat secara signifikan ke Rp 276 triliun atau lebih dari dua kali lipat dari realisasi awal tahun 2014 (Gambar 20). Sejumlah kementerian utama, terutama yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, menerima kenaikan anggaran yang signifikan dibanding tahun 2014, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (40 persen), Kementerian Perhubungan (45 persen), Kementerian Pertanian (106 persen), Kementerian Sosial (177 persen), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (50 persen) (Gambar 21). Selain itu, APBN-P juga menyertakan suntikan modal bagi beberapa BUMN sebesar Rp 70,4 triliun, yang bertujuan untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur.<sup>9</sup>

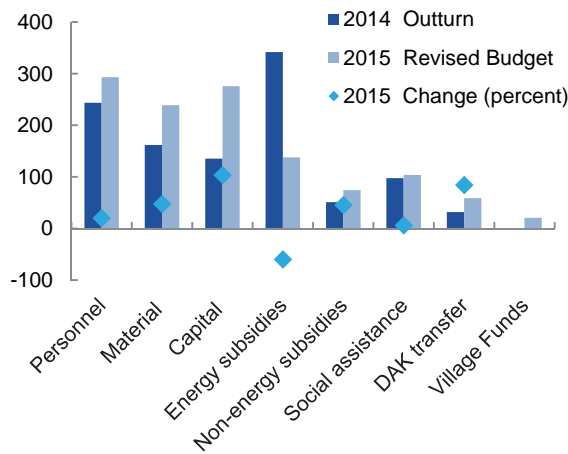
**...dan termasuk kenaikan alokasi bagi pemerintah daerah, termasuk untuk infrastruktur**

Alokasi transfer ke Pemerintah Daerah juga meningkat tajam, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten dan kawasan perdesaan. Alokasi Dana Desa, yang baru diluncurkan pada tahun 2015 sesuai mandat dari UU Desa tahun 2014, meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp 9,1 triliun dalam APBN menjadi Rp 20,8 triliun. Dana Alokasi Khusus untuk daerah (DAK) mencatat kenaikan tajam sebesar 64 persen dari APBN menjadi Rp 59 triliun.

<sup>8</sup> Pada tahun 2003, kebijakan serupa digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun karena faktor-faktor seperti penegakan yang tidak konsisten dan kekurangan auditor pajak, langkah itu secara umum dianggap sebagai tidak efektif. Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/27/editorial-jailing-tax-debtors.html>.

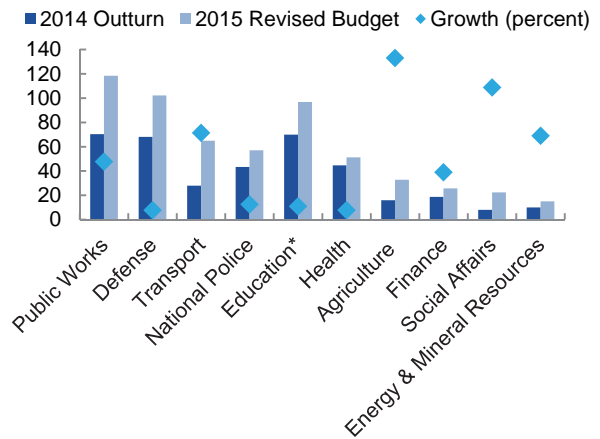
<sup>9</sup> Hal ini dilaporkan dalam APBN sebagai komponen pembiayaan dan bukan pengeluaran.

**Gambar 20: APBN-P 2015 memotong subsidi energi dan meningkatkan belanja infrastruktur...**  
(Rp triliun; persen)



Sumber: Kemenkeu; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 21: ...dan meningkatkan anggaran untuk kementerian-kementerian utama yang secara signifikan terlibat dalam infrastruktur**  
(Rp triliun; persen)



Catatan: \*Pendidikan termasuk alokasi ke Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Urusan Sosial pada tahun 2015 termasuk reklasifikasi sejumlah program sosial yang sebelumnya berada di bawah Kemenkeu.

Sumber: Kemenkeu; perhitungan staf Bank Dunia

**Merealisasikan manfaat dari alokasi anggaran akan bergantung pada penanggulangan tantangan pelaksanaan...**

Re-alokasi yang signifikan dari belanja subsidi BBM ke prioritas-prioritas pembangunan, terutama infrastruktur, merupakan perubahan kebijakan besar yang positif. Namun, sejauh mana tujuan kebijakan itu akan tercapai akan bergantung pada penanggulangan dua tantangan. Yang pertama adalah mengatasi masalah implementasi yang telah lama ada, terutama pembebasan tanah untuk proyek-proyek infrastruktur yang baru. Realisasi belanja APBN 2014 menunjukkan masih ada tantangan tersebut; pada tahun 2014, total pencairan belanja mencapai 94 persen dari APBN-P, atau 96 persen dari APBN, dengan kinerja yang bervariasi lintas jenis belanja. Komponen belanja pokok kementerian-kementerian (seperti untuk pegawai, barang, dan modal) masing mencapai 18 persen dan 12 persen lebih rendah dari APBN dan APBN-P tahun 2014, sementara realisasi belanja bukan kementerian, seperti pembayaran bunga dan subsidi, hanya berbeda tipis dari APBN-P. Belanja modal terealisasi cukup jauh di bawah anggarannya, dengan pencairan hanya 73 persen dari APBN atau 84 persen dari APBN-P, dimana secara nominal belanja terkontraksi tajam dibanding dengan tahun 2013 sebesar 26 persen.

**...dan meningkatkan kinerja penerimaan secara signifikan**

Tantangan kedua untuk mencapai tujuan belanja pembangunan yang ambisius adalah lebih tingginya penerimaan. Penghematan biaya subsidi BBM dalam jumlah yang cukup besar berkat langkah reformasi bulan Januari 2015, sekitar 1,8 persen dari PDB pada tahun 2015, tergerus oleh dampak negatif penurunan harga minyak dunia terhadap penerimaan migas, yang diproyeksikan oleh Pemerintah akan mengalami kontraksi sebesar 1,9 poin persentase dari PDB pada tahun 2015 dibandingkan dengan 2014. Karenanya, pembiayaan rencana peningkatan PDB sebesar 1,0 poin persentase dalam belanja modal Pemerintah Pusat pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, akan bergantung kepada pencapaian sasaran kenaikan penerimaan pajak tahun 2015 sebesar 1,4 poin persentase dari PDB, peningkatan defisit anggaran, atau kombinasi dari keduanya. Dengan berakhirnya kuartal pertama, ruang bagi peningkatan penerimaan tambahan pada tahun 2015

melalui perubahan kebijakan dan administrasi menurun dan tampaknya akan terjadi kekurangan penerimaan yang signifikan.

### Kotak 3: Reformasi harga BBM telah menurunkan biaya subsidi, namun realisasi manfaat sepenuhnya akan membutuhkan implementasi yang transparan dan konsisten

Melalui perubahan kebijakan yang besar, Pemerintah yang baru mengumumkan reformasi subsidi BBM lebih lanjut pada tanggal 31 Desember 2014, mengikuti kenaikan harga bensin dan solar satu kali sebesar rata-rata 34 persen pada bulan November 2014. Pengaturan subsidi BBM yang baru ini, mulai berlaku pada 1 Januari 2015, dipandu oleh Perpres No. 191 Tahun 2014 dan diatur oleh peraturan pelaksanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Permen ESDM No. 39 Tahun 2014. Kebijakan baru itu menyertakan hal-hal utama berikut: i) penerapan metode penentuan harga yang baru, dengan penyesuaian harga semi-otomatis, yang memungkinkan harga bensin dan solar untuk mengikuti pergerakan harga minyak internasional dan kurs tukar, ii) penghapusan subsidi bensin premium (RON 88, "Premium") (walau harga yang diatur masih menyertakan tambahan biaya transportasi untuk pengiriman BBM di luar pulau Jawa, Madura, dan Bali), dan iii) penerapan subsidi tetap per liter sebesar maksimum Rp 1.000 untuk solar. Harga baru bensin dan solar akan diumumkan setiap bulan, atau setiap dua minggu bila dirasa perlu, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan rata-rata bulanan dari harga minyak yang menjadi patokan internasional (seperti *Mean of Platts* Singapura) dan kurs tukar dolar AS/Rp.

Pengaturan harga BBM yang baru diperkirakan akan membawa sejumlah dampak positif terhadap pengelolaan fiskal dan ekonomi:

- Menurunkan ketidakpastian anggaran: skema harga BBM mengambang akan menurunkan kebergantungan fiskal terhadap harga minyak internasional dan depresiasi rupiah. Pengaruhnya akan terbatas pada potensi perubahan dalam volume subsidi solar yang dibutuhkan akibat adanya perubahan yang didorong oleh harga dalam permintaan (diperkirakan akan meningkat bila harga naik, dan sebaliknya) – Namun hal ini hanya akan menimbulkan ketidakpastian yang tidak terlalu signifikan karena subsidi telah dibatasi tidak lebih dari Rp 1.000 per liter – serta perubahan harga ekonomi minyak tanah dan LPG.
- Menurunkan belanja subsidi BBM dan menjaga keberlanjutan fiskal: pengaturan subsidi yang baru menurunkan biaya subsidi BBM secara signifikan. Biaya subsidi BBM diproyeksikan akan turun dengan tajam dari 2,4 persen dari PDB pada tahun 2014 menjadi 0,6 persen dari PDB pada tahun 2015. Hal ini memberikan dukungan yang kuat terhadap keberlanjutan posisi fiskal Indonesia dan posisi sektor fiskal dalam mendukung ekonomi yang lebih merata.
- Memperluas ruang fiskal untuk mengarahkan kembali belanja ke belanja yang produktif: proyeksi penghematan fiskal sangat penting untuk membuka ruang fiskal yang dibutuhkan dalam meningkatkan belanja bagi prioritas-prioritas pembangunan, seperti bidang infrastruktur dan kesehatan, walau pada jangka pendek tekanan penurunan penerimaan yang terkait dengan minyak akibat turunnya harga minyak dunia akan membatasi kenaikan bersih dalam ruang fiskal.
- Menurunkan tekanan inflasi: tidak akan ada lagi penyesuaian besar-besaran sekali saja terhadap harga BBM seperti pada tahun 2005, 2008, 2013, dan 2014. Lonjakan harga tersebut tampaknya telah mempengaruhi persepsi risiko inflasi, karena ketidakpastian waktu pelaksanaan dan ancaman bahwa lonjakan harga sisi penawaran yang sangat besar dapat memicu inflasi jangka panjang yang lebih tinggi. Penghapusan sumber risiko inflasi yang besar ini akan berkontribusi kepada stabilitas proyeksi inflasi (sebelumnya harga-harga ditekan melalui peraturan untuk periode yang panjang melalui penetapan harga BBM di bawah harga pasar. Risikonya adalah ketidakpastian akan kapan penekanan ini akan berakhir. Kini risiko tersebut sudah ditiadakan).

Walaupun reformasi yang diumumkan merupakan perkembangan positif yang besar, namun beberapa pengumuman lanjutan telah mengakibatkan munculnya ketidakpastian tentang pelaksanaan reformasi sistem tersebut. Pemilihan waktu tanggal 19 Januari diluar perkiraan, rumus penetapan harga tampaknya diterapkan secara tidak merata untuk bulan Maret, dengan hanya harga premium (namun bukan solar) yang diubah pada tanggal 1 Maret (kemungkinan karena pergeseran tingkat subsidi solar per liter, walau hal ini belum jelas), dan ketidakpastian tentang kemungkinan perubahan lebih lanjut untuk meredakan gejala (Pemerintah tampaknya mempertimbangkan penggunaan mekanisme pembatasan untuk mengelola gejala harga minyak pada masa depan, namun informasi yang lebih terperinci belum tersedia).<sup>1</sup> Komponen-komponen spesifik tentang rumus harga BBM juga belum diumumkan.

Berbagai langkah masih perlu ditempuh guna memastikan penerapan reformasi secara transparan dan konsisten, dan dengan demikian menjaga kredibilitas dan sebagian besar manfaatnya. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan guna mewujudkan hal tersebut mencakup keharusan bahwa pelaksanaan bersifat:

- **Transparan:** untuk dapat menarik manfaat dari penurunan ketidakpastian inflasi dari penghapusan penyesuaian yang lebih besar, dan untuk mencegah sistem yang baru agar tidak meningkatkan ketidakpastian inflasi, maka dasar dari perubahan harga haruslah jelas (misalnya menggunakan rumus yang diumumkan dan tolok ukur yang dapat diamati) dan waktu penetapan perubahan harga tersebut pun harus diketahui umum (mis. sekali sebulan pada suatu tanggal tertentu, menurut jadwal yang diumumkan sebelumnya). Penerbitan rumus dan informasi yang terkait secara berkala dapat menurunkan risiko ketidakpastian dan menjamin dukungan masyarakat pada waktu kenaikan harga.
- **Konsisten:** agar reformasi tersebut dapat menghapus risiko-risiko fiskal yang berkenaan dengan kerentanan anggaran pada masa lalu terhadap biaya BBM dalam rupiah, reformasi ini harus diterapkan secara konsisten. Bila tidak, Pemerintah dapat kembali mengakumulasi biaya subsidi yang lebih besar, dan akan timbul ketidakpastian apakah sektor fiskal dapat tetap aman dari kenaikan harga minyak dunia atau depresiasi mata uang pada kemudian hari.

Catatan: <sup>1</sup> <http://en.republika.co.id/berita/en/national-politics/15/01/12/ni275f-govt-to-set-maximum-subsidized-gasoline-price-at-rp9500liter>.

### Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,5 persen dari PDB pada tahun 2015...

Berdasarkan proyeksi-proyeksi ekonomi makro untuk tahun 2015 dan postur anggaran (yang menargetkan kenaikan yang kuat dalam belanja modal dan belanja terkait), Bank Dunia memproyeksikan defisit anggaran sebesar 2,5 persen dari PDB untuk tahun 2015, lebih tinggi dari nilai yang dianggarkan (Tabel 4). Tingkat proyeksi defisit ini didasarkan pada perkiraan bahwa ketentuan yang membatasi defisit fiskal Pemerintah Pusat sebesar 2,5 persen dari PDB akan berlaku selama tahun 2015, dan defisit akan dibatasi pada tingkat itu dengan secara signifikan membatasi pengeluaran melalui pemotongan anggaran atau penurunan pelaksanaan anggaran pada sejumlah bidang, termasuk belanja modal.

### ...didorong oleh proyeksi kekurangan penerimaan yang signifikan

Pada sisi penerimaan, Bank Dunia memproyeksikan kekurangan yang signifikan sebesar Rp 282 triliun (2,4 persen dari PDB). Kekurangan ini didorong oleh perbedaan dalam asumsi-asumsi ekonomi makro, terutama pertumbuhan PDB dan harga minyak yang lebih rendah. Selain itu, karena belum ada perincian tentang langkah-langkah peningkatan penerimaan utama yang masih mungkin diambil oleh Pemerintah selama tahun 2015, proyeksi ini tidak menyertakan kemungkinan adanya kenaikan manfaat akibat perubahan administrasi dan kebijakan pajak. Karenanya Bank Dunia memproyeksikan bahwa jumlah penerimaan akan berkurang sekitar 3,7 persen dibanding jumlahnya pada tahun 2014. Penurunan ini terutama didorong oleh proyeksi penurunan penerimaan yang terkait migas sebesar 57 persen, yang mencerminkan penyusutan produksi dan (terutama) asumsi penurunan dalam harga minyak mentah Indonesia menjadi rata-rata 55 dolar AS per barel pada tahun 2015 dibanding 96,5 dolar AS per barel pada tahun 2014. Penerimaan-penerimaan lain diproyeksikan akan meningkat secara nominal, namun dengan laju yang jauh lebih rendah dari targetnya pada APBN-P 2015. PPN dan pajak penghasilan dari non-migas diproyeksikan akan meningkat masing-masing sebesar 11,2 dan 10,4 persen *yoy*, yang umumnya sejalan dengan tren beberapa tahun terakhir.

### Masih terdapat ruang bagi belanja modal untuk naik dibandingkan 2014, namun akan jauh lebih rendah dari tingkat yang dianggarkan

Pada keadaan dasar (*base case*) pengeluaran diproyeksikan akan mendarat secara nominal pada tahun 2015 dibanding 2014, namun dengan komposisi yang sangat berbeda. Seperti menurut APBN-P, belanja subsidi BBM yang kurang bermanfaat diproyeksikan akan turun dari Rp 240 triliun menjadi Rp 67 triliun, dan transfer ke daerah diproyeksikan akan meningkat dari Rp 574 triliun ke Rp 664 triliun. Dengan asumsi bahwa belanja modal akan diprioritaskan sehingga belanja pegawai dan barang akan dibatasi pada 3,8 persen dari PDB (seperti pada tahun 2014), ketimbang meningkat ke 4,6 persen dari PDB seperti tercantum pada APBN-P, masih akan terdapat ruang untuk meningkatkan belanja modal – dari Rp 135 triliun pada 2014 hingga mencapai Rp 200 triliun pada tahun 2015. Hal ini akan mendorong

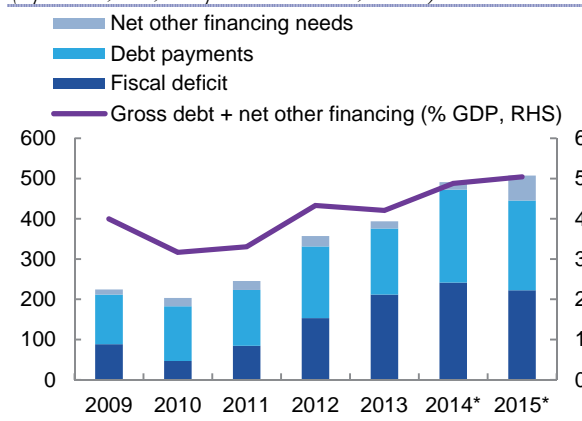
peningkatan belanja modal Pemerintah secara signifikan, yaitu 47,8 persen, dibanding tahun 2014 (1,7 persen dari PDB dibanding 1,3 persen pada 2014), namun masih akan jauh di bawah kenaikan nominal tahunan sebesar 103,8 persen dalam belanja modal nominal sesuai anggaran tahun 2015 (yaitu 2,4 persen dari PDB, tingkat yang hanya pernah dicapai pada awal tahun 2000an). Namun hal ini akan bergantung pada keputusan dan kemampuan Pemerintah untuk mengelola belanja pegawai dan barang pada tingkat yang jauh lebih rendah dari yang dianggarkan.

**Kebutuhan pembiayaan bruto pada tahun 2015 melampaui kebutuhan pada tahun 2014**

Kebutuhan pembiayaan bruto pada tahun 2015 melebihi kebutuhan pada tahun 2014, walau dengan anggaran defisit fiskal yang lebih kecil, karena tingkat pembayaran utang yang setara seperti pada tahun 2014, dan suntikan modal BUMN sebesar Rp 70,4 triliun (Gambar 22). APBN-P 2015 menargetkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 451,8 triliun, dibanding Rp 428,1 triliun pada tahun 2014. Hingga 3 Maret, telah diterbitkan SUN senilai Rp 156,6 triliun, atau 34,7 persen dari target tersebut, yang dibantu dengan penerbitan obligasi global senilai 4 miliar dolar AS pada bulan Januari. Seperti pada beberapa tahun terakhir, strategi pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko hendak memenuhi sebagian besar kebutuhan pembiayaan melalui utang dalam mata uang rupiah, dengan penerbitan utang dalam mata uang asing dibatasi tidak melebihi 23 persen dari jumlah bruto penerbitan sekuritas.

**Gambar 22: Kebutuhan pembiayaan bruto lebih tinggi pada 2015 walau dengan anggaran defisit fiskal yang lebih rendah**

(Rp triliun, kiri, dan persen dari PDB, kanan)



Catatan: \* sesuai APBN-P (2015: sementara).  
Kebutuhan “pembiayaan lain”: bersih, dan termasuk kapitalisasi BUMN.  
Sumber: Kemenkeu

Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,5 persen dari PDB untuk tahun 2015  
(triliun Rp, kecuali dinyatakan lain)

	2014	2014	2015	2015	2015
	APBN-P	Realisasi sementara	APBN	APBN-P	Bank Dunia
<b>A. Penerimaan</b>	<b>1.635</b>	<b>1.537</b>	<b>1.794</b>	<b>1.762</b>	<b>1.480</b>
<b>1. Penerimaan pajak</b>	<b>1.246</b>	<b>1.143</b>	<b>1.380</b>	<b>1.489</b>	<b>1.199</b>
Pajak pendapatan	570	547	644	679	544
Migas	84	87	89	50	36
Non-migas	486	460	556	630	508
PPN/PPNBM	476	405	525	577	450
<b>2. Penerimaan bukan pajak</b>	<b>387</b>	<b>391</b>	<b>410</b>	<b>269</b>	<b>277</b>
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>1.877</b>	<b>1.764</b>	<b>2.040</b>	<b>1.984</b>	<b>1.774</b>
I. Pemerintah Pusat	1.280	1.191	1.392	1.320	1.110
Pegawai	258	243	293	293	262
Barang	195	176	223	239	175
Modal	161	135	175	276	200
Pembayaran bunga	135	133	152	156	156
Subsidi	403	393	415	212	198
Subsidi energi	350	342	345	138	146
BBM	246	240	276	65	67
Listrik	104	102	69	73	79
Subsidi non-energi	53	51	70	74	52
Hibah	3	1	4	5	5
Sosial	97	98	86	104	105
Pengeluaran lain-lain	28	12	46	36	9
II. Transfer ke daerah	597	574	647	665	664
<b>C. Neraca primer</b>	<b>-106</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-67</b>	<b>-138</b>
<b>D. Defisit/surplus</b>	<b>-241</b>	<b>-227</b>	<b>-246</b>	<b>-223</b>	<b>-294</b>
<i>sebagai persen dari PDB</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,2</i>	<i>-2,1</i>	<i>-1,9</i>	<i>-2,5</i>
<i>Asumsi ekonomi utama</i>					
Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,5	5,1	5,8	5,7	5,2
IHK (yoy, persen)	5,3	8,4	4,0	5,0	6,8
Kurs tukar (Rp/AS\$)	11.600	11.878	11.900	12.500	12.600
Harga minyak (AS\$/barel)	105	97	105	60	55
Produksi minyak (ribu barel/hari)	818	794	900	825	826

Catatan: \*menurut perubahan dasar PDB tahun 2010.

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

## 7. Membuat kemajuan yang kredibel menuju target fiskal dan pembangunan yang ambisius adalah tantangan utama tahun 2015

**Tantangan penerimaan yang demikian besar dapat mendorong terciptanya fokus yang berlebihan pada langkah-langkah jangka pendek bersifat *ad-hoc* pada sisi penerimaan...**

Pengelolaan fiskal untuk menangani peningkatan penerimaan yang tampaknya akan lebih lambat dari yang dianggarkan, serta keterjangkauan dan tantangan pelaksanaan anggaran modal, dan pada saat yang sama menjaga peningkatan efisiensi alokatif dalam APBN-P 2015, akan menjadi tantangan kebijakan utama tahun 2015. Dengan sulit dicapainya sasaran penerimaan pajak untuk tahun 2015, terdapat risiko terjadi fokus yang berlebihan kepada langkah-langkah jangka pendek bersifat *ad-hoc* untuk memenuhi sasaran penerimaan tersebut, yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja penerimaan jangka panjang. Sebagai contoh, pengalaman internasional menunjukkan bahwa pemutihan pajak secara umum tidak membawa dampak yang signifikan terhadap hasil penerimaan, terutama pada jangka panjang, dan dapat membawa pengaruh negatif terhadap pandangan dan kepatuhan pajak pada masa depan.<sup>10</sup> Indonesia meluncurkan pemutihan pajak pada tahun 2008, yang disebut kebijakan “*sunset*”. Menurut Ditjen Pajak, kebijakan itu menambah jumlah pendaftaran wajib pajak sebanyak 5,4 juta, dan tambahan penerimaan sekitar Rp 7,5 triliun. Tambahan penerimaan ini tidaklah besar dibandingkan dengan PDB (sekitar 0,2 persen), dengan tidak terlihatnya pengaruh material kepada rasio pajak-terhadap-PDB dalam jangka yang lebih panjang.<sup>11</sup>

**...dan pada risiko-risiko kualitas belanja jangka menengah...**

Dengan penerimaan yang di bawah anggaran berarti peningkatan anggaran modal Pemerintah Pusat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut tampaknya harus dikurangi. Pemerintah perlu memiliki fokus yang kuat dan berkelanjutan dalam menerapkan suatu pendekatan strategis untuk menumbuhkan dan meningkatkan kualitas portofolio proyek-proyek investasi Pemerintah pada jangka menengah.

**...dengan proyeksi lintasan harga minyak yang tidak pasti meningkatkan kebutuhan akan penerapan reformasi harga BBM yang konsisten**

Sebagai tindak lanjut dari reformasi subsidi BBM, yang menjadi tiang utama reformasi fiskal Pemerintah, disertai penerapan mekanisme harga baru yang konsisten dan transparan, dapat berperan dalam menjaga kredibilitas fiskal. Hal ini akan sangat penting terutama bila harga minyak dunia meningkat secara signifikan, yang tanpa penerapan penyesuaian harga yang konsisten dan transparan dapat menimbulkan keprihatinan bahwa sektor fiskal akan kembali terbebani dengan biaya subsidi BBM. Sebaliknya, jika harga minyak semakin menurun, dampaknya terhadap neraca fiskal adalah negatif bersih karena, sejak reformasi bulan Januari 2015, penurunan penerimaan akibat penurunan harga minyak melampaui penurunan belanja terkait. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa setiap penurunan harga minyak mentah sebesar 10 dolar AS akan menghasilkan neraca fiskal negatif bersih sekitar Rp 16,5 triliun (sekitar 1,4 miliar dolar AS atau 0,14 persen dari PDB).

**Kinerja BUMN semakin menjadi fokus**

Suntikan modal Pemerintah ke sejumlah BUMN sebesar Rp 70,4 triliun (sekitar 5,4 miliar dolar AS) dalam alokasi Anggaran 2015 menunjukkan peran penting BUMN dalam rencana pembangunan infrastruktur. Hal ini membuat kinerja para BUMN, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas investasi, menjadi semakin penting untuk mengukur keberhasilan rencana pembangunan Pemerintah yang ambisius.

<sup>10</sup> Lihat Alm, J., 2012, “Designing alternative strategies to reduce tax evasion”, in M. Pickhardt and A. Prinz (eds.), “Tax Evasion and the Shadow Economy”, Edward Elgar Publishing, pp.13-32.

<sup>11</sup> Lihat Rakhmindyarto, 2011, “Evaluating the Sunset Policy in Indonesia”, International Review of Social Sciences and Humanities, Vol. 2, No. 1, pp. 198-214.

**Kebutuhan pembiayaan luar negeri yang signifikan dan mungkin meningkat menekankan pentingnya mendapatkan tambahan aliran masuk modal dengan kualitas yang lebih tinggi**

Seiring dengan rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang ambisius dan agenda reformasi yang lebih luas, ekonomi Indonesia akan membutuhkan lebih banyak pembiayaan luar negeri dengan kualitas yang lebih tinggi. Tantangan pengelolaan ekonomi makro dan risiko-risiko pertumbuhan dari kondisi dan kejutan ekonomi luar negeri dapat timbul kembali (misalnya akibat pengetatan kondisi likuiditas pasar dolar AS dunia bersamaan dengan mulai normalnya kebijakan moneter AS). Defisit neraca berjalan Indonesia (diproyeksikan mendekati 30 miliar dolar AS pada tahun 2015), dan beban utang luar negeri jangka pendek (58,4 miliar dolar AS pada bulan Desember 2014, menurut BI), telah mendorong kebutuhan pembiayaan luar negeri bruto yang signifikan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan infrastruktur yang ambisius akan menambah kebutuhan pembiayaan ekonomi secara langsung, dan secara tidak langsung melalui peningkatan impor permesinan, peralatan, dan bahan masukan (*input*) lain untuk proyek-proyek. Selain fokus yang berkelanjutan dalam mengelola dan meningkatkan kebijakan dan cadangan devisa, implementasi reformasi yang kredibel untuk menjawab rintangan-rintangan sisi penawaran Indonesia akan membantu mendorong siklus yang positif dari peningkatan dan lebih stabilnya pembiayaan luar negeri (PMA dan alokasi struktural untuk aset-aset Indonesia dalam portofolio investasi internasional), peningkatan investasi, dan pertumbuhan.



## B. Beberapa perkembangan terkini perekonomian Indonesia



### 1. Harga beras Indonesia yang tinggi dan bergejolak secara internasional

**Harga beras di Indonesia meningkat pada bulan Februari, dan terdapat tren yang konsisten bahwa harga beras di Indonesia meningkat lebih cepat, dan lebih rentan terhadap gejolak, dibanding harga beras di pasar internasional**

Harga beras di Indonesia melonjak pada bulan Februari, dengan harga eceran pada akhir bulan itu mencatat peningkatan sekitar 12 persen tahun-ke-tahun, dan harga grosiran meningkat sekitar 14 persen (Tabel 5). Produksi beras dalam negeri berkontraksi pada tahun 2014 dan persediaan pada pasar beras Cipinang, pasar grosir beras terbesar di Indonesia, mencatat penurunan yang tajam pada bulan Februari, namun penyebab utama lonjakan itu belum jelas. Walau bila kenaikan harga itu hanya bersifat sementara, lonjakan pada bulan Februari itu konsisten dengan tren sejak tahun 2004, dimana harga beras Indonesia cenderung meningkat lebih cepat dibanding harga pada pasar-pasar internasional, dengan pengecualian tunggal pada krisis harga bahan pangan global tahun 2007/8 (Gambar 23). Bagian berikut memberikan tinjauan singkat tentang kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh kenaikan harga beras, dan pembahasan tentang sejumlah faktor yang dapat mendorong kenaikan harga beras yang belakangan terjadi dan secara jangka panjang.

**Tabel 5: Harga eceran dan grosiran beras telah meningkat dengan cepat selama tahun lalu**  
(harga beras, Rp per kilogram)

Kualitas	Harga grosiran			Harga eceran	
	IR64 I	IR64 II	IR64 III	Menengah	Rendah
<b>Feb-14</b>	9,014	8,452	7,955	11,389	9,043
<b>Feb-15</b>	10,300	9,682	9,191	12,832	10,146
<b>Kenaikan yoy, persen</b>	14.26	14.55	15.53	12.67	12.20

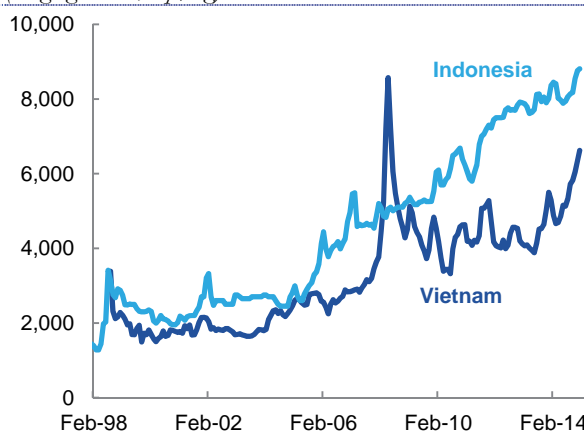
Catatan: Harga grosiran diambil dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). IR64 adalah varietas beras tolak ukur, dengan peringkat dari I (kualitas tertinggi) hingga III (kualitas paling rendah).

Sumber: CEIC

**Mayoritas rumah tangga di Indonesia, termasuk petani, adalah pembeli bersih beras, dan kenaikan harga beras meningkatkan kemiskinan**

Beras adalah makanan pokok penduduk Indonesia dan asupan kalori per kapita dari beras di Indonesia adalah nomor lima paling tinggi di dunia.<sup>12</sup> Karena mempengaruhi hampir semua orang, kestabilan harga beras merupakan masalah ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah konsumen bersih beras dan karenanya akan dirugikan dengan kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras juga cenderung merugikan petani, karena banyak dari mereka mengkonsumsi lebih banyak beras dibanding yang mereka produksi (Tabel 6). Perkiraan untuk tahun 2013 menunjukkan bahwa sekitar empat per lima dari seluruh rumah tangga, dan seperlima petani beras, merupakan konsumen bersih beras.<sup>13</sup> Rumah tangga miskin juga kebanyakan merupakan pembeli bersih beras, dan sangat terpengaruh dengan tingginya harga beras, karena secara rata-rata 25 persen dari seluruh pengeluaran mereka adalah untuk beras. Karenanya, Bank Dunia memperkirakan bahwa peningkatan harga beras sebesar 12 persen, bila terus berlanjut, akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1,3 poin persentase.

**Gambar 23: Harga beras melonjak pada bulan Februari, mengikuti tren kenaikan harga dan harga yang tinggi di Indonesia**  
(harga grosiran, Rp/kg)



Catatan: Harga di Indonesia adalah grosiran (PIBC IR64 II), Vietnam adalah 15 persen pecah (fob). Sumber: CEIC

**Tabel 6: Sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk petani, adalah konsumen bersih beras**  
(persen)

	Proporsi konsumen bersih beras		
	Petani beras	Semua petani	Seluruh penduduk
<b>Tidak miskin</b>	25,6	64,8	82,7
<b>Miskin</b>	31,8	68,0	76,5
<b>Jumlah</b>	26,8	65,4	81,9

Catatan: Berdasar modul produksi beras menyeluruh yang terbaru yang tersedia (Susenas 2004). Sumber: McCulloch, N., 2008, "Rice Prices and Poverty in Indonesia", BIES 44:1, halaman 45-64

<sup>12</sup> FAO via World Rice Statistics, tersedia pada <http://ricestat.irri.org:8080/wrs>; perhitungan staf Bank Dunia.

<sup>13</sup> Modul produksi beras terakhir dari Susenas 2004. Bukti yang lebih baru konsisten dengan berlanjutnya konsumsi beras yang tinggi lintas seluruh rumah tangga, dan rumah tangga petani: 89 persen penduduk Indonesia diperkirakan adalah konsumen bersih beras pada tahun 2007 menggunakan IFLS, lihat Warr, P., 2014, "Food Insecurity and its Determinants", Australian National University Working Paper; pada 2013, perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan Modul Inti dan Konsumsi Susenas 2013 adalah 22 persen petani beras dan 83 persen seluruh rumah tangga merupakan konsumen bersih beras.

a. Pasar beras Indonesia menghadapi tantangan struktural dan belanja Pemerintah belum efektif dalam mendukung produktivitas...

**Pasar beras Indonesia, yang belum sepenuhnya terpadu, tampaknya akan terus bertumbuh**

Konsumsi beras per kapita di Indonesia telah turun dari 96 kg pada tahun 2005 ke 85 kg pada tahun 2014, berdasarkan pada perkiraan staf Bank Dunia dari data Susenas. Namun jumlah konsumsi tampaknya akan semakin meningkat, karena beras tetap menjadi bagian utama dari konsumsi penduduk Indonesia yang jumlahnya terus bertambah.<sup>14</sup> Kenaikan struktural dalam permintaan beras ini akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada produksi beras dalam negeri Indonesia, yang kini berada sekitar 95 persen dari total pasokan. Tantangan yang kini dihadapi, selain permintaan yang secara umum meningkat, adalah permintaan varietas beras yang beragam lintas Indonesia. Penduduk di provinsi yang berbeda mengkonsumsi jenis beras yang berbeda pula, dan terdapat kesenjangan transportasi dan informasi lintas Indonesia (dibahas lebih lanjut di bawah). Hal ini berarti bahwa beras tidak senantiasa mengalir dengan lancar dari daerah-daerah dengan surplus produksi ke tempat-tempat dengan permintaan berlebih.

**Buruknya kualitas data tentang produksi dan konsumsi beras membatasi bukti tentang kondisi pasar dan kemampuan pengambilan keputusan yang matang...**

Terbatasnya ketersediaan dan kualitas data tentang produksi dan konsumsi beras menurunkan kemampuan Pemerintah dan peneliti untuk memahami permintaan dan persediaan beras di Indonesia. Data produksi didasari pada metode “taksiran melalui pengamatan mata” dan “pemotongan tanaman” yang kurang akurat dibanding data satelit. Data harga tersedia bagi sistem pemantauan dini, namun data persediaan dalam negeri pada gudang-gudang dan titik-titik distribusi utama tidak lengkap. Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan konsumsi pada 139,15 kg per kapita per tahun pada tahun 2014 (diubah ke proyeksi 124,89 kg pada tahun 2015) menunjukkan surplus pasokan beras dalam negeri, yang tidak konsisten dengan inflasi harga beras yang tinggi dan kebutuhan yang teramat atas impor beras.<sup>15</sup>

**...namun jelas bahwa produksi menurun pada tahun lalu dan telah melambat pada beberapa dekade terakhir**

Proyeksi produksi tahunan pada tahun 2014 menurun dari tahun 2013, ketiga kalinya terdapat penurunan tahunan sejak 1997-98 (Gambar 24). Stok pada pasar beras Cipinang

**Tabel 7: Jumlah pertumbuhan produksi beras tetap lambat, didorong oleh kenaikan produktivitas yang rendah**

(pertumbuhan tahunan, persen)

	'61-'70	'70-'80	'80-'90	'90-'00	'00-'11
<b>Produktivitas (kuintal/hektar)</b>	3,4	3,3	2,7	0,2	1,1
<b>Luas panen (hektar)</b>	1,9	1,0	1,5	1,2	1,0
<b>Produksi</b>	5,4	4,4	4,3	1,4	2,2

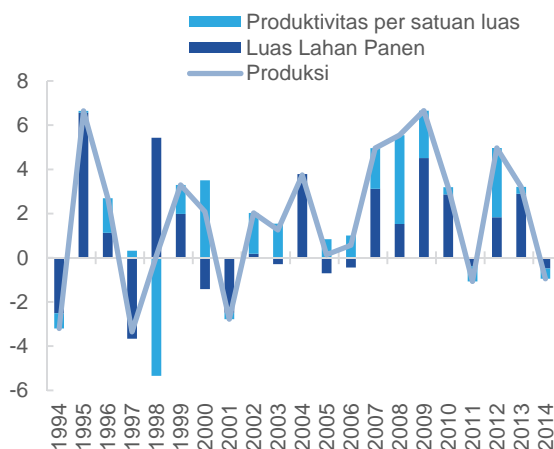
Catatan: \* Kenaikan tahunan adalah laju pertumbuhan tahunan gabungan (Compound Annual Growth Rate).

Sumber: IRRI; FAO; perhitungan staf Bank Dunia

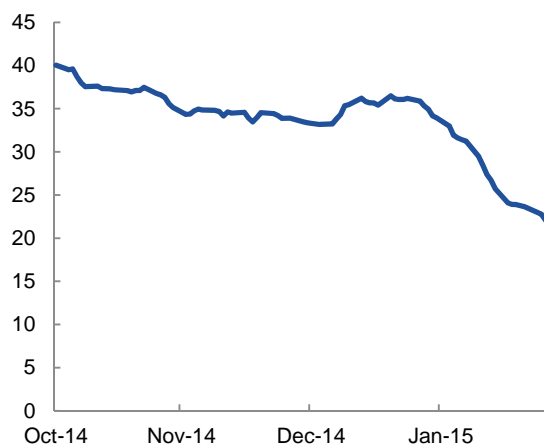
menunjukkan sejumlah tanda-tanda penurunan yang berangsur-angsur hingga akhir tahun 2014, sebelum menukik tajam pada bulan Februari (Gambar 25). Dari segi jangka waktu yang lebih panjang, pertumbuhan jumlah produksi telah melambat secara struktural, dengan pertumbuhan produksi selama periode 1990-2011 kurang dari setengah dari pertumbuhan pada periode 1961-1990, terutama akibat penurunan produktivitas (pertumbuhan hasil panen) (Tabel 7).

<sup>14</sup> Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas.

<sup>15</sup> Perkiraan berdasarkan Susenas (85kg per kapita pada 2014) tanpa menyertakan beras yang dikonsumsi di luar rumah, sementara perkiraan konsumsi beras BPS juga menyertakan konsumsi beras di luar rumah, di ambil dari Survei Industri Makanan dan Minuman.

**Gambar 24: Produksi beras menurun pada 2014...**  
(kontribusi pertumbuhan produksi, persen)

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 25: ...berkontribusi terhadap penurunan stok yang signifikan pada akhir 2014 dan awal 2015**  
(Persediaan Pasar Induk Beras Cipinang, ribuan ton)

Sumber: PT. Food Station Tjipinang Jaya

**Produktivitas terhambat oleh sejumlah faktor, termasuk mekanisasi yang lambat...**

Terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas. Ukuran rata-rata lahan yang beroperasi di Indonesia, terutama di Jawa, berada di bawah negara tetangga pembandingnya, seperti Thailand dan Filipina (Gambar 26). Pertanian juga cenderung padat karya; pada tahun 2013, Indonesia mencatat tingkat intensitas pekerjaan yang paling tinggi dibanding Tiongkok, India, Thailand, Filipina, dan Vietnam (Gambar 27). Walaupun bukti-bukti internasional menunjukkan bahwa ukuran pertanian yang lebih kecil tidak selalu menurunkan produktivitas, mereka menurunkan potensi skala ekonomi dan tingkat mekanisasi, dan faktor-faktor tersebut dapat membebani pertumbuhan produktivitas beras Indonesia, selain terkait dengan upah yang rendah bagi pekerja sektor pertanian.

**...buruknya infrastruktur dan keterhubungan...**

Tantangan utama lainnya dalam meningkatkan produktivitas mencakup rendahnya tingkat teknologi dan informasi (seperti penggunaan bibit dengan varietas yang tinggi dan hasil panen yang besar), kecilnya belanja penelitian dan perluasan pertanian, dan lambatnya administrasi tanah (terbatasnya sertifikat tanah yang umumnya dibutuhkan untuk jaminan pinjaman). Buruknya infrastruktur (irigasi, sumber daya air, akses jalan ke pasar) dan tingginya biaya logistik juga membebani pasar beras Indonesia.<sup>16</sup> Biaya pengiriman antar pulau juga tinggi akibat buruknya infrastruktur pelabuhan pada bagian timur Indonesia dan masalah kargo kosong yang signifikan untuk kapal-kapal yang kembali ke Jawa dari bagian timur Indonesia tersebut. Biaya pengiriman dengan truk, baik pada kota-kota asal dan tujuan, merupakan biaya logistik utama bagi beras untuk mencapai pasar. Kemacetan di kota-kota besar dan buruknya pemeliharaan jalan pada bagian timur Indonesia juga meningkatkan biaya.

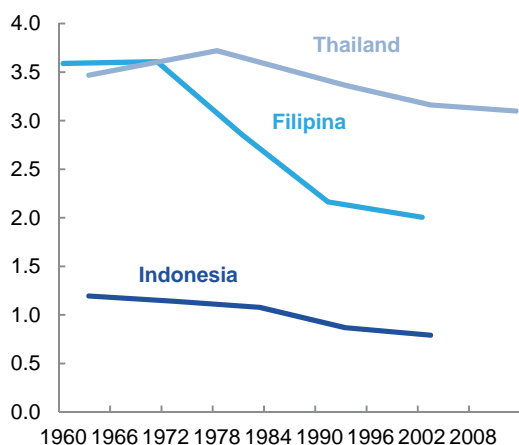
<sup>16</sup> Laporan Kementerian Perdagangan, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013, "A Study on Inter-island Logistics Performance: Case Studies on Rice and Cement".

...sementara  
kenaikan belanja  
Pemerintah untuk  
pertanian belum  
mampu memacu  
pertumbuhan

Belanja Pemerintah untuk pertanian, termasuk beras, telah meningkat secara signifikan, namun alokasi belum efektif dalam mendukung pertumbuhan produktivitas dalam negeri. Rasio belanja Pemerintah untuk pertanian terhadap PDB meningkat dari 9 persen pada tahun 1970-80 menjadi 35 persen pada tahun 2009, sementara persentase anggaran untuk pertanian pun meningkat dari 3 persen pada tahun 2001 menjadi 6 persen pada tahun 2008. Peningkatan ini belum mampu mendorong kenaikan yang setara dalam produksi pertanian, yang meningkat sebesar rata-rata 3 persen antara tahun 2001 dan 2009.<sup>17</sup> Dampak yang lemah dari belanja terhadap produktivitas dapat dikaitkan dengan buruknya alokasi belanja; belanja subsidi pertanian untuk masukan (*input*) swasta seperti pupuk meningkat empat kali lipat antara tahun 2001 dan 2009, sementara belanja Pemerintah untuk irigasi tetap datar. Penelitian tentang Indonesia menunjukkan bahwa belanja untuk barang-barang publik, seperti irigasi, membawa dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita dalam pertanian, sementara belanja Pemerintah untuk subsidi pupuk membawa dampak yang negatif.<sup>18</sup>

**Gambar 26: Ukuran rata-rata lahan usaha pertanian yang beroperasi di Indonesia lebih rendah dibanding Filipina dan Thailand...**

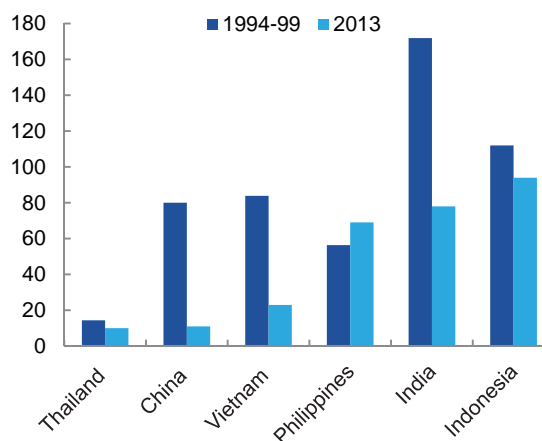
(rata-rata ukuran lahan usaha pertanian, hektar)



Catatan: Ukuran rata-rata lahan usaha pertanian adalah jumlah ukuran lahan pertanian pada suatu daerah dibagi jumlah usaha pertanian. Pertaniannya termasuk padi dan tanaman lainnya.  
Sumber: Sensus Pertanian Nasional<sup>19</sup>

**Gambar 27: ...dan usaha pertanian beras Indonesia masih tetap padat karya**

(intensitas kerja, 8 jam manusia-bari per hektar per tanaman)



Catatan: Data tahun 1990an untuk Indonesia merujuk ke 1994-1997. Wilayah termasuk Dataran Tengah (Thailand), Zhejiang (Tiongkok), Delta Mekong (Vietnam), Luzon Tengah (Filipina), Tamil Nadu (India), dan Jawa Barat (Indonesia).  
Sumber: Moya dkk. (2004), Bordey dkk. (2014)<sup>20</sup>

**b. ...dan kebijakan stabilisasi harga tidak berperan efektif**

Sejumlah mekanisme digunakan dalam upaya untuk menstabilkan harga-harga...

Sementara produktivitas dan keterhubungan pertanian merupakan pendorong peningkatan harga beras pada jangka panjang, Pemerintah memiliki serangkaian mekanisme untuk menstabilkan harga untuk jangka pendek. Mekanisme itu termasuk Operasi Pasar (OP) dan impor beras, dan penggunaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang dilaksanakan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). OP adalah mekanisme stabilisasi pasar utama untuk inflasi harga beras konsumen.

<sup>17</sup> Armas, E. B., C. G. Osorio, dan B. Moreno-Dodson, 2010, "Agriculture Public Spending and Growth: The Example of Indonesia" World Bank Economic Premise, No.9, April.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Dawe, D., 2014, "Agricultural Transition in the Context of Structural Transformation," Food and Agriculture Organization Working Paper, Bangkok Thailand

<sup>20</sup> Ibid.

Peraturan yang berlaku memungkinkan intervensi pasar bila terdapat inflasi harga beras 10 persen dari tingkat harga rata-rata tiga bulan sampai harga beras kembali stabil. Sejak tahun 2009, impor beras dilakukan berdasarkan aturan, menurut tiga kriteria: (1) perbedaan antara harga beras dalam negeri dan HPP yang berlaku meningkat melampaui tingkat batas; (2) ketika jumlah persediaan beras Perum Bulog turun di bawah suatu tingkat tertentu; atau (3) jika proyeksi surplus dari produksi beras dalam negeri terhadap konsumsi kurang dari jumlah yang ditetapkan.<sup>21</sup> Perum Bulog adalah importir tunggal dari beras kecuali untuk varietas beras berkualitas tinggi (pecah 0%, 1% dan 5%) dan harum.

...namun implementasinya beragam, dengan operasi pasar (OP) tampaknya tidak mampu menstabilkan pasar secara signifikan...

HPP digunakan untuk memberikan batas harga dasar untuk petani dan memberi insentif produksi. Pada beberapa tahun terakhir, tingkat HPP ditetapkan untuk meningkatkan penerimaan petani, untuk meningkatkan kapasitas pengadaan Perum Bulog, dan mengantisipasi kenaikan harga beras internasional. Sejak tahun 2011, Pemerintah diperkenankan untuk mengadakan beras pada harga di atas HPP, dan di

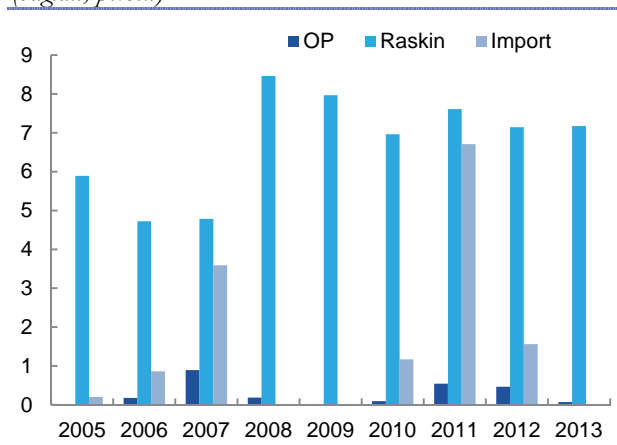
atas kualitas beras yang ditetapkan pada tahun 2005. Program bantuan sosial nasional yang mendistribusikan beras bersubsidi, Raskin (Beras Miskin) tidak ditujukan untuk menstabilkan harga, namun kadangkala digunakan untuk memitigasi dampak kejutan harga beras bagi rumah tangga miskin dan lemah, seperti pada waktu krisis bahan pangan tahun 2008. Secara bersama-sama, OP, impor beras, dan Raskin hanya mempengaruhi sebagian kecil dari jumlah produksi beras (Gambar 28). Kecilnya jumlah yang dilepas oleh operasi pasar, yaitu kurang dari satu persen dari jumlah produksi beras, tampaknya menjelaskan mengapa mekanisme ini tidak membawa dampak yang signifikan dalam menurunkan harga.<sup>22</sup>

...dan mekanisme tersebut, serta sinyal-sinyal kebijakan lainnya, dapat berkontribusi terhadap gejolak harga beras, termasuk seperti

Walau pengaruh secara volume dari OP, Raskin, dan impor tidaklah besar, mereka dapat berkontribusi kepada gejolak harga beras, terutama ketika persediaan diproyeksikan akan rendah. Pedagang yang mengetahuinya dapat memilih untuk membatasi penjualan sementara menunggu Pemerintah untuk menerapkan mekanisme untuk menstabilkan pasar. Isyarat dari Pemerintah untuk tidak meningkatkan impor beras, sebagai bagian dari sasarannya untuk mencapai swasembada beras pada tahun 2018, dapat juga berkontribusi terhadap pandangan kurangnya pasokan pada bulan Februari, terutama setelah penurunan pengadaan beras oleh Perum Bulog sebesar 33 persen pada tahun lalu.<sup>23</sup> Penundaan dalam

**Gambar 28: OP, impor dan Raskin hanya bagian kecil dari jumlah produksi beras**

(bagian, persen)



Sumber: Bea cukai Indonesia; BPS; Bulog; SUSENAS

<sup>21</sup> Peraturan Kementerian Perdagangan No.06/M-DAG/PER/2/2012.

<sup>22</sup> Kusumaningrum, D. T. Purwaningsih, S. Rahardja, K. Tanaguchi, 2015, "The Evaluation of Rice Market Operation at the Macro Level", penelitian Bank Dunia, tidak diterbitkan.

<sup>23</sup> Kementerian Pertanian, 2015, "Review of HPP Policy - Inpres 3/2012", presentasi slide, Technical Coordination Meeting on Rice Policy, Kementerian Koordinator Ekonomi, 15 Januari 2015.

yang terlihat pada  
bulan Februari...

pencairan Raskin dari November 2014 hingga Februari 2015 juga dapat memicu sejumlah kelebihan permintaan di pasar, terutama karena periode itu adalah masa di antara musim panen. Penerapan dan pengkomunikasian operasi-operasi Pemerintah – ditambah dengan informasi yang terbatas dan tidak akurat tentang produksi, konsumsi dan persediaan – mendorong ketidakpastian tentang persediaan yang sesungguhnya ada, mendistorsi pasar, dan memberikan ruang bagi spekulasi jangka pendek.

...menunjukkan  
kebutuhan untuk  
memperkuat fokus  
guna mewujudkan  
ketahanan beras  
berdasar informasi  
yang lebih baik, dan  
menjawab tantangan  
pertumbuhan  
produktivitas

Beras adalah bahan pangan pokok di Indonesia, dan pasar beras internasional sangatlah kecil (hanya 6-7 persen dari jumlah produksi beras dunia diperdagangkan di pasar internasional).<sup>24</sup> Dalam konteks ini, keprihatinan tentang pengamanan pasokan beras, di Indonesia dan negara lain, adalah hal yang wajar. Namun pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan-kebijakan harga dan pelaksanaannya memiliki efektivitas yang terbatas dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, yaitu untuk melindungi kaum miskin dan petani. Kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap harga agar tetap tinggi akan meningkatkan kemiskinan dan mendistorsi pasar beras dalam negeri, termasuk mendorong impor ilegal, dan melebarkan tekanan inflasi. Sementara agar OP dapat membantu meratakan gejolak harga, intervensi harus dilakukan dengan tepat waktu, dengan ukuran yang tepat dan dengan penargetan yang baik. Hal ini akan membutuhkan sistem peringatan dini yang efektif dan informasi secara waktu nyata (*real time*) tentang harga, persediaan, dan aliran beras. Pada jangka yang lebih panjang, pewujudan peningkatan yang berkelanjutan demi tercapainya ketahanan beras Indonesia akan membutuhkan peningkatan produktivitas melalui perbaikan struktural jangka panjang pada sektor usaha pertanian.

<sup>24</sup> Global Monitoring Report 2012, “Using Trade Policy to Overcome Food Insecurity,” pada Food Prices, Nutrition, dan Millennium Development Goals, tersedia *online*, hal.119.

## 2. Mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia

**Memperoleh izin usaha di Indonesia saat ini merupakan proses yang terlalu rumit, mahal, dan memerlukan cukup banyak waktu, sehingga hal ini menjadi suatu prioritas reformasi utama bagi pemerintah baru**

Investasi di Indonesia terbatas oleh kenyataan bahwa proses pendaftaran usaha bagi perusahaan, baik berukuran besar maupun kecil, beserta izin-izin yang dibutuhkan, merupakan proses yang rumit, mahal dan membutuhkan banyak waktu.<sup>25</sup> Saat ini Indonesia berada pada peringkat 114 dari 189 negara dalam kemudahan melakukan usaha, menurut pengukuran yang dilakukan oleh Bank Dunia.<sup>26</sup> Sebagai contoh, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin-izin untuk memulai usaha dalam bidang manufaktur adalah 794 hari menurut peraturan perundangan, dan waktu yang sesungguhnya dibutuhkan bahkan dapat lebih lama dari periode itu. Pada sektor energi, yang pertumbuhannya dinyatakan oleh Pemerintah sebagai prioritas kebijakan utama, para investor melaporkan bahwa untuk memperoleh berbagai izin dan lisensi untuk mendirikan suatu pembangkit listrik dapat memakan waktu lebih dari empat tahun. Pentingnya percepatan proses perizinan usaha diakui oleh Pemerintah sebagai prioritas kebijakan utama, dan bagian ini memberikan tinjauan singkat tentang langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini serta tantangan-tantangan yang masih menghadang.

## a. Perizinan usaha adalah prioritas reformasi utama dari pemerintah baru...

**Upaya-upaya pada masa lalu dalam meningkatkan perizinan usaha dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu belum membuahkan hasil yang diharapkan**

Sejumlah prakarsa telah dilakukan oleh Pemerintah yang lalu untuk meningkatkan dan menyederhanakan proses pendaftaran perizinan pada tingkat pusat maupun daerah, namun hasil yang dicapai masih terbatas (Kotak 4). Pembentukan satu kontak tunggal bagi pendaftaran izin investor merupakan suatu cara untuk mempermudah interaksi pemohon dengan pihak berwenang, serta menyusun pengaturan kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi antar badan dan penyederhanaan atau percepatan proses-proses perizinan secara umum menjadi lebih mudah dan terpercaya. Sebelumnya, tidak ada kemajuan berarti yang dicapai dalam pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terpusat semacam ini pada tingkat nasional, maupun dalam penyederhanaan prosedur pendaftaran untuk, dan percepatan penerbitan dari, izin-izin usaha. Pada tingkat daerah, yang mana pendirian usaha juga harus mendapatkan izin-izin (termasuk dari berbagai badan berbeda), sejumlah pemimpin daerah berwawasan reformasi telah memprakarsai pembentukan PTSP daerah dan mencatat keberhasilan yang signifikan. Namun seberapa baik izin-izin daerah diproses selama ini masih sangat bervariasi.<sup>27</sup> Untuk sebagian besar usaha, yang perlu mendapatkan izin-izin nasional dan daerah, terutama bagi usaha-usaha kecil dan bersifat lokal yang hanya membutuhkan izin-izin daerah, PTSP yang berjalan baik dan peningkatan proses penerbitan izin-izin dapat berdampak besar terhadap aksesibilitas, serta kemudahan dan biaya dalam berinvestasi dan menjalankan usaha.

**Pemerintah kembali menempatkan perizinan usaha pada peringkat teratas agenda reformasi**

Pemerintah baru kembali menempatkan masalah perizinan investasi pada peringkat teratas agenda reformasi. Pemerintah secara terbuka dan berulang-kali menegaskan tekadnya untuk memperbaiki lingkungan usaha di Indonesia serta untuk mempermudah, meringankan biaya, dan mempercepat proses pemenuhan persyaratan bagi dunia usaha sesuai dengan peraturan perundangan. Pada kunjungan

<sup>25</sup> Untuk analisis tentang perizinan usaha dan PTSP di Indonesia, lihat Asia Foundation, 2007, "Making Sense of Business Licensing in Indonesia: a Review of Business Licensing Policy and Survey of One Stop Shop Service Centers", KPPOD dan the Asia Foundation, 2008, "Local Economic Governance in Indonesia: A Survey of Businesses in 243 Regencies/Cities in Indonesia.", dan Nurridzki, N., 2010, "Pilot Study: Mapping and Streamlining Business Licenses at the National Level", Report for the Multi Donor Facility for Trade and Investment Climate, World Bank.

<sup>26</sup> World Bank, 2014, "Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency".

<sup>27</sup> Lihat World Bank, 2012, "Doing Business in Indonesia 2012".



“blusukan” pertama setelah pengangkatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada bulan Oktober 2014 serta menginstruksikan BKPM dan kementerian-kementerian terkait untuk melaksanakan PTSP terpusat dalam waktu tiga bulan (yaitu pada bulan Januari 2015). Presiden juga menekankan bahwa para investor seyogianya hanya perlu mengunjungi BKPM untuk permohonan perizinan pada tingkat nasional. Pada waktu kunjungan Presiden, para investor masih harus mengajukan permohonan perizinan kepada berbagai kementerian dan lembaga negara di luar BKPM pada tingkat nasional, ditambah izin-izin daerah. Sementara BKPM sendiri hanya memproses 14 izin, termasuk izin prinsip pada awal proses pengurusan perizinan dan izin operasi yang menjadi izin terakhir rangkaian proses tersebut. Jika telah diimplementasikan sepenuhnya, PTSP Pusat akan menggabungkan seluruh proses-proses perizinan pada tingkat nasional pada satu atap, menyederhanakan jaring proses perizinan usaha yang rumit lintas lembaga-lembaga nasional dan daerah yang berbeda (Gambar 29). Langkah ini diharapkan menghasilkan layanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan, dan terpadu. Presiden juga mengumumkan bahwa ia akan mendorong para gubernur, bupati, dan walikota untuk menerapkan layanan satu pintu daerah yang efektif, dengan kemungkinan penerapan konsekuensi terhadap transfer anggaran bagi mereka yang gagal menerapkan perubahan tersebut.<sup>28</sup>

#### b. ...dengan momentum reformasi awal yang kuat

**BKPM memperbaiki layanannya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ambisius**

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan yang lalu, BKPM melakukan pemetaan awal prosedur-prosedur perizinan usaha untuk sektor-sektor terpilih dan mengidentifikasi bidang-bidang yang berpotensi untuk ditingkatkan. Badan ini juga melakukan reformasi bertahap untuk meningkatkan layanannya bagi para investor, termasuk tinjauan proses permohonan perizinan dan peluncuran sistem permohonan secara *online*. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang lebih besar pada masa depan, BKPM mengumumkan penerapan penuh dari permohonan yang wajib dilakukan secara *online* per tanggal 15 Desember 2014. Walau permohonan secara *online* telah diluncurkan untuk sejumlah perizinan tertentu, penerapannya bagi seluruh perizinan dipercepat meskipun dengan masa percobaan kesiapan sistem yang singkat dan pemahaman sektor swasta yang terbatas akan proses baru tersebut.

**BKPM bekerja bersama kementerian-kementerian terkait dalam pengalihan kewenangan perizinan kepada BKPM...**

Guna menyiapkan peluncuran PTSP Pusat pada bulan Januari 2015, BKPM bekerja bersama kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait untuk mencapai empat pencapaian utama. Pertama, penyusunan dan penerbitan peraturan kementerian tentang pemindahan kewenangan ke BKPM, dan penugasan petugas penghubung dari kementerian-kementerian dan lembaga ke PTSP Pusat, termasuk daftar perizinan yang akan diproses di PTSP Pusat tersebut. Para petugas penghubung dapat menerima mandat untuk memproses dan menerbitkan izin terkait secara langsung, atau meneruskan permohonan tersebut ke kementerian atau lembaga terkait bila membutuhkan pengetahuan teknis yang signifikan (misalnya untuk menafsirkan hasil-hasil pemeriksaan lingkungan, dan untuk jenis-jenis perizinan teknis dan teknik/rekayasa). Kedua, penyusunan dan penerbitan peraturan-peraturan kementerian tentang prosedur-prosedur operasi standar bagi seluruh proses perizinan di PTSP Pusat. Ketiga, pengaturan organisasional dari PTSP Pusat, termasuk pengaturan kantor depan (*front office*) dan belakang (*back office*) (perangkat lunak dan keras), proses-proses bisnis, pusat panggilan (*call center*), serta sistem pemantauan dan pelacakan (*monitoring and tracking system*). Keempat, keterlibatan awal sektor swasta dalam proses reformasi, termasuk pengumpulan

<sup>28</sup> *Kontan*, 4 November 2014.

umpan balik (*feedback*) dan identifikasi masalah-masalah, serta sosialisasi dan komunikasi pada tahap awal.

...dan satu lokasi fisik tunggal untuk perizinan nasional kini telah tersedia

Sebagai hasil dari langkah-langkah yang dipaparkan secara ringkas di atas, pada bulan Maret 2015 BKPM menyediakan suatu lokasi fisik tunggal bagi para investor untuk mengajukan permohonan bagi berbagai perizinan nasional. Meskipun hal ini merupakan langkah maju yang penting, masih banyak tantangan yang perlu diatasi guna mencapai sasaran perizinan investor yang benar-benar terpadu.

Gambar 29: PTSP Pusat yang terencana dan direvitalisasi dengan percepatan prosedur permohonan perizinan



Sumber: Bank Dunia

Sistem permohonan *online* yang baru masih memiliki sejumlah masalah

Sejumlah masalah penerapan dijumpai selama beberapa minggu pertama sejak PTSP Pusat dibentuk dan memulai layanan terpadunya. Meskipun sistem permohonan *online* telah diterapkan sejak pertengahan bulan Desember 2014, para investor mengeluhkan bahwa sistem tersebut belum dapat diandalkan dan kurang bersahabat dengan pengguna. Karenanya, sebagian besar investor tetap mengunjungi PTSP Pusat secara langsung untuk berkonsultasi dengan para staf dan mencari solusi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang sistem teknologi informasi dan komunikasi BKPM yang ada dan kapasitasnya untuk mendukung PTSP yang sepenuhnya terpadu. Selain itu, jumlah permohonan perizinan yang diproses oleh para petugas penghubung kementerian dan lembaga negara mencatat penurunan pada beberapa minggu setelah integrasi PTSP Pusat pada bulan Januari. Banyak investor masih tetap menyerahkan permohonan mereka secara langsung ke kementerian dan lembaga negara, atau menunda permohonan mereka. Hal ini mencerminkan keterbatasan pemahaman akan bagaimana PTSP Pusat bekerja.

c. Tantangan berikut: perlunya rencana reformasi yang kredibel dan implementasi yang efektif

Jalan masih panjang menuju perizinan terpadu...

Kepala BKPM, Franky Sibarani, menyatakan bahwa PTSP Pusat belum merupakan layanan yang sepenuhnya terpadu.<sup>29</sup> Masih banyak keterbatasan dalam peningkatan yang telah dilakukan sejauh ini, baik dalam hal penyederhanaan proses-proses perizinan maupun sejumlah perizinan yang belum disertakan. Sebagai contoh, para investor masih perlu berpindah dari satu meja ke meja lainnya di BKPM untuk memperoleh suatu izin dan kemudian mengajukan permohonan izin selanjutnya. BKPM kini hanya memproses perizinan untuk sekitar 300 bidang usaha dari total 1.200 bidang usaha yang ada. Karenanya, masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk merealisasikan visi perizinan investor yang efisien dan terpadu.

<sup>29</sup> *Koran Tempo*, 19 Januari 2015.

...dan pengatasan tantangan ini membutuhkan rencana reformasi yang kredibel dengan dukungan sumber daya yang memadai

Rancangan dan implementasi rencana reformasi yang kredibel, berdasarkan pada penilaian terperinci tentang kondisi yang ada dan disertai dengan kerangka pemantauan dan evaluasi yang baik, merupakan prasyarat keberhasilan. Hal ini akan membutuhkan sumber daya yang cukup besar dan koordinasi yang kuat lintas kementerian dan lembaga negara pada tingkat nasional dan daerah. Satuan-satuan tugas khusus dikerahkan untuk melaksanakan tugas tersebut dan mereka telah mengidentifikasi bidang-bidang prioritas yang membutuhkan adanya revisi peraturan pengaturan perizinan yang diperlukan (misalnya tentang kehutanan dan penggunaan lahan, serta persyaratan lingkungan).

Rangkaian reformasi selanjutnya akan terfokus pada sektor yang diprioritaskan dan pembenahan PTSP daerah

BKPM telah mengumumkan rencananya untuk menyederhanakan peraturan sehingga menurunkan jumlah prosedur dan jumlah hari yang dibutuhkan untuk memperoleh seluruh perizinan pada tahap reformasi berikutnya, dimulai dengan sektor-sektor terpilih yang diprioritaskan, termasuk bidang pembangkit tenaga listrik, manufaktur padat karya, pertanian, dan kelautan. Secara khusus, izin ketenagalistrikan baru bagi produsen tenaga listrik independen (*independent power producers*, IPP) menjadi masalah yang sangat penting, karena Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt pada tahun 2019. Tahap kedua dari implementasi PTSP Pusat akan menyertakan lebih banyak sektor pada tingkat nasional. Uji coba integrasi PTSP daerah akan dilakukan secara bertahap dari bulan Januari 2015 hingga akhir tahun 2016.

Pemetaan yang terperinci dari seluruh perizinan akan menjadi langkah penting menuju proses-proses terpadu

Dari sudut pandang operasi, pemerintah sedang berupaya mewujudkan proses bisnis terpadu (*integrated business processes*) bagi seluruh perizinan, yang menurut rencana akan diimplementasikan secara bertahap, termasuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baru. Pengembangan proses-proses bisnis terpadu akan membutuhkan pemetaan yang terperinci dari seluruh perizinan. Sebagai contoh, pemetaan awal perizinan untuk pembangkit listrik perlu diikuti dengan pemetaan spesifik untuk jenis-jenis pembangkit listrik yang berbeda, proses bisnis yang terperinci (prosedur langkah-demi-langkah bagi investor), serta persyaratan dan dokumen pendukung dan prosedur-prosedur untuk setiap jenis izin. Selain itu, suatu proses bisnis terpadu hanya akan membuat perbaikan yang signifikan terhadap prosedur perizinan secara keseluruhan jika Pemerintah dapat menyederhanakan dan mempercepat proses-proses perizinan secara keseluruhan terlebih dahulu, dan kemudian menerapkannya di PTSP Pusat dan Daerah.

BKPM akan membutuhkan tambahan sumber daya manusia dan reformasi pengaturan organisasional

Proses-proses bisnis yang baru akan membutuhkan perubahan organisasional yang signifikan. Dengan sejumlah staf kementerian dan lembaga yang kini hanya ditugaskan secara sementara pada PTSP Pusat di BKPM, pengaturan organisasional BKPM, dan masalah sumber daya manusia bagi perizinan investor, membutuhkan perhatian yang cermat jika ingin mewujudkan keberlanjutan untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Tindak lanjut atas komitmen pada tingkat tinggi dan pengelolaan risiko penerapan akan menjadi hal yang penting

Sasaran-sasaran yang ambisius dan penerapan yang sistematis dan berkelanjutan dari proses-proses peraturan perundangan yang baru, yang meliputi tidak hanya BKPM namun juga seluruh kementerian dan lembaga negara, akan menjadi suatu tantangan. Permasalahan dan keterlambatan implementasi dapat segera menjadi sorotan, dan Pemerintah harus mengelola risiko-risiko yang terkait dengan rencana reformasi tersebut secara hati-hati. Banyak hal yang kini bergantung kepada sejauh mana dukungan tingkat tinggi dari semua kementerian terkait dapat tercapai,

Maret 2015

THE WORLD BANK | BANK DUNIA

dipertahankan, dan dijabarkan melalui strategi implementasi reformasi menjadi proses-proses yang baru dan lebih baik.

#### Kotak 4: Prakarsa reformasi pada masa lalu untuk mengembangkan PTSP Pusat dan menyederhanakan izin usaha

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan investor, diikuti dengan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 yang kemudian menjadi petunjuk pelaksanaannya.<sup>30</sup> Selanjutnya, Pemerintah mengidentifikasi penyederhanaan perizinan usaha sebagai bidang yang diprioritaskan dan mengamanatkan kepada BKPM untuk melaksanakan pemetaan yang terperinci atas proses perizinan dan menyusun peraturan perundangan untuk menyederhanakannya. Bagi PTSP daerah, BKPM menerbitkan standar-standar layanan untuk pelaksanaan PTSP pada tahun 2009. Hal ini awalnya menyebabkan sejumlah kebingungan, karena Kementerian Dalam Negeri sebelumnya pernah menerbitkan peraturan (pada tahun 2007) mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Pada akhirnya, kurangnya komitmen tingkat tinggi yang berkelanjutan dalam penyederhanaan dan integrasi proses-proses perizinan melalui PTSP Pusat dan daerah mengakibatkan hanya sejumlah kecil perizinan (dari ribuan perizinan yang ada) yang dialihkan kepada BKPM, sementara prosedur-prosedur perizinan yang terlalu rumit dan tidak efisien tetap menjadi hal yang harus dihadapi oleh para investor pada tingkat nasional maupun daerah.

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal juga menugaskan BKPM untuk mengembangkan suatu Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk perizinan investasi dalam waktu tiga tahun. Sistem itu bertujuan untuk memberikan layanan satu atap (*national single window*, NSW) bagi permohonan dan persetujuan perizinan. Sistem itu diharapkan dapat melibatkan PTSP Pusat pada tingkat nasional melalui BKPM, bersama-sama dengan PTSP daerah melalui pemerintah provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Sistem *online* itu juga bertujuan untuk memberikan akses ke proses-proses bisnis untuk izin-izin yang diterbitkan oleh kementerian teknis Indonesia guna membentuk suatu sumber informasi tunggal bagi para investor. Saat ini, meskipun sistem *online* tersebut telah berjalan dan dapat diakses oleh para investor melalui situs *web* BKPM, penggunaannya masih jauh dari efektif dan masih terdapat masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Sejumlah pemerintah daerah juga menggunakan sistem *online* tersebut, namun jumlahnya sangat jauh dibawah jumlah yang sebelumnya ditargetkan.<sup>31</sup>

Upaya-upaya untuk menyederhanakan perizinan usaha dan merevitalisasi PTSP untuk menarik investasi kembali diluncurkan dalam bentuk Paket Kebijakan Ekonomi bulan Agustus 2013 (lihat Triwulanan edisi bulan Desember 2013). Pada awalnya, Pemerintah memutuskan untuk memfokuskan pada perizinan sektor migas yang sangat rumit. Namun rumitnya sektor tersebut dan rendahnya komitmen kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai reformasi yang berarti mengakibatkan surutnya momentum dari upaya-upaya tersebut. Pengalaman ini memberikan pembelajaran yang berharga tentang pentingnya koordinasi yang kuat, komitmen kementerian tingkat tinggi, dan fokus kepada sektor-sektor tertentu yang relatif mudah untuk dikelola. Setelah keberhasilan pada sektor-sektor ini mulai diraih, maka pengalaman ini dapat diterapkan untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan pada sektor-sektor yang lebih rumit dan menantang.

<sup>30</sup> Pedoman itu termasuk: (i) PTSP dikelola oleh Pemerintah Pusat (melalui BKPM) dan oleh Pemerintah Daerah; (ii) kewenangan menerbitkan izin-izin dan fasilitas non-perizinan lainnya dapat didelegasikan oleh kementerian-kementerian teknis kepada kepala BKPM; dan (iii) peraturan selanjutnya tentang PTSP akan diterbitkan dalam peraturan BKPM.

<sup>31</sup> Leshner, M., 2012, "The OECD Regulatory Reform Review of Indonesia: Market Openness", OECD Trade Policy Papers, No. 138, OECD Publishing.

### 3. Laju pertumbuhan PDB yang berkelanjutan di Indonesia: pandangan yang lebih dekat

**Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan menjadi fokus setelah lonjakan kenaikan komoditas**

Pertumbuhan ekonomi melambat secara konsisten, walau bertahap, dalam beberapa tahun terakhir. Perlambatan ini bertepatan dengan tren perlemahan harga komoditas global sejak tahun 2011, yang menimbulkan pertanyaan sampai sejauh mana harga-harga komoditas yang lalu mendorong pertumbuhan, dan laju pertumbuhan ekonomi seperti apa yang kini dapat dipertahankan pada masa pasca lonjakan harga komoditas. Dari sudut pandang kebijakan ekonomi, pertanyaan tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan sasaran Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 7 persen pada masa pemerintahannya yang pertama (yaitu hingga tahun 2019). Bagian ini mengkaji bukti-bukti terkait dinamika pertumbuhan Indonesia yang terbaru dan laju pertumbuhan berjalan yang dapat dipertahankan seiring mudarnya lonjakan harga komoditas, sementara Bagian C memfokuskan pada peran sektor sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini dan prospek jangka menengahnya.<sup>32</sup>

#### a. Harga komoditas mempengaruhi tren dan siklus pertumbuhan ...

**Harga komoditas berperan penting dalam kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2003...**

Harga komoditas merupakan faktor penentu pertumbuhan yang penting di negara eksportir komoditas besar seperti Indonesia. Seperti dibahas secara terperinci pada Bagian C, kenaikan harga komoditas secara persisten pada tahun 2003-2007, dan sekali lagi pada tahun 2009-2010 selama pemulihan krisis keuangan dunia, mendorong peningkatan laba perusahaan, pendapatan rumah tangga, dan penerimaan Pemerintah (Gambar 30). Hal ini pada gilirannya mendorong permintaan konsumsi, mendukung produksi (*output*) barang-barang dan jasa-jasa dalam negeri (bersama-sama dengan peningkatan impor) selama periode waktu tersebut. Selain itu, terdapat kenaikan investasi yang signifikan, sebagian yang mendukung perluasan kapasitas produktif dari ekonomi, terutama pada sektor pertambangan (Gambar 30). Hal ini kemudian mendorong peningkatan permintaan konsumsi, mendukung produksi (*output*) barang, dan layanan dalam negeri (serta peningkatan impor) selama periode tersebut. Selain itu, peningkatan signifikan dalam investasi pun tercermati, sebagian didukung oleh perluasan kapasitas produktif bidang ekonomi, terutama sektor pertambangan (Gambar 30). Investasi sektor konstruksi juga menerima dorongan yang signifikan selama lonjakan komoditas tersebut. Namun pertumbuhan investasi dan PDB melambat sejak tahun 2013 dengan penurunan harga komoditas-komoditas ekspor utama Indonesia.

<sup>32</sup> Untuk pandangan yang lebih luas tentang tren dan tantangan pembangunan terbaru di Indonesia, lihat Bank Dunia, 2014, Kajian Kebijakan Pembangunan di Indonesia: "Indonesia: Menghindari Perangkap".

**...namun pertumbuhan yang diperlihatkan pada kurun waktu tertentu tidaklah sama dengan pertumbuhan Indonesia secara berkelanjutan ...**

Untuk memahami implikasi pergeseran tersebut terhadap kinerja pertumbuhan Indonesia, sangat penting untuk membedakan pertumbuhan ekonomi yang diamati pada suatu kurun waktu tertentu, dan potensi (atau keberlanjutan) produksi. Potensi produksi dan kesenjangan produksi merupakan konsep ekonomi makro utama yang menjadi landasan berbagai keputusan kebijakan yang penting. Para ekonom umumnya mendefinisikan potensi produksi sebagai tingkat produksi yang berkelanjutan dengan memperhatikan struktur dasar ekonomi. Kesenjangan produksi adalah perbedaan antara PDB aktual, seperti diukur oleh BPS, dan potensi produksi. Berkelanjutan berarti bahwa, bila semua hal lainnya sama, tingkat produksi potensial ini tidak menghasilkan produksi ekonomi yang tidak dikehendaki, seperti inflasi yang tinggi serta defisit neraca transaksi berjalan yang besar dan tidak dapat dipertahankan. Inflasi cenderung meningkat ketika tingkat produksi melebihi tingkat potensi dan sebaliknya.

**...dan harga komoditas mempengaruhi laju pertumbuhan siklikal dan potensial**

Potensi produksi bergantung pada banyak faktor yang terkait dengan struktur dasar ekonomi. Lonjakan komoditas mendorong baik potensi produksi, melalui kenaikan kapasitas produktif, maupun produksi aktual, melalui kenaikan permintaan dalam negeri. Hal ini menjelaskan mengapa potensi pertumbuhan Indonesia cenderung bergerak seiring dengan siklus komoditas dunia, namun lebih kecil dari perkiraan bila hanya dilihat dari laju pertumbuhan aktual. Pertumbuhan pada suatu waktu tertentu juga mencerminkan pengaruh permintaan yang hanya bersifat sementara, kecuali terdapat investasi baru yang bisa mendorong kenaikan pertumbuhan produktivitas secara permanen.

#### b. ...yang kini berada pada kisaran 5,5 persen...

**Perkiraan potensi produksi dapat menyertakan harga-harga komoditas...**

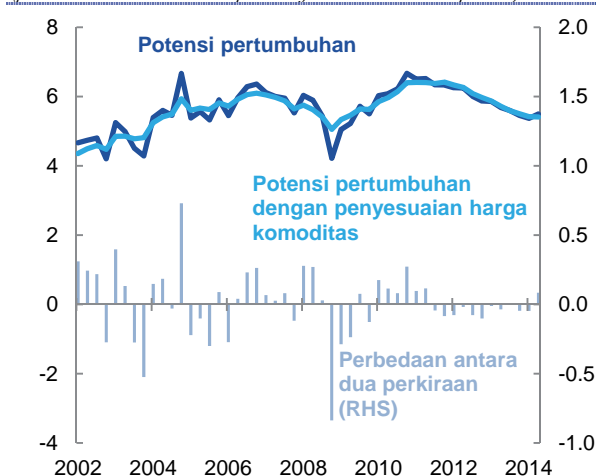
Sejauh mana penurunan yang belakangan terjadi pada pertumbuhan PDB dapat dikaitkan dengan penurunan pertumbuhan berkelanjutan dan seberapa banyak terhadap komponen pertumbuhan siklikal? Untuk menjawab pertanyaan ini, staf Bank Dunia menggunakan model komponen multivariat yang tidak diamati untuk memperkirakan potensi pertumbuhan produksi (Kotak 5). Pada spesifikasi kedua dari model tersebut, indeks harga dari lima komoditas ekspor utama Indonesia disertakan dalam persamaan untuk kesenjangan produksi. Modifikasi ini memungkinkan pemisahan pengaruh siklikal dari harga komoditas dengan dampaknya terhadap potensi pertumbuhan.

...dan penyertaan itu menunjukkan bahwa dampak harga komoditas terhadap pertumbuhan berkelanjutan Indonesia cukup signifikan...

Hasilnya menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan produksi di Indonesia bervariasi dengan harga komoditas, meningkat pada tahun-tahun yang melonjak, dan menurun pada waktu penyusutan (Gambar 30). Ketika informasi harga komoditas disertakan, laju perkiraan pertumbuhan yang berkelanjutan mengalami fluktuasi yang lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya. Pada sejumlah periode, perbedaan tersebut cukup besar, mencapai 0,8 poin persentase bila disetahunkan pada waktu krisis keuangan dunia. Pada periode yang terakhir, perkiraan tersebut menunjukkan bahwa laju potensi pertumbuhan Indonesia yang disesuaikan dengan harga komoditas melambat dari 6,4 persen pada tahun 2011 menjadi 5,5 persen pada tahun 2014.

**Gambar 30: Potensi pertumbuhan melambat sejak tahun 2012**

(pertumbuhan kuartalan pada laju disetahunkan, persen)



Catatan: Grafik batang menunjukkan perbedaan (dalam poin persentase) antara perkiraan potensi pertumbuhan yang memperhitungkan dengan yang tidak memperhitungkan peran harga komoditas

Sumber: BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

c. ...yang menunjukkan bahwa percepatan kembali pertumbuhan akan membutuhkan dorongan dari kebijakan

...menambah bukti bahwa percepatan kembali pertumbuhan yang berkelanjutan akan membutuhkan kemajuan reformasi yang signifikan

Perkiraan terkini Bank Dunia tentang potensi pertumbuhan produksi di Indonesia, dengan memperhitungkan harga komoditas yang lebih rendah, adalah sekitar 5,5 persen per tahun. Angka ini mengikuti satu dekade yang mana potensi pertumbuhan diperkirakan sebesar 6 persen atau lebih. Hal ini juga menunjukkan bahwa porsi yang cukup besar dari perlambatan pertumbuhan yang belakangan terjadi (menjadi 5,0 persen pada kuartal empat 2014, lihat Bagian A) dapat dikaitkan dengan penurunan laju pertumbuhan berkelanjutan. Karenanya, penyusun kebijakan sebaiknya tidak memproyeksikan pertumbuhan untuk kembali meningkat secara mudah ke 6-7 persen, seperti yang tercatat pada periode tahun 2010-2012. Akan dibutuhkan reformasi dan penerapan kebijakan secara besar-besaran, termasuk dalam bidang-bidang perizinan investasi seperti dibahas pada Bagian B.2, karena jumlah dan kualitas pengeluaran investasi merupakan faktor penentu pertumbuhan yang sangat penting. Selain itu, seperti dibahas pada Bagian C, tantangan pada sektor komoditas dapat menjadi rintangan berkelanjutan yang menghadang pertumbuhan.

**Kotak 5: Memperkirakan hasil potensi pertumbuhan di Indonesia**

Bagaimana potensi produksi diukur? Tidak seperti PDB aktual, yang dihitung dengan menggunakan survei rumah tangga, anggaran Pemerintah, laporan keuangan BUMN dan perusahaan swasta, dll., pengukuran potensi produksi merupakan suatu tantangan karena tidak menggunakan pengamatan. Pendekatan untuk memperkirakan potensi produksi bervariasi dari metode statistika univariat hingga model-model struktural. Filter *Hodrick-Prescott* (HP) dan model komponen tidak diamati termasuk ke dalam kelompok teknik perkiraan yang pertama. Keunggulan utamanya adalah kebutuhan data yang tidak besar (hanya deret waktu (*time series*) dari PDB), transparansi, dan kesederhanaan. Metode-metode tersebut menyaring komponen tren dari PDB (potensi produksi) dari yang bersifat siklikal (kesenjangan produksi) pada suatu frekuensi tertentu hanya berdasarkan pada perilaku statistik dari deret PDB tersebut. Kekurangan utama dari metode yang sepenuhnya statistika ini adalah tidak disertakannya informasi ekonomi apapun.

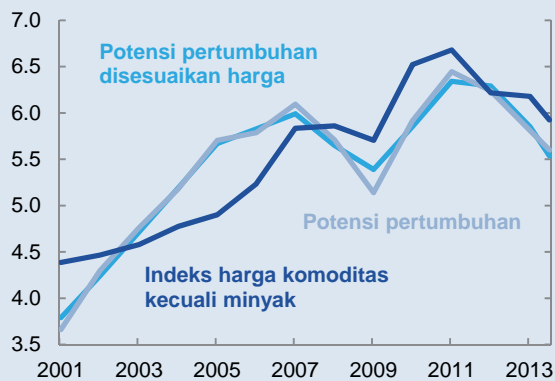
Berbeda dengan filter univariat, filter multivariat menggabungkan pendekatan statistika dengan hubungan ekonomi struktural. Salah satu hubungan tersebut adalah kurva Phillips, yang menguraikan hubungan yang positif antara (perkiraan) inflasi dan tingkat produksi aktual. Kurva Phillips menyajikan informasi tentang sisi penawaran ekonomi dan tahapan siklus usaha. Mengikuti Gerlach dan Smets (1999)<sup>1</sup>, staf Bank Dunia memperkirakan model komponen multivariat yang tidak diamati untuk Indonesia dengan data mulai tahun 2000. Selain kurva Phillips, model itu juga menyertakan persamaan permintaan agregat yang terkait dengan kesenjangan produksi terhadap suku bunga riil. Perkiraan itu menunjukkan bahwa potensi produksi Indonesia terus meningkat pasca krisis keuangan Asia (Gambar 31). Pertumbuhan itu mengikuti tren harga komoditas, mencapai 6,1 persen pada tahun 2007 pada puncak lonjakan harga komoditas. Setelah penurunan yang terkait dengan krisis keuangan dunia pada tahun 2008-2009, potensi produksi kembali meningkat menjadi 6,4 persen pada tahun 2011 dengan didorong oleh kuatnya harga komoditas.

Lebih jauh lagi, dan dengan menerapkan ide dari Borio, Disyatat dan Juselius (2013)<sup>2</sup>, suatu indeks lima harga komoditas ekspor utama Indonesia dapat disertakan ke dalam persamaan permintaan agregat. Cukup bisa diperkirakan bahwa siklus komoditas akan dapat memperkuat siklus usaha Indonesia dengan mendorong tingkat produksi sementara (lihat Bagian A). Perkiraan model itu menunjukkan hal ini: pada masa kenaikan (penurunan) harga komoditas yang tajam, harga komoditas potensi produksi netral meningkat pada laju yang lebih lambat (lebih cepat) dibanding dengan potensi produksi yang tidak disesuaikan (Gambar 31). Sebagai contoh, selama krisis keuangan dunia, harga komoditas yang disesuaikan dengan potensi produksi berada pada 5,4 persen, lebih tinggi 0,3 poin persentase dibanding perkiraan yang tidak disesuaikan. Menurut pendekatan ini, perkiraan Bank Dunia tentang pertumbuhan potensi produksi sekarang adalah sebesar 5,5 persen.

Selain itu, pendekatan struktural memungkinkan pengukuran potensi produksi dengan memperkirakan model ekonomi struktural. Model-model tersebut memungkinkan penafsiran variabel ekonomi langsung dan sangat berguna untuk analisis kebijakan, namun membutuhkan banyak data, rumit, dan sulit untuk direplikasi. Salah satu metode tersebut adalah pendekatan fungsi produksi (dalam hal ini metode Cobb-Douglas dengan skala pengembalian konstan), yang menguraikan laju pertumbuhan potensi produksi menjadi kontribusi dari faktor-faktor masukan (*input*) berikut: persediaan modal fisik Indonesia, angkatan kerja, rata-rata tahun belajar di sekolah dan kembalinya ke sekolah (digabungkan menjadi “modal manusia”) dan jumlah faktor produktivitas (Gambar 32). Masukan (*input*) yang terakhir dihitung sebagai suatu residual dan secara teoritis mewakili pengaruh perubahan teknologi dan peningkatan efisiensi. Hasil dari upaya pencatatan pertumbuhan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, seperti pada pasar-pasar berkembang (*emerging*) Asia lainnya, akumulasi modal berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan (rata-rata di atas 4 poin persentase) pada tahun 1980an dan 1990an. Pada beberapa tahun terakhir, dengan penurunan laju akumulasi modal (menjadi 2,5 poin persentase dari jumlah pertumbuhan) dibanding dekade yang lalu, bagian yang lebih besar dari potensi produksi (sekitar 1,5 poin persentase) dikaitkan kepada jumlah faktor produktivitas.

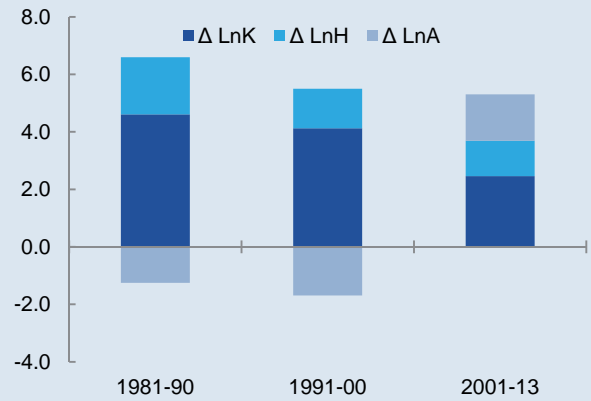


**Gambar 31: Pertumbuhan potensi produksi di Indonesia mengikuti tren harga komoditas secara melekat**  
(pertumbuhan potensi tabunan (LHS), persen; indeks harga komoditas kecuali minyak (RHS), Q1 2010 = 100)



Sumber: BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 32: Pertumbuhan produksi lebih banyak didorong oleh produktivitas dibanding modal fisik sejak tahun 2001**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan tabunan, poin persentase)



Catatan: Perbedaan dalam logaritma alami ( $\Delta \ln$ ) dari K – persediaan modal, H – modal manusia, A – jumlah faktor produktivitas.

Sumber: Barro dan Lee (2010); BPS; Dewan Konferensi; UN; Van der Eng (2008); Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>1</sup> Gerlach, S. dan Smets, F., 1999, "Output gaps and monetary policy in the EMU area", European Economic Review 43. hal. 801-812.  
<sup>2</sup> Pengarang menyertakan variabel keuangan dalam filter multivariat mereka: Borio, C., Disyatat, P. and Juselius, M., 2013, "Rethinking potential output: Embedding information about the financial cycle", BIS Working Papers No 404.

## C. Indonesia 2016 dan selanjutnya: Tinjauan pilihan

### 1. Memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan Indonesia

Sumber daya alam yang berlimpah<sup>33</sup> sangat menguntungkan Indonesia ketika harga komoditas melonjak naik, namun kini lonjakan harga telah berakhir dan prospek jangka menengah terlihat menantang

Indonesia memiliki kekayaan alam hidrokarbon (batubara, minyak dan gas alam), mineral (logam dasar dan logam mulia<sup>34</sup>) dan juga komoditas pertanian yang melimpah (Tabel 8). Kenaikan harga komoditas yang signifikan dari tahun 2002 hingga 2012 mendorong kontribusi yang positif dari sektor sumber daya alam ke pertumbuhan PDB nominal, ekspor dan investasi selama dekade yang lalu. Namun dampak sektor tersebut terhadap pertumbuhan produksi (*output*) riil, penerimaan negara dan pembangunan di daerah ternyata lebih terbatas. Bagian ini melihat evolusi sektor sumber daya alam selama lonjakan harga komoditas (*commodity boom*) dari tahun 2002 hingga 2012, dampak terhadap sumber daya manusia dan ekonomi makro, prospek jangka menengah untuk sektor tersebut, dan menutup pembahasan dengan bidang kebijakan yang perlu ditangani untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi pembangunan Indonesia.

**Tabel 8: Sumber daya alam berkontribusi secara signifikan kepada ekspor, penerimaan dan produksi (*output*)**

Kontribusi terhadap total (persen), 2012	Ekspor	Penerimaan pemerintah	PDB
<b>I. Sumber daya alam – migas dan pertambangan</b>	<b>39,0</b>	<b>28,0</b>	<b>16,5</b>
<b>Komoditas energi</b>	<b>31,0</b>	<b>26,0</b>	<b>10,7</b>
Minyak mentah	6,5	13,9	3,5 <sup>35</sup>
Gas alam	10,8	8,1	
Batubara	13,8	4,0 <sup>36</sup>	7,2
<b>Komoditas mineral non-energi</b>	<b>7,5</b>	<b>2,0</b>	<b>5,8</b>
Timah	1,2	N/A <sup>37</sup>	
Nikel	1,3		
Tembaga	1,4		
Emas	1,2		
Lain-lain (bijih besi, timah hitam)	2,4		
<b>II. Sumber daya alam – kehutanan dan perikanan</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>7,0</b>
<b>III. Komoditas pertanian</b>	<b>12,5</b>	<b>1,6</b>	<b>13,8<sup>38</sup></b>
Minyak kelapa sawit mentah ( <i>crude palm oil</i> , CPO)	6,5	N/A <sup>39</sup>	
Karet	4,2		
Lain-lain (termasuk kakao, kopi, teh)	1,8		
<b>JUMLAH</b>	<b>53,8</b>	<b>30,1</b>	<b>37,3</b>

Catatan: \*Penerimaan termasuk pajak (pajak ekspor dan penghasilan) dan bukan pajak (bagi hasil, royalti, ongkos).

Sumber: BPS; BI; Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>33</sup>Bagian ini memfokuskan kepada sektor sumber daya alam migas dan pertambangan (batubara dan mineral termasuk tembaga, emas, nikel, timah, bauksit, besi) dan tidak menyertakan analisis kehutanan dan perikanan.

<sup>34</sup>Logam dasar: timah, tembaga, nikel dan aluminium. Logam mulia: emas, perak dan platina.

<sup>35</sup>Pemisahan antara gas alam dan minyak mentah tidak tersedia.

<sup>36</sup>Bank Dunia mengasumsikan 95 persen PNPB pertambangan adalah batubara dan 50 persen pajak pertambangan adalah batubara.

<sup>37</sup>Pemisahan penerimaan pertambangan bukan batubara dan PDB menurut jenis mineral tidak tersedia.

<sup>38</sup>Termasuk komoditas pertanian mentah (CPO, karet) dan sudah diproses (mis. produk karet).

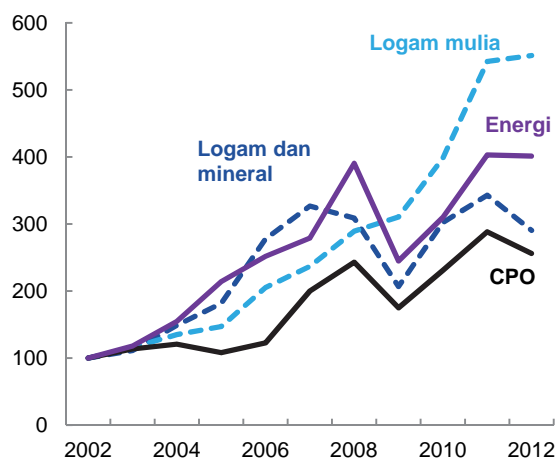
<sup>39</sup>Mayoritas penerimaan komoditas pertanian berasal dari pajak ekspor CPO.

## a. Evolusi produksi sektor sumber daya alam selama lonjakan harga

**Didorong kenaikan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dari Cina, dan tidak elastisnya pasokan jangka pendek, dekade awal tahun 2000an mencatat lonjakan naik harga komoditas dunia...**

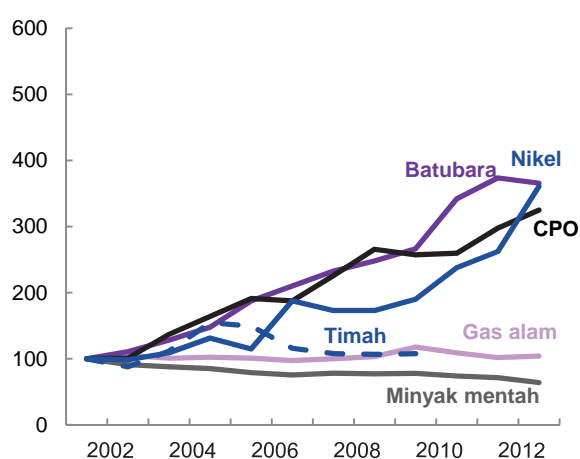
Dari tahun 2002 ke 2012, PDB ekonomi pasar berkembang (*emerging*) dan produksi industri masing-masing tumbuh dengan laju rata-rata sebesar 6,3 dan 7,8 persen. PDB dan produksi industri Cina meningkat lebih cepat dengan laju rata-rata sebesar 10,6 dan 14,7 persen,<sup>40</sup> yang mendorong kenaikan berlipat ganda dalam permintaan komoditas. Sebagai contoh, pada tahun 2012, Cina mengkonsumsi hampir setengah dari 91 juta ton logam yang diproduksi di seluruh dunia, naik dari hanya 15 persen pada tahun 2000. Kenaikan permintaan yang cepat ini mempengaruhi tidak elastisnya penawaran jangka pendek, terutama logam-logam dasar<sup>41</sup>, sehingga mendorong kenaikan harga komoditas. Semua indeks harga komoditas dunia mencatat kenaikan yang signifikan antara tahun 2002 dan 2012: indeks nominal energi global (batubara, minyak mentah dan gas alam) meningkat empat kali lipat; indeks harga nominal logam dan mineral meningkat tiga kali lipat; indeks logam mulia (termasuk emas) meningkat enam kali lipat; dan komoditas pertanian seperti CPO meningkat tiga kali lipat (Gambar 33).<sup>42</sup>

**Gambar 33: Harga komoditas energi dan non-energi dunia meningkat signifikan antara 2002 dan 2012...**  
(indeks harga dolar AS, 2002 = 100)



Sumber: Database Komoditas Bank Dunia

**Gambar 34: ...mendorong kenaikan yang signifikan dalam produksi sejumlah komoditas Indonesia**  
(indeks produksi, 2002 = 100)



Catatan: Statistik produksi konsentrat timah tersedia hingga 2010.  
Sumber: BPS, ESDM, ITRI, perhitungan staf Bank Dunia

**...mendorong naik produksi dan ekspor komoditas Indonesia**

Kenaikan harga mendorong peningkatan produksi yang besar bagi sejumlah komoditas di Indonesia, terutama untuk ekspor. Peningkatan yang paling drastis tercatat untuk batubara dan minyak sawit, yang hampir mencapai empat kali lipat, dan nikel, dengan lonjakan hampir tiga kali lipat, dalam volume produksi selama periode tahun 2002 hingga 2013 (Gambar 34). Sebaliknya, produksi minyak mentah menurun 35 persen, dan produksi gas dan timah tetap mendatar. Dalam hal nikel dan timah, hampir seluruh produksi diekspor, baik dalam bentuk mentah maupun terproses, dan untuk batubara bagian yang diekspor mengalami peningkatan, dari 72 persen pada tahun 2002 menjadi 80 persen pada tahun 2013. Sebaliknya, bagian penjualan dalam negeri untuk gas alam meningkat dari 25 persen pada tahun 2002

<sup>40</sup> Sumber: Prospek Komoditas Bank Dunia, Oktober 2014.

<sup>41</sup> Ketidakelastisan penawaran ini karena jeda waktu dalam proyek-proyek yang beralih dari eksplorasi ke produksi. Misalnya, untuk timah, median interval untuk proyek besar yang beralih dari pra-kelayakan ke persiapan produksi adalah 12 tahun, menurut Institut Penelitian Timah Internasional (*International Tin Research Institute, ITRI*).

<sup>42</sup> Sumber: Database Komoditas Bank Dunia, Januari 2015.

menjadi 50 persen pada tahun 2013, yang didorong oleh kenaikan penggunaan gas untuk pembangkit listrik dalam negeri dan pelaksanaan kewajiban pasokan untuk pasar domestik.

**Kenaikan produksi ini juga didorong oleh peningkatan izin pertambangan yang diterbitkan di tingkat daerah, yang juga meningkatkan pangsa pasar bagi produsen yang lebih kecil**

UU Pertambangan Indonesia yang baru, diterbitkan pada tahun 2009, pada dasarnya mengganti sistem konsesi berdasar kontrak yang diterbitkan pada tingkat pusat dengan sistem konsesi berdasar izin dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pada tingkat daerah. Hal ini mendorong peningkatan penerbitan IUP batubara dan pertambangan sejak tahun 2009 hingga 2012, ketika moratorium untuk izin baru diberlakukan. Perkiraan menunjukkan jumlah izin meningkat hingga sepuluh kali lipat hingga 11.000 pada 2014,<sup>43</sup> yang mendorong naiknya produksi oleh produsen yang lebih kecil, karena ukuran konsesi maksimal dari IUP, yaitu 25.000 hektar, adalah jauh lebih kecil dibanding ukuran rata-rata konsesi dengan kontrak, yaitu 200.000 hektar. Pangsa pasar produsen batubara yang lebih kecil meningkat dari 26 persen pada tahun 2005 menjadi 37 persen pada tahun 2012.

**Sektor ini juga mencatat pergeseran menuju kepemilikan dalam negeri**

Pertamina (BUMN) meningkatkan pangsa pasarnya dari 13 persen pada tahun 2005 menjadi 23 persen pada tahun 2012 untuk minyak mentah dan dari 12 persen pada tahun 2005 menjadi 18 persen pada tahun 2012 untuk gas alam, melalui modal ventura dan akuisisi saham dalam kontrak bagi hasil (PSC) yang mendekati perpanjangan.<sup>44</sup> Komoditas utama lainnya juga kini didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki dalam negeri; pada tahun 2012, hampir 100 persen dari produksi timah, 95 persen produksi batubara termal dan 80 persen dari produksi nikel, datang dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh dalam negeri.

#### **b. Kontribusi sektor sumber daya alam terhadap hasil sumber daya manusia dan ekonomi makro selama lonjakan komoditas**

**Pertumbuhan sektor sumber daya alam berdampak besar terhadap pertumbuhan PDB nominal, namun dampak langsung ke pertumbuhan PDB riil hanya kecil...**

Sektor sumber daya alam berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan PDB nominal sebesar 14,5 persen antara tahun 2002 dan 2012 (Gambar 35).<sup>45</sup> Selain itu, korelasinya – termasuk keterkaitan langsung dan tidak langsung – antara pertumbuhan PDB nominal dan harga komoditas (sektor sumber daya alam dan pertanian) – menguat sejalan dengan waktu, meningkat dua kali lipat selama periode tahun 2007-13, dibandingkan periode tahun 2003-06. Berbeda dengan pertumbuhan PDB nominal, sektor sumber daya alam hanya mendorong 2 persen pertumbuhan PDB riil selama periode tahun 2002 hingga 2012, melemah ke 1 persen sejak tahun 2012 (Gambar 36). Kecilnya kontribusi langsung ke pertumbuhan PDB disebabkan karena pertumbuhan dalam sektor itu adalah dalam harga, ketimbang dalam produksi dan penambahan nilai riil.

**...sementara sektor ini memiliki dampak tidak langsung dengan mendorong permintaan agregat, dan pada tertentu melalui hubungan**

Pertumbuhan nominal dalam sektor komoditas memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan, keuntungan dan kekayaan perusahaan, dan juga pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya mendorong permintaan agregat di dalam ekonomi. Namun sektor komoditas tampaknya memiliki keterkaitan produksi yang terbatas dengan sektor-sektor lain di dalam ekonomi. Tabel masukan-keluaran (*input-output*) menunjukkan bahwa peningkatan permintaan final untuk komoditas mentah sebesar Rp 1, termasuk komoditas sumber daya alam dan pertanian, hanya terkait dengan peningkatan Rp 1,5 dalam produksi (*output*) untuk semua sektor dalam

<sup>43</sup> 2014/15 Indonesia Coal Book, Petromindo.

<sup>44</sup> Data tentang struktur produksi hanya tersedia setelah 2005, dan berasal dari laporan statistik pertambangan tahunan ESDM untuk batubara, dan laporan tahunan SKK Migas untuk minyak mentah.

<sup>45</sup> Sektor komoditas pertanian, terutama CPO, berkontribusi tambahan 11 persen ke pertumbuhan PDB nominal antara tahun 2002 dan 2012.

<b>produksi ke sektor-sektor lain</b>	perekonomian, yang lebih rendah dibanding sektor-sektor lain seperti manufaktur (peningkatan Rp 2,5). <sup>46</sup>
<b>Sektor sumber daya alam memiliki dampak positif terhadap neraca eksternal selama lonjakan komoditas</b>	Kondisi perdagangan Indonesia meningkat sebesar 74 persen dari tahun 2002 hingga 2013, terutama didorong oleh kenaikan harga ekspor komoditas. Komoditas sumber daya alam dan komoditas pertanian secara bersama-sama berkontribusi 7,6 poin persentase kepada rata-rata pertumbuhan ekspor nominal tahunan dari tahun 2002 hingga 2013, dibanding hanya 3,6 poin persentase dari manufaktur (Gambar 37). <sup>47</sup> Kenaikan ekspor bersih komoditas Indonesia berperan dalam menjaga keseluruhan neraca perdagangan barang dalam keadaan surplus (Gambar 38), dengan rata-rata neraca perdagangan komoditas pada 6,1 persen dari PDB dari tahun 2002 hingga 2013, sementara rata-rata neraca non-komoditas hanya pada 0,2 persen dari PDB. Kebergantungan terhadap ekspor komoditas untuk membayar impor yang umumnya bukan komoditas sepertinyat sejalan dengan keunggulan komparatif Indonesia, namun membuat ekonomi menjadi rentan terhadap gejolak harga komoditas (lihat Kotak 2, dan Bagian A, Nomor 7).
<b>Berbeda dengan sektor sumber daya alam secara keseluruhan, minyak mentah membawa dampak yang negatif terhadap neraca perdagangan</b>	Produksi minyak mentah Indonesia menurun pada dekade yang lalu, dari 1,26 juta barel pada tahun 2002 menjadi 861.000 barel per hari pada tahun 2012, sementara konsumsi minyak mentah, yang didorong oleh konsumsi BBM pada sektor transportasi, meningkat dengan cepat (Gambar 39). Karenanya Indonesia menjadi importir bersih minyak mentah pada tahun 2004 (Gambar 40) dan keluar dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak ( <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i> , OPEC) pada tahun 2008. Bersama-sama dengan tingginya harga minyak mentah secara historis pada tahun 2000an, hal ini mendorong pelebaran defisit perdagangan minyak menjadi 23 miliar dolar AS pada tahun 2012 (Gambar 43). Sejak tahun 2012, walau dengan menurunnya harga minyak, defisit perdagangan minyak terus meningkat, hingga 25 miliar dolar AS pada 2014, yang mencerminkan penurunan berkelanjutan produksi minyak dan peningkatan konsumsi BBM.
<b>Kenaikan penerimaan dan keuntungan perusahaan berkontribusi pada kenaikan signifikan di pasar saham</b>	Kenaikan indeks harga ekuitas pertambangan <sup>48</sup> sebesar dua puluh kali lipat dari akhir tahun 2002 ke akhir tahun 2012 berkontribusi kepada peningkatan sepuluh kali lipat pada indeks ekuitas secara keseluruhan. Karena kenaikan harga ekuitas yang besar tersebut, dan penerbitan ekuitas baru, kapitalisasi pasar ekuitas dalam negeri meningkat dari 16 persen dari PDB pada tahun 2000-02 menjadi 49 persen dari PDB pada tahun 2010-12. Sektor pertambangan dan pertanian memberikan sekitar seperlima kontribusi langsung kepada peningkatan ini.
<b>Lonjakan komoditas juga mendukung peningkatan besar rasio investasi terhadap PDB</b>	Setelah turun drastis setelah krisis tahun 1997/98, rasio investasi-terhadap-PDB Indonesia pulih dengan kuat, meningkat hingga 32 persen pada tahun 2012. Sementara sebagian besar peningkatan itu berasal dari kenaikan harga investasi, pertumbuhan investasi riil mencatat nilai rata-rata tahunan sebesar 8,4 persen selama periode 2008-12. Hal ini mencerminkan investasi yang lebih tinggi dalam sektor-sektor komoditas karena peningkatan pengembangan pada sektor-sektor tersebut, dan juga kenaikan investasi pada sektor-sektor non-komoditas, termasuk karena peningkatan jumlah dana yang dapat ditanamkan dari keuntungan sektor terkait

<sup>46</sup> Perhitungan berdasarkan tabel *input-output* yang paling akhir (2008).

<sup>47</sup> Di dalam kelompok komoditas, sektor sumber daya alam berkontribusi rata-rata 3,7 poin persentase secara tahunan sementara komoditas pertanian berkontribusi 3,9 poin persentase kepada pertumbuhan ekspor nominal. Manufaktur berbasis komoditas tidak termasuk.

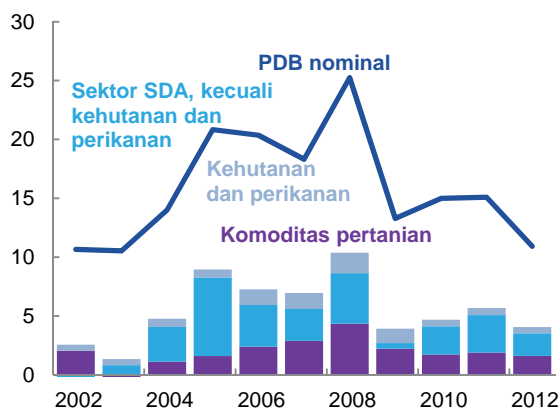
<sup>48</sup> Indeks harga ekuitas pertambangan hanya menyertakan saham-saham perusahaan pertambangan (komoditas batubara dan mineral) dan tidak menyertakan perusahaan-perusahaan migas.

dengan sumber daya alam. Namun sebagian besar investasi ditanamkan pada konstruksi ketimbang infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas.

**Sektor pertumbuhan<sup>49</sup> menarik PMA, umumnya ke proyek yang telah ada**

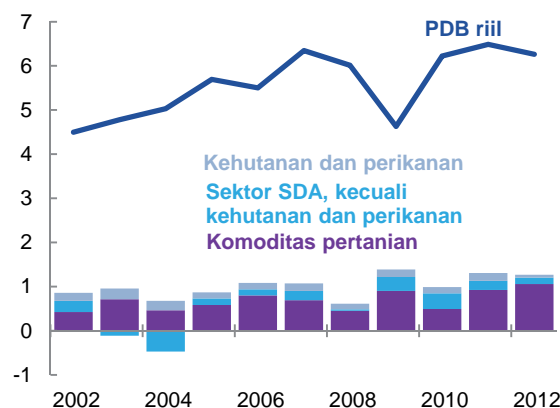
Pada periode tahun 2009 hingga 2013, penanaman modal asing (PMA) dalam non-migas meningkat 14 kali lipat dari 330 juta dolar AS ke 4,8 miliar dolar AS. Namun sebagian besar PMA tersebut merupakan investasi dalam operasi proyek-proyek yang telah ada sebelumnya (*brown-field*), seperti investasi untuk tambang tembaga Grasberg, ketimbang pengembangan proyek-proyek yang baru (*green-field*).

**Gambar 35: Sektor sumber daya alam berkontribusi signifikan pada pertumbuhan PDB nominal...**  
(kontribusi pertumbuhan nominal tahun-ke-tahun, poin persentase)



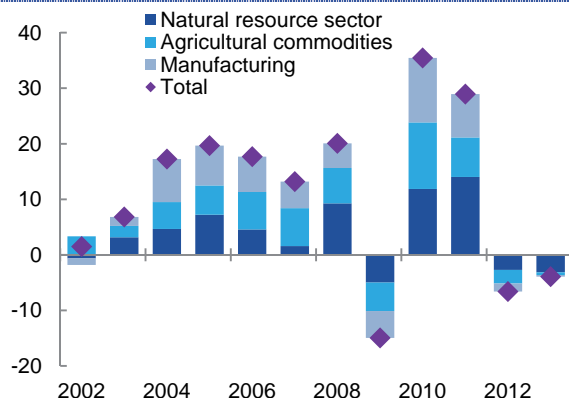
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 36: ...namun kontribusi sektor sumber daya alam ke pertumbuhan PDB riil tidak besar**  
(kontribusi pertumbuhan nominal tahun-ke-tahun, poin persentase)



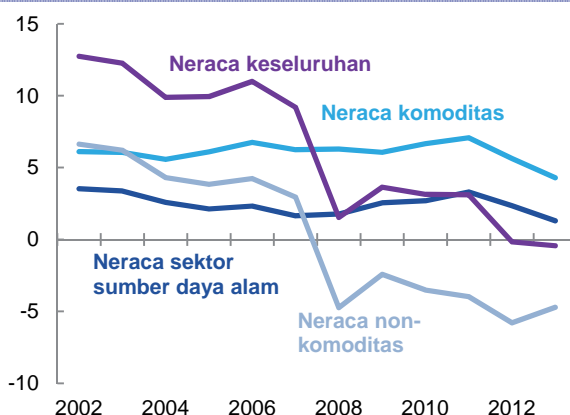
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 37: Kontribusi komoditas ke kenaikan ekspor melampaui kontribusi dari produk manufaktur**  
(kontribusi ke pertumbuhan ekspor nominal, poin persentase)



Sumber: WITS; perhitungan staf Bank Dunia

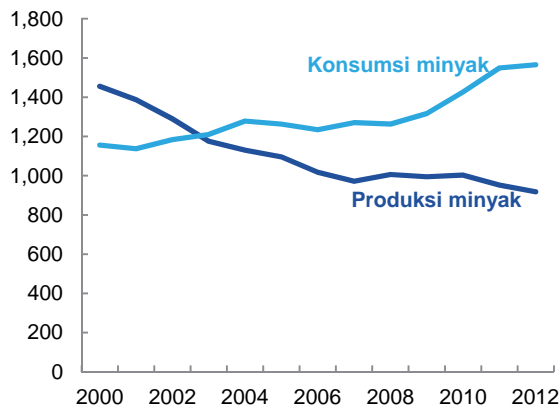
**Gambar 38: Komoditas, termasuk sumber daya alam, mendukung keseluruhan neraca perdagangan**  
(persen PDB nominal)



Sumber: WITS; perhitungan staf Bank Dunia

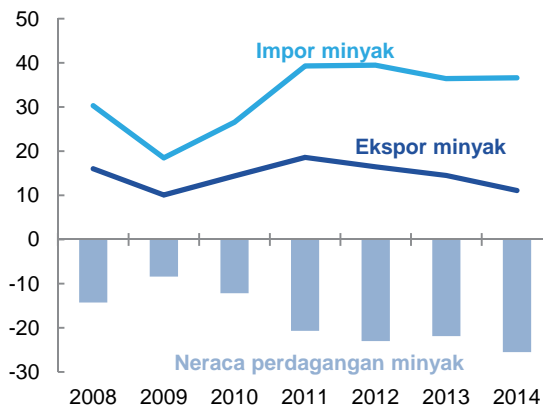
<sup>49</sup> Data FDI yang akurat untuk sektor migas dari tahun 2002 hingga 2013 tidak tersedia. Namun tren penurunan eksplorasi minyak dan mendatarnya eksplorasi gas menunjukkan bahwa FDI pada sektor migas mungkin tidak meningkat secara signifikan pada periode tersebut.

**Gambar 39: Indonesia menjadi importir bersih minyak sejak tahun 2004...**  
(produksi dan konsumsi minyak mentah barian, ribu barel)



Sumber: BP Statistical Review of World Energy; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 40: ...dan defisit minyak melebar hingga 2014, didorong oleh kenaikan harga minyak mentah**  
(ekspor, impor, neraca perdagangan minyak, nominal miliar dolar AS)

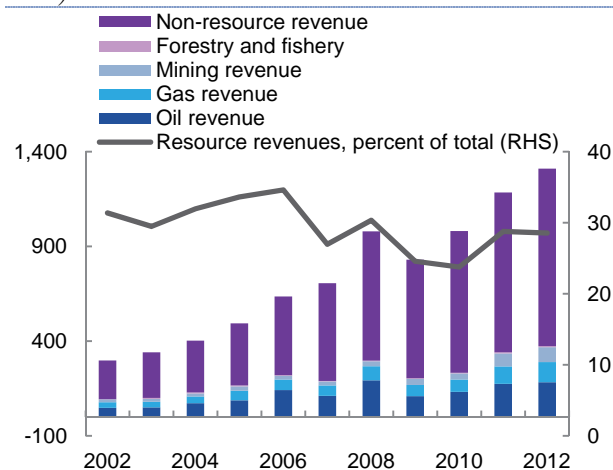


Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Walaupun sektor sumber daya alam tetap penting bagi penerimaan negara, kontribusinya terhadap total penerimaan semakin menurun

Penerimaan sumber daya alam dari pajak dan bukan pajak<sup>50</sup> mencatat penurunan sebagai bagian dari total penerimaan, dari 31,4 persen pada tahun 2002 ke 28 persen pada 2012 (penerimaan minyak turun dari 16,1 persen ke 13,9 persen, penerimaan gas turun dari 9,9 persen ke 8,1 persen pada 2012, sementara penerimaan pertambangan sedikit meningkat dari 5,2 persen ke 6,0 persen) (Gambar 41). Faktor utama penentu penerimaan migas adalah nilai bruto produksi migas dalam rupiah dan bagian efektif pemerintah pada nilai produksi tersebut.<sup>51</sup> Nilai bruto produksi migas menurun sebagai bagian dari PDB pada periode tahun 2002 hingga 2012 dengan penurunan produksi secara sebagian mengimbangi kenaikan harga migas dan depresiasi rupiah.

**Gambar 41: Bagian sektor sumber daya alam dalam penerimaan negara mengalami penurunan**  
(penerimaan fiskal, miliar Rp, LHS; bagian penerimaan negara, RHS)



Sumber: Kemenkeu; perhitungan staf Bank Dunia

Lemahnya kepatuhan menjadi permasalahan, terutama pada sektor batubara

Tingkat kenaikan penerimaan pertambangan tidak sebanding dengan peningkatan pada nilai produksi, yang menunjukkan kebocoran dari lemahnya kepatuhan (*compliance*). Hal ini terutama terlihat pada sektor batubara, dengan kenaikan harga dan produksi yang mencapai rata-rata 14 persen per tahun selama periode tahun 2002 hingga 2012, yang seharusnya memberikan kenaikan 30 persen dalam

<sup>50</sup> Terutama volume migas yang diserahkan ke negara, dan royalti produksi untuk batubara dan mineral.

<sup>51</sup> Kontrak bagi hasil (PSC) mengharuskan kontraktor untuk membayar royalti yang terkait dengan nilai bruto produksi dalam rupiah dan juga menyeter pajak penghasilan badan.

penerimaan yang terkait dengan batubara, dengan tidak adanya perubahan peraturan fiskal yang besar. Namun penerimaan dari penjualan batubara hanya meningkat sebesar 18 persen per tahun selama periode tahun 2002 hingga 2012 tersebut. Suatu penelitian bersama yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Kementerian Keuangan tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dengan fokus pada batubara, memperkirakan bahwa 22 hingga 46 persen potensi PNBP (Rp 16-51 triliun) dari pelaporan penjualan batubara tidak dipungut pada periode tahun 2010-12 karena lemahnya kepatuhan.

**Pekerjaan di sektor sumber daya alam memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi dibanding sektor primer lainnya, dengan upah yang lebih tinggi namun jumlahnya terbatas**

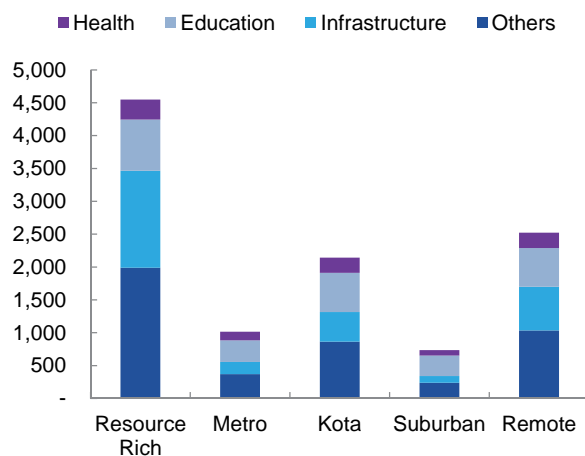
Pada tahun 2010, rata-rata upah bulanan adalah Rp 2,5 juta untuk sektor sumber daya alam, dibanding Rp 1,2 juta untuk sektor sekunder dan Rp 1,5 juta untuk sektor tersier. Di dalam sektor primer, sektor sumber daya alam juga memiliki persentase tertinggi pekerja dengan pendidikan sekolah menengah atas, berjumlah 28 persen dari jumlah pekerja dibanding 9 persen pada pertanian tanaman bukan pangan dan 10 persen bagi pertanian tanaman pangan. Lapangan pekerjaan meningkat pada sektor itu selama masa lonjakan harga namun karena merupakan sektor yang padat modal, sektor itu secara langsung hanya berkontribusi 1,2 persen dari keseluruhan jumlah tenaga kerja pada tahun 2010, dibanding kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 9,5 persen.

**Lonjakan itu mendorong penerimaan yang signifikan pada daerah yang kaya sumber daya alam namun tidak mendorong hasil-hasil pembangunan**

Lonjakan komoditas tersebut mendorong kenaikan penerimaan sumber daya alam sebesar 43 persen antara tahun 2007 hingga 2011 yang dibagi dengan daerah, dimana daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam<sup>52</sup> menerima dua kali lipat sumber daya fiskal per kapita – mencapai Rp 4 juta dibanding Rp 2 juta untuk daerah-daerah yang lain (Gambar 42). Namun walau dengan kenaikan tingkat belanja per kapita untuk memberikan layanan masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, air dan sanitasi, daerah-daerah kaya sumber daya alam tersebut ternyata memiliki beberapa indikator hasil layanan yang paling buruk, dibanding daerah terpencil secara geografis, terutama untuk jalan daerah beraspal, akses kepada air dan sanitasi, dan tenaga terlatih untuk membantu persalinan (Gambar 43).

**Gambar 42: Daerah kaya sumber daya alam memiliki sumber daya fiskal terbesar berkat bagi hasil...**

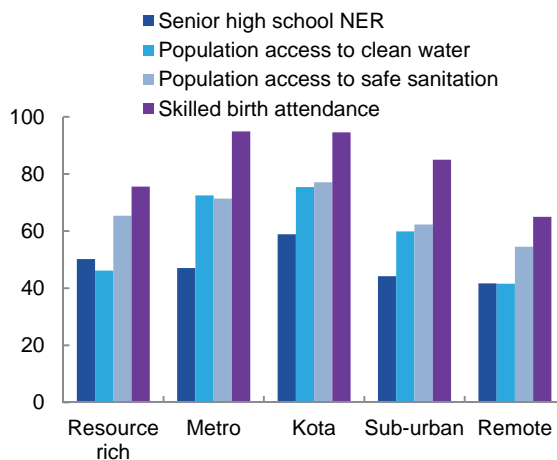
*(belanja per kapita per sektor pada tahun 2009, nominal ribu Rp)*



Sumber: Database DAPOER Bank Dunia

**Gambar 43: ...namun memiliki hasil layanan publik yang buruk, termasuk akses ke layanan dasar**

*(akses ke layanan dasar pada tahun 2009, persen populasi)*



Sumber: Database DAPOER Bank Dunia

<sup>52</sup> Daerah kaya sumber daya alam didefinisikan sebagai daerah yang mendorong 10 persen atau lebih PDB daerahnya dari komoditas, termasuk sektor sumber daya alam dan komoditas pertanian.



## c. Pasca masa lonjakan harga: prospek jangka menengah yang menantang

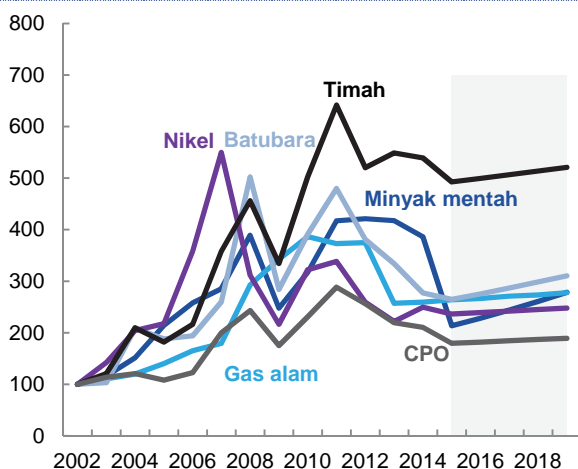
**Harga komoditas sumber daya alam Indonesia diproyeksikan akan terus melemah**

Harga ekspor sumber daya alam Indonesia telah menurun secara signifikan dari nilai puncaknya, dengan penurunan harga batubara sebesar 45 persen, penurunan harga minyak mentah yang melampaui 50 persen dan penurunan indeks harga logam dan mineral sebesar 25 persen dari tahun 2011 hingga akhir tahun 2014 (Gambar 44). Dalam jangka menengah, harga batubara internasional diproyeksikan akan sedikit meningkat dari tingkat akhir 2014 menjadi 79 dolar AS per ton pada tahun 2019, masih 35 persen di bawah nilai puncaknya pada akhir tahun 2011. Proyeksi harga minyak mentah, gas alam dan nikel juga diproyeksikan akan sedikit meningkat pada tahun 2019, namun masing-masing masih tetap berada pada 34 persen, 26 persen dan 27 persen di bawah nilai puncaknya pada akhir tahun 2011.

**Penurunan harga bersifat struktural dan didorong oleh penurunan permintaan dunia dan kelebihan pasokan dari proyek yang diprakarsai saat lonjakan harga**

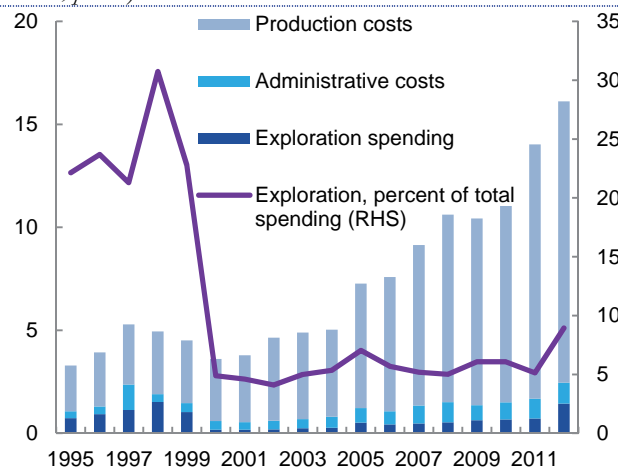
Faktor-faktor utama yang mendorong penurunan batubara, logam dasar dan logam mulai adalah penyusutan permintaan dari Tiongkok dan kelebihan pasokan dari proyek-proyek yang diprakarsai selama lonjakan harga komoditas. Penurunan harga minyak didorong oleh peningkatan dalam pasokan global dari sumber-sumber minyak inkonvensional di Amerika Utara, moderasi permintaan, terutama pada negara-negara OECD dan kurangnya tanggapan pasokan dari OPEC. Harga gas alam cair (*Liquefied Natural Gas*, LNG), yang mana Indonesia merupakan eksportir LNG terbesar ketiga dunia, diperkirakan akan turun mengikuti harga minyak mentah karena kontrak penjualan biasanya mengikuti indeks harga minyak.

**Gambar 44: Harga komoditas menurun sejak tahun 2011 dan diperkirakan tetap rendah hingga tahun 2019**  
(belanja per kapita per sektor pada tahun 2009, nominal ribu Rp)



Sumber: Prospek Komoditas Bank Dunia, Januari 2015

**Gambar 45: Belanja eksplorasi tetap rendah selama lonjakan harga minyak mentah dan gas alam**  
(belanja menurut produsen migas, miliar Rp; bagian jumlah belanja, RHS, persen)



Sumber: SKK Migas; perhitungan staf Bank Dunia

**Prospek jangka menengah produksi migas lemah, karena rendahnya belanja eksplorasi selama masa lonjakan harga komoditas**

Indonesia tidak mencatat peningkatan kegiatan eksplorasi minyak mentah dan gas alam ketika harga-harga komoditas meningkat pada tahun 2000an. Belanja eksplorasi secara keseluruhan menyusut sebesar 50 persen dari puncaknya pada tahun 1998 sampai tahun 2012 (Gambar 45). Selain itu, eksplorasi menjadi lebih mahal karena lapangan baru yang potensial terletak pada daerah lepas pantai. Karenanya Indonesia mencatat penurunan cadangan minyak mentah sebesar 30 persen sejak tahun 1997, dan peningkatan cadangan gas alam hanya sebesar 10 persen pada periode yang sama. Rasio penggantian cadangan (*reserve replacement ratio*) untuk minyak mentah adalah 50 persen pada tahun 2012, yang berarti bahwa untuk setiap 2 barel minyak

Maret 2015

THE WORLD BANK | BANK DUNIA

mentah yang diproduksi di Indonesia, hanya 1 barel yang diganti pada cadangan. Rasio penggantian cadangan untuk gas alam lebih tinggi pada 127 persen, yang mencerminkan kegiatan eksplorasi yang relatif lebih tinggi sejak tahun 2000an.

**Keprihatinan terhadap kontrak bagi hasil dan pemulihan biaya berkontribusi terhadap perlambatan dalam eksplorasi migas**

Survei tahunan PwC<sup>53</sup> tentang sektor migas di Indonesia menunjukkan keprihatinan yang meningkat antar investor tentang masa depan kontrak bagi hasil (PSC), yang kini menjadi landasan hukum bagi semua operasi migas besar di Indonesia, dan syarat dan kondisi untuk perpanjangan semua PSC. Lebih dari setengah investor menyatakan tingkat kesakralan kontrak (*contract sanctity*) “sangat penting” pada survei tahun 2012, dibanding hanya 32 persen pada tahun 2008. Selain itu, 48 persen investor menyatakan tingkat ketidakpastian karena pengetatan peraturan *cost recovery* sebagai “sangat penting” di tahun 2012 tersebut, dibanding hanya 37 persen pada tahun 2008 (*cost recovery* adalah aturan pada PSC yang memungkinkan perusahaan untuk mengganti biaya eksplorasi dan pengeluaran lainnya). Keprihatinan tersebut, bersama-sama dengan tantangan peraturan kebijakan dalam perizinan pada berbagai tingkatan pemerintahan (lihat Bagian B.2 tentang perizinan usaha secara umum), berkontribusi terhadap bertahan rendahnya tingkat investasi untuk eksplorasi.

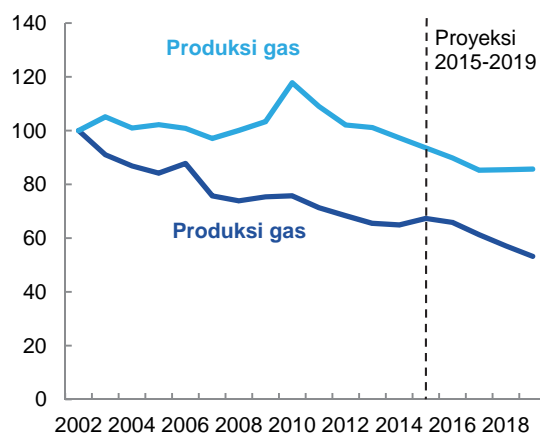
**Penurunan eksplorasi lapangan minyak baru bersama-sama dengan penuaan lapangan minyak yang ada diperkirakan akan mengakibatkan penurunan berkelanjutan dalam produksi minyak dalam jangka menengah**

Mayoritas lapangan minyak di Indonesia telah menua dan membutuhkan metode pemulihan canggih yang mahal untuk meneruskan produksi. Rendahnya investasi eksplorasi telah menurunkan kemungkinan penambahan lapangan-lapangan baru dalam jangka menengah. Selain itu, dengan asumsi waktu yang dibutuhkan (*lead time*) dari eksplorasi ke penemuan dan produksi lapangan-lapangan baru setidaknya 5 tahun, maka walau terdapat penemuan baru dalam waktu dekat, lapangan-lapangan tersebut tampaknya belum akan dapat mengimbangi penurunan produksi dari lapangan-lapangan yang menua dalam jangka menengah. Karenanya proyeksi dasar (*baseline*) adalah berlanjutnya penurunan produksi minyak sebesar 18 persen dari tahun 2014 hingga 2019, dari 818.000 menjadi 670.000 barel per hari (Gambar 46).

**Produksi gas juga dapat menurun karena ketidakpastian**

Kegiatan eksplorasi gas lebih tinggi dibanding minyak dengan kenaikan jumlah sumur gas yang selesai sebanyak sepuluh kali lipat selama periode 2002-2012, yang menunjukkan prospek produksi gas jangka menengah yang lebih positif. Namun investasi di blok-blok gas utama seperti blok gas alam Mahakam<sup>54</sup> telah terhambat

**Gambar 46: Produksi minyak dan gas diperkirakan menurun selama jangka menengah**  
(indeks, 2002 = 100)



Sumber: BPS; Prospek Komoditas Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia dan proyeksi

<sup>53</sup> PriceWaterhouseCoopers Indonesia Oil and Gas Survey, 2008 dan 2012.

<sup>54</sup> Blok Mahakam, yang sebelumnya dioperasikan oleh Total, adalah blok terbesar di Indonesia dengan 25 persen jumlah produksi gas Indonesia pada tahun 2013. PSC-nya akan berakhir pada tahun 2017. Total mengumumkan pada bulan Oktober 2013, bahwa, karena ketidakjelasan dalam perpanjangan PSC, perusahaan akan menunda rencana investasi 7,3 miliar dolar AS untuk periode tahun 2014-17. Periode ketidakpastian tersebut mencatat penurunan produksi sebesar 20 persen dari blok tersebut.

prospek produksi dari blok-blok gas utama

karena berlanjutnya ketidakpastian peraturan perundangan tentang PSC. Ini adalah satu faktor di belakang proyeksi dasar (*baseline*) Bank Dunia akan penurunan produksi gas sebesar 12 persen dari tahun 2014 hingga 2019.

Rendahnya belanja eksplorasi pertambangan mencerminkan lemahnya peraturan perundangan, dan dampak larangan ekspor bijih mineral bulan Januari 2014

Sementara data *time-series* tentang belanja eksplorasi untuk batubara dan mineral-mineral lainnya tidak tersedia, penurunan cadangan mineral yang ada menunjukkan bahwa investasi eksplorasi tidak tinggi. Walau memiliki potensi geologis tinggi, pada tahun 2012 Indonesia menarik kurang dari 1 persen dari belanja eksplorasi mineral dunia.<sup>55</sup> Survei Fraser Institute tentang perusahaan pertambangan dunia tahun 2013 menempatkan Indonesia hampir di peringkat paling bawah dari 96 negara yang disurvei dalam hal lingkungan kebijakan yang kondusif untuk mendukung investasi pada pertambangan non-migas. Pada bulan Januari 2014, pemerintah meluncurkan peraturan yang melarang ekspor nikel dan bauksit yang tidak diproses, dan menetapkan pajak ekspor untuk mineral lain yang belum diproses.<sup>56</sup>

Moderasi harga dan lemahnya prospek produksi diperkirakan terus membebani neraca eksternal

Dominasi komoditas dalam ekspor Indonesia, bersama-sama dengan kejutan negatif keadaan perdagangan karena penurunan harga komoditas sejak medio 2011 dan penurunan permintaan komoditas pada pasar ekspor utama Jepang dan Cina, telah mendorong penurunan ekspor Indonesia sejak tahun 2011 (lihat Bagian A, Kotak 2). Berlanjutnya moderasi dalam harga komoditas, penurunan produksi minyak mentah dan gas dan bertahannya larangan ekspor bijih mineral akan memberikan tekanan kepada neraca luar negeri Indonesia dalam jangka menengah.

Juga terdapat peningkatan tekanan fiskal dari penurunan proyeksi penerimaan yang terkait sumber daya alam

Perbandingan jumlah penerimaan-terhadap-PDB diproyeksikan akan turun dari 15,2 persen pada tahun 2014 menjadi 13,3 persen pada tahun 2019, menurut skenario "*business as usual*" (yaitu tidak adanya reformasi kebijakan penerimaan atau administrasi yang besar).<sup>57</sup> Pajak penghasilan non-migas dan pajak konsumsi diproyeksikan akan meningkat dari 10,0 persen menjadi 10,4 persen dari PDB secara keseluruhan. Kenaikan ini diimbangi oleh proyeksi penurunan yang signifikan (secara absolut dan sebagai bagian dari PDB) dalam penerimaan migas, dari 3,0 persen menjadi 0,8 persen dari PDB, karena proyeksi penurunan dasar penerimaan (nilai produksi bruto migas dalam rupiah). Penurunan harga minyak juga menyusutkan belanja pemerintah untuk BBM (solar, minyak tanah dan LPG) dan subsidi listrik, namun dampak bersih fiskal adalah negatif karena penurunan dalam penerimaan lebih besar dari penghematan dalam pengeluaran.

Secara lebih luas, melemahnya kondisi sektor sumber daya alam diperkirakan akan mempengaruhi

Perlambatan sektor komoditas berkorelasi dengan perlambatan pertumbuhan PDB sejak tahun 2012. Dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi pada daerah-daerah kaya sumber daya alam seperti Aceh, Kalimantan Timur, Papua, Riau dan Papua Barat<sup>58</sup>, yang mengalami laju pertumbuhan PDB riil tahun-ke-tahun

<sup>55</sup> Sumber: Wood Mackenzie.

<sup>56</sup> Bank Dunia memproyeksikan bahwa kebijakan ini akan menyebabkan dampak negatif terhadap perdagangan bersih sebesar 12,5 miliar dolar AS dan kehilangan penerimaan fiskal sebesar 6,5 miliar dolar AS selama periode tahun 2014-17, karena penurunan ekspor mineral yang belum diproses dan kenaikan impor (untuk membangun dan mengelola peleburan [*smelter*]), yang tidak akan diimbangi dengan kenaikan ekspor mineral terproses (lihat Triwulanan edisi bulan Maret 2014). Untuk tindak lanjut dampak pelarangan terhadap ekspor mineral, lihat Triwulanan edisi bulan Juli 2014.

<sup>57</sup> Lihat Triwulanan edisi bulan Desember 2014 untuk pembahasan tentang kinerja penerimaan dan prospek penerimaan jangka menengah Indonesia. Asumsi harga minyak yang digunakan untuk proyeksi penerimaan pada waktu itu adalah 85 dolar AS per barel. Proyeksi jangka menengah terakhir Bank Dunia, yang tercermin pada Triwulanan edisi ini, adalah berdasarkan harga yang lebih rendah sebesar 55 dolar AS per barel untuk tahun 2015, dengan pemulihan menjadi 69 dolar AS per barel pada tahun 2019.

<sup>58</sup> Papua, Kalimantan Timur dan Riau menerima antara 42 persen dan 68 persen dari PDB daerah mereka dari sektor pengalihan dan pertambangan migas.

lapangan kerja,  
investasi, dan  
akhirnya  
pertumbuhan

yang lebih rendah secara signifikan dibanding rata-rata nasional pada tahun 2014.<sup>59</sup> Lebih rendahnya harga komoditas berperan signifikan dalam menurunkan laju pertumbuhan PDB sejak tahun 2012 (lihat Bagian B.3). Berlanjutnya moderasi harga seperti diantisipasi pada skenario dasar (*baseline*) akan membuat upaya percepatan kembali pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi lebih menantang.

#### d. Memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari sumber daya alam

Berakhirnya  
lonjakan komoditas  
membuat  
pengelolaan sektor  
sumber daya alam  
yang baik menjadi  
lebih kritis, untuk  
memaksimalkan  
manfaat dan  
menurunkan risiko

Sektor sumber daya alam Indonesia akan tetap menjadi sektor yang penting untuk produksi (*output*), ekspor dan penerimaan pemerintah nasional, dan menjadi penentu utama bagi kondisi fiskal dan ekonomi bagi daerah-daerah kaya sumber daya alam. Selain itu, pengembangan komoditas energi, terutama sektor gas, sangat penting bagi pencapaian sasaran energi Indonesia yang ambisius. Namun dampak negatif perlambatan komoditas sudah mulai terlihat. Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan untuk memastikan Indonesia memperoleh manfaat terbesar dari sumber daya alamnya, walau periode lonjakan harga komoditas tahun 2003-2012 telah berakhir, maka menjadi lebih penting membuat kemajuan dalam menyusun kerangka kebijakan dan peraturan perundangan yang baik dan pengelolaan yang efektif dalam sektor tersebut. Kemajuan seperti itu merupakan prasyarat untuk meningkatkan investasi, secara berkelanjutan memungut lebih banyak penerimaan dan mengubah kegiatan sumber daya alam dan penerimaan ke hasil pembangunan yang diinginkan.<sup>60</sup> Selama jangka waktu yang lebih panjang, penurunan risiko-risiko dan kerentanan yang terkait dengan kebergantungan kepada sektor sumber daya alam dan potensi gejolak harga komoditas dunia akan membutuhkan reformasi kebijakan dan implementasi untuk mendukung sektor non-komoditas.

Titik awalnya adalah  
menarik investasi  
eksplorasi dan  
produksi yang  
berkualitas

Peningkatan iklim investasi migas membutuhkan penghapusan ketidakpastian tentang status dan perpanjangan PSC, menyederhanakan proses-proses peraturan yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan pada sektor tersebut, dan menurunkan jumlah perizinan yang dibutuhkan untuk eksplorasi. Dalam bidang pertambangan, akan sangat penting untuk menyelesaikan proses yang disebut “*Clean and Clear*” untuk menentukan dan menyelesaikan konsesi pertambangan dan membentuk proses yang terikat dengan waktu untuk pemrosesan perpanjangan Kontrak Karya.

Kebijakan untuk  
membentuk  
keterkaitan ekonomi,  
mendorong lapangan  
kerja daerah dan  
menurunkan  
kerusakan  
lingkungan adalah  
penting...

Kegiatan sumber daya alam secara langsung mempengaruhi hasil pembangunan, terutama melalui pengadaan lapangan kerja, keterkaitan produksi hulu dan hilir, dan dampak operasi terhadap lingkungan. Untuk meningkatkan manfaat yang bersih, harus terdapat kebijakan yang efektif dalam pembagian manfaat daerah lokal, dan pengawasan yang lebih kuat atas kewajiban sosial, tenaga kerja dan lingkungan dari perusahaan. Hal ini pada gilirannya bergantung kepada pembentukan catatan kepemilikan tambang nasional (*kadaster*) yang akurat, yang termasuk semua izin IUP yang diterbitkan oleh daerah, dan yang mengaitkan informasi *kadaster* dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, sehingga bersama-sama membentuk satu pandangan nasional yang kuat (atau “*Satu Peta*”). Pada tingkat nasional, tidak ada strategi yang jelas untuk membangun keterkaitan produksi antara sektor sumber daya alam dan sektor lainnya, dengan fokus sejauh ini pada pengembangan hilir di dalam sektor melalui kebijakan pemrosesan mineral dalam negeri (meningkatkan keprihatinan terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut secara ekonomi).

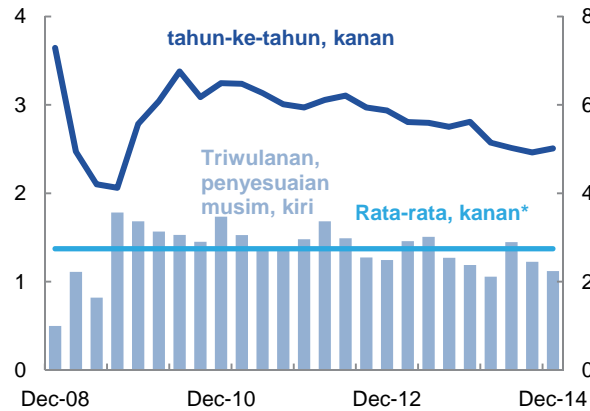
<sup>59</sup> Untuk pembahasan lebih mendetil lihat Triwulanan edisi bulan Juli 2014.

<sup>60</sup> Lihat Bank Dunia, 2014, Tinjauan Kebijakan Pembangunan Indonesia: “Indonesia: Avoiding the Trap”.

<b>...dan juga pungutan potensi penerimaan sumber daya sepenuhnya melalui peningkatan administrasi dan meng-investasikan dalam modal manusia dan fisik</b>	Untuk memungut potensi penerimaan sepenuhnya (di bawah pengaturan fiskal yang berjalan) dari sektor pertambangan akan membutuhkan penguatan sistem administrasi penerimaan bukan pajak untuk pertambangan dan penanganan pertambangan ilegal. Hanya meningkatkan tarif, misalnya tarif royalti, untuk meningkatkan penerimaan mungkin tidak efektif, karena lebih rendahnya harga pada jangka menengah. Saat ini tidak ada kebijakan penggunaan penerimaan sumber daya alam untuk meningkatkan persediaan modal fisik dan manusia untuk menggantikan modal alam yang dihabiskan. Saat ini juga tidak terdapat strategi untuk mengelola gejala penerimaan dari siklus komoditas dan untuk menentukan tingkat yang dihabiskan saat ini dibanding penghematan untuk masa depan.
<b>Sektor itu juga harus mendukung tujuan-tujuan energi Indonesia</b>	Sebagian besar penduduk Indonesia masih tidak memiliki akses terhadap listrik, dan pembangunan industri dirintangi oleh tidak adanya tenaga listrik yang handal dan terjangkau. Pengembangan sektor gas sangat penting untuk meningkatkan akses kepada bahan bakar yang lebih bersih dari batubara. Untuk memberikan insentif pada investasi infrastruktur gas dan industri gas hulu (untuk menghubungkan hulu dan hilir) akan membutuhkan pengembangan mekanisme terkait pasar yang transparan untuk penetapan harga gas dalam negeri; membentuk agregator gas dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan perpanjangan PSC.
<b>Meningkatkan transparansi di sektor ini untuk mengurangi keuntungan di atas normal (<i>rent seeking</i>) akan tetap penting</b>	Di Indonesia dan di tempat lain, terdapat insentif yang kuat untuk memperoleh keuntungan yang jauh di atas normal (" <i>rents</i> ") yang terkait dengan kegiatan pertambangan, dan korupsi masih menjadi masalah yang serius yang membatasi pembagian manfaat. Peningkatan transparansi adalah hal yang sangat penting dalam menurunkan ruang untuk korupsi dan mendukung upaya anti-korupsi. Walau telah terdapat kemajuan, terutama dalam penerimaan melalui Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif ( <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> , EITI), sebagian besar sektor tersebut masih tidak transparan (sebagai contoh, dalam akses informasi yang terkait dengan pemberian kontrak dan perizinan).
<b>Proses pengembangan dan penerapan kebijakan lintas bidang harus ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian</b>	Ketidakpastian kebijakan di sektor ini dinyatakan oleh para investor sebagai salah satu keprihatinan yang paling besar. Ketidakpastian ini dapat diturunkan dengan melibatkan industri di dalam pertimbangan dan proses-proses, dan mengkomunikasikan keputusan secara tepat waktu. Pengembangan, yang turut memperhitungkan, dan komunikasi, kebijakan berdasar bukti ( <i>evidence based</i> ) juga dapat berperan penting, terutama untuk mengklarifikasi tarik menarik ( <i>trade-off</i> ) antara tujuan yang berbeda (misalnya promosi ekspor dibanding konsumsi dalam negeri, dan menurunkan tingkat ekstraksi dibanding memenuhi permintaan energi), sehingga terdapat konsistensi dan saling melengkapi antar kebijakan-kebijakan.

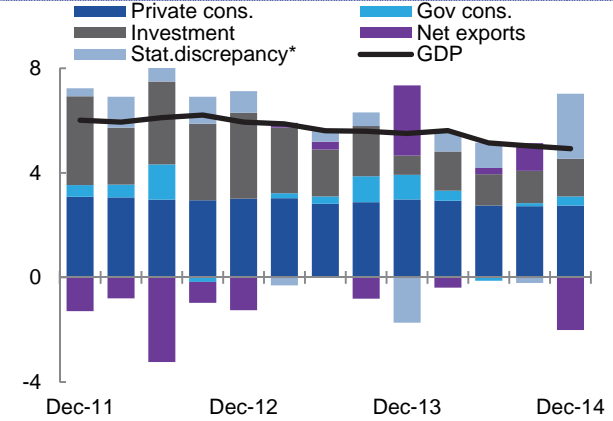
**LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA**

**Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB**  
(pertumbuhan PDB riil, persen)



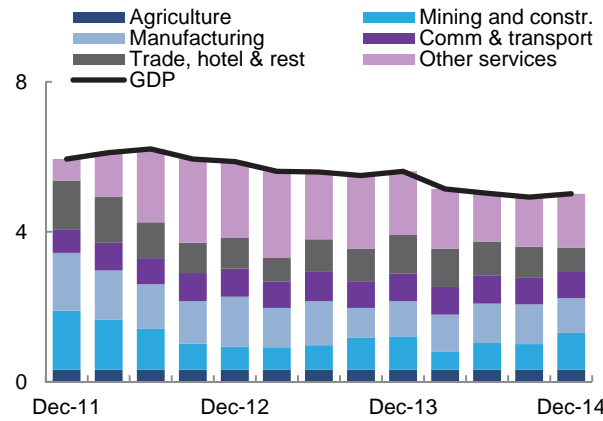
Catatan: \* Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw Q2 2008 – Q4 2014  
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran**  
(kontribusi pertumbuhan PDB riil yoy, persen)



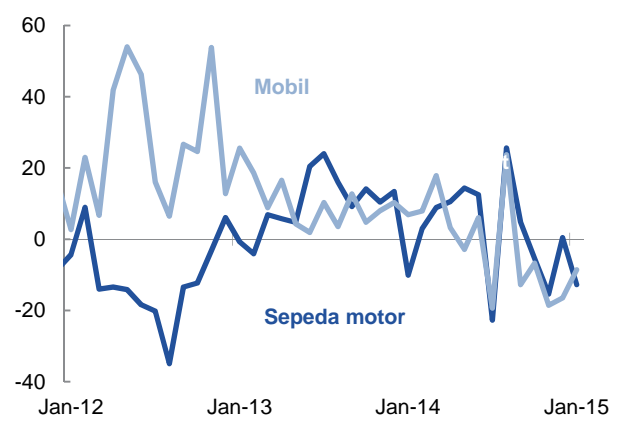
Catatan: \* termasuk perubahan inventori  
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi**  
(kontribusi pertumbuhan PDB riil yoy, persen)



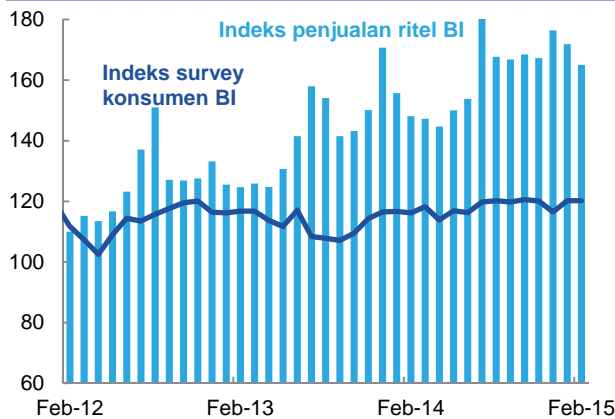
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor**  
(pertumbuhan penjualan dengan penyesuaian musim, percent)



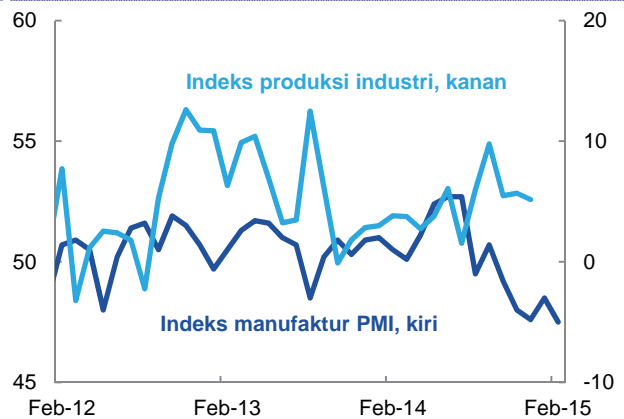
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen**  
(tahun dasar penjualan eceran 2010=100)



Sumber: BI

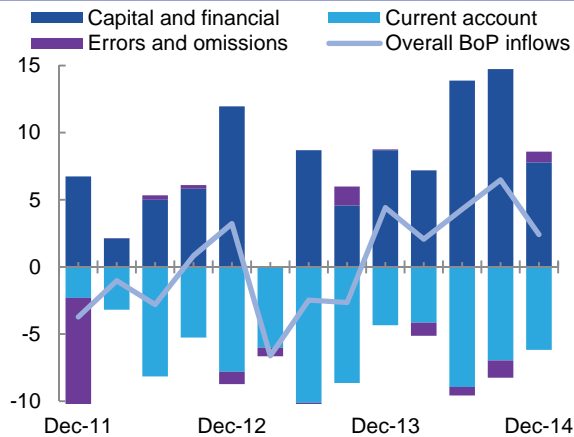
**Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri**  
(indeks PMI dan pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: BPS; Markit HSBC Purchasing Manager's Index

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran

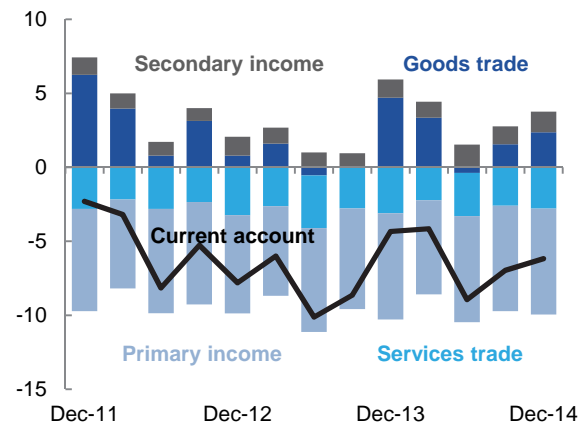
(miliar dolar AS)



Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan

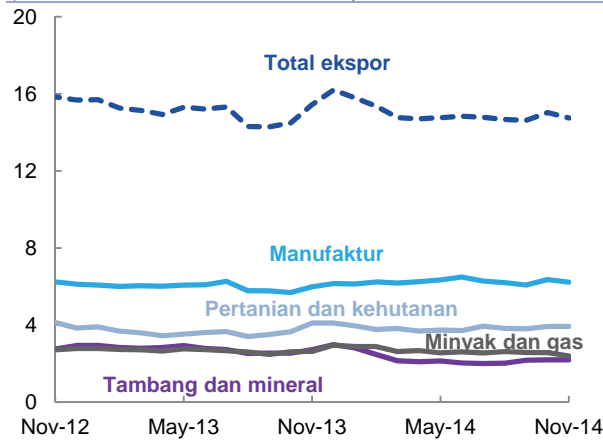
(miliar dolar AS, kiri, dan persen, kanan)



Sumber: BI; Perhitungan staff Bank Dunia

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang

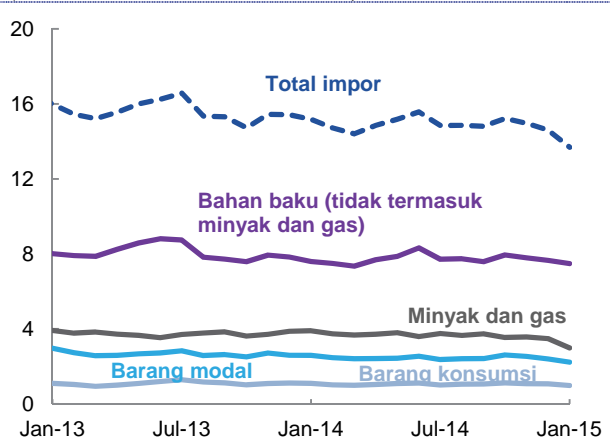
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



Sumber: BPS, Perhitungan staff Bank Dunia

Lampiran Gambar 10: Impor barang

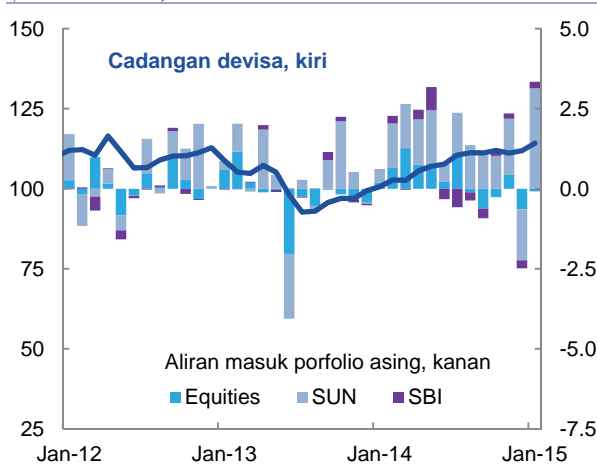
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



Sumber: BPS; Perhitungan staff Bank Dunia

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal

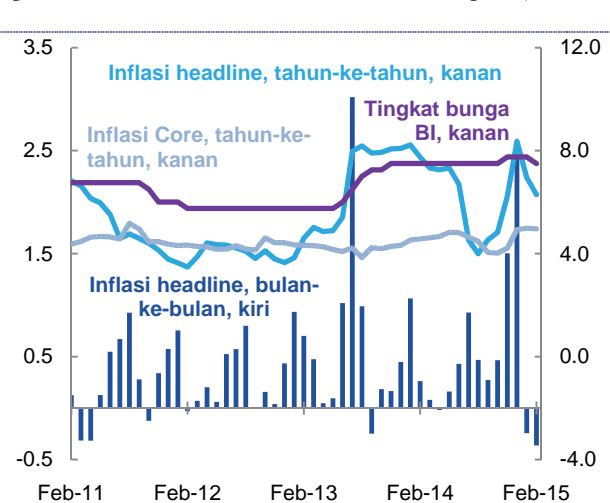
(miliar dolar AS)



Sumber: BI; MoF

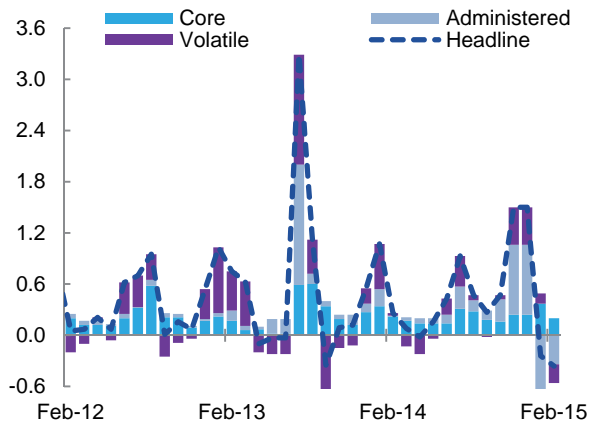
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter

(pertumbuhan bulan-ke-bulan dan tahun-ke-tahun, persen)



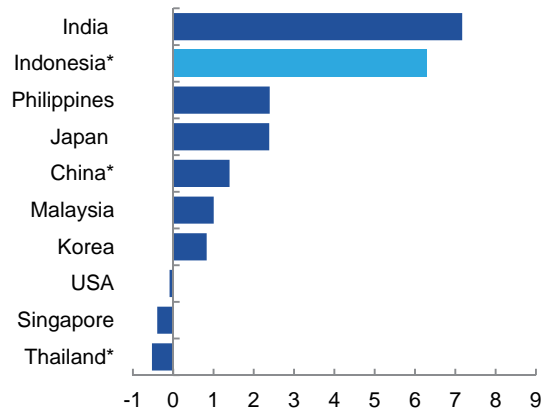
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK  
(persen kontribusi terhadap pertumbuhan bulanan)



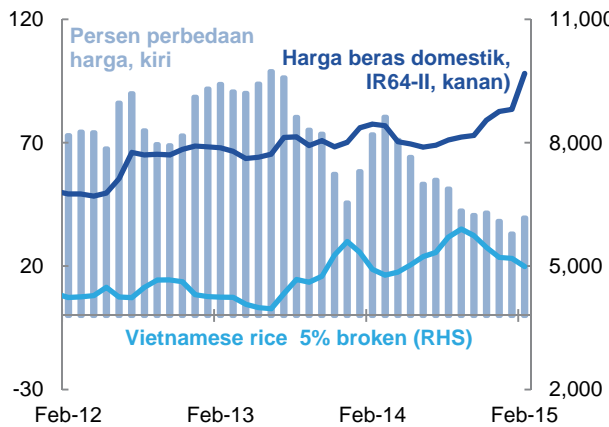
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara  
(tahun-ke-tahun, February 2015)



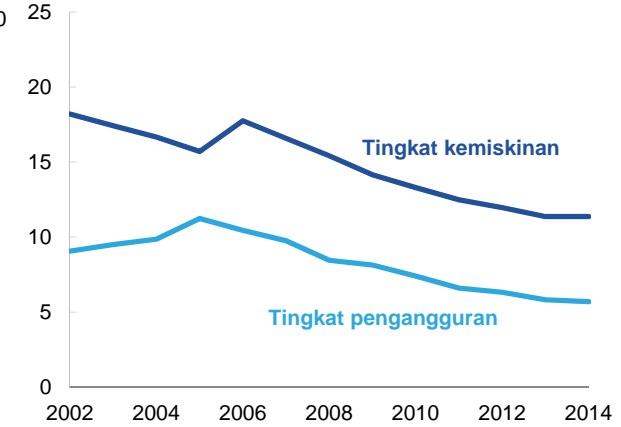
\*Data February 2015, lainnya data January  
Sumber: Biro statistik nasional via CEIC; BPS

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional  
(perbedaan harga persen kiri, harga kulakan Rp per kg, kanan)



Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO; Bank Dunia

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran  
(persen)



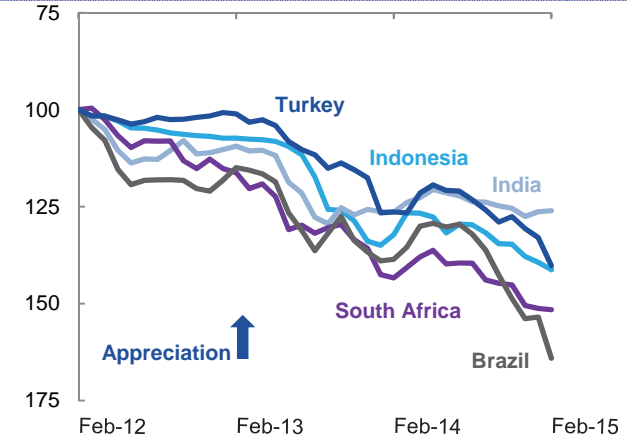
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional  
(indeks harian, mata uang local, Marj 9, 2012=100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

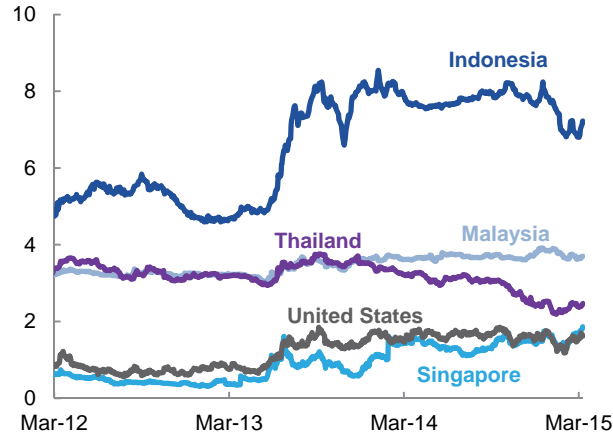
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS  
(indeks bulanan, February 2012=100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

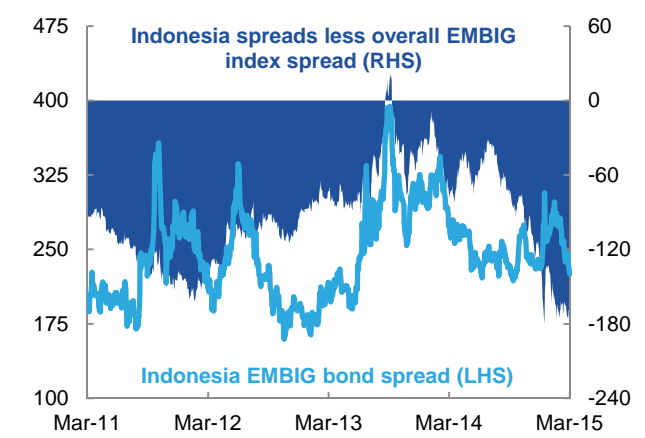


Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal (persen)



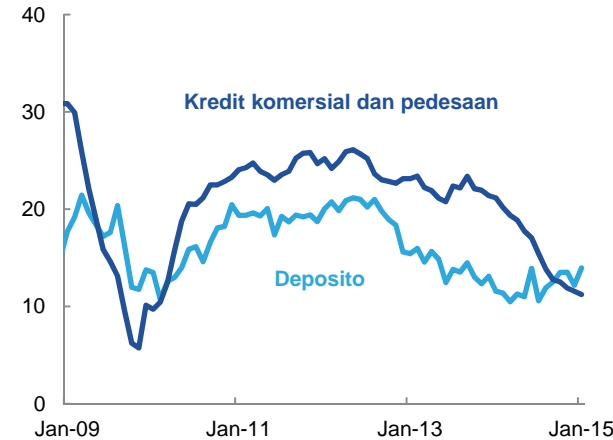
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI (basis poin)



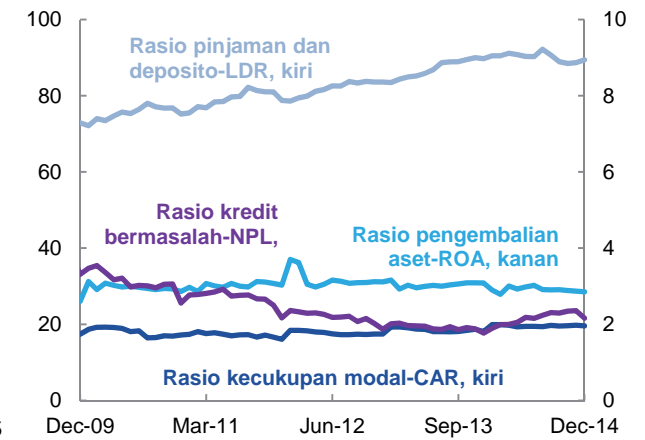
Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito (tahun-ke-tahun, persen)



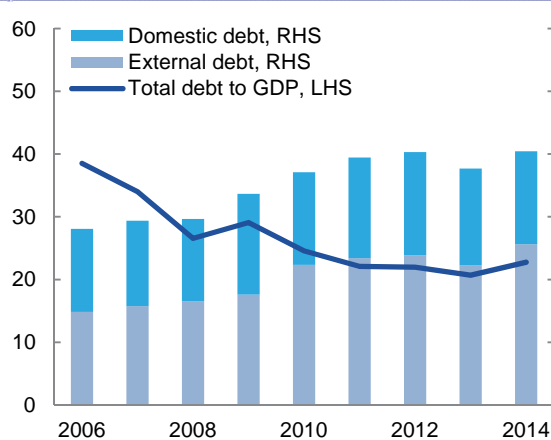
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan (persen)



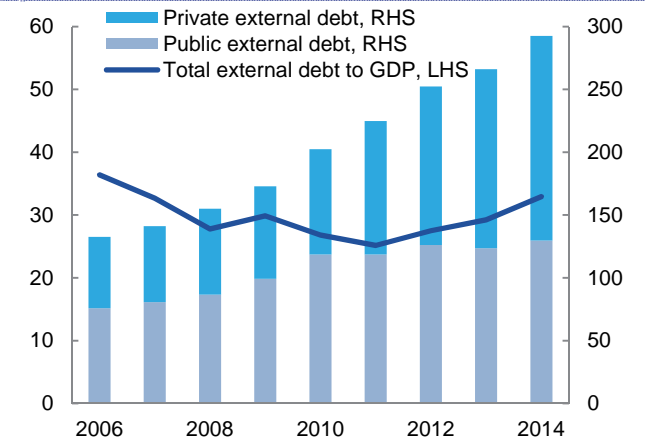
Sumber: BI

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah (persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: MoF; BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri (persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah

(Rupiah triliun)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi sementara	APBN-P
<b>A. Penerimaan dan hibah</b>	<b>849</b>	<b>995</b>	<b>1,211</b>	<b>1,338</b>	<b>1,439</b>	<b>1,537</b>	<b>1,762</b>
1. Penerimaan pajak	620	723	874	981	1,077	1,143	1,489
2. Penerimaan non-pajak	227	269	331	352	355	391	269
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>937</b>	<b>1,042</b>	<b>1,295</b>	<b>1,491</b>	<b>1,651</b>	<b>1,765</b>	<b>1,984</b>
1. Pemerintah pusat	629	697	884	1,011	1,137	1,191	1,320
2. Transfer ke pemerintah daerah	309	345	411	481	513	574	665
<b>C. Neraca utama</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>-53</b>	<b>-99</b>	<b>-94</b>	<b>-67</b>
<b>D. Surplus/defisit</b>	<b>-89</b>	<b>-47</b>	<b>-84</b>	<b>-153</b>	<b>-212</b>	<b>-227</b>	<b>-223</b>
(persen dari PDB)	-1.5	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.2	1.9

Catatan: Defisit/surplus terhadap persentase PDB menggunakan PDB tahun dasar 2010.

Sumber: Kemenkeu

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(Miliar dolar AS)

	2012	2013	2014	2013			2014			
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Neraca Pembayaran</b>	<b>0.2</b>	<b>-7.3</b>	<b>15.2</b>	<b>-2.5</b>	<b>-2.6</b>	<b>4.4</b>	<b>2.1</b>	<b>4.3</b>	<b>6.5</b>	<b>2.4</b>
<i>Persen dari PDB</i>	0.0	-0.8	1.7	-1.0	-1.2	2.1	1.0	1.9	2.8	1.1
<b>Neraca berjalan</b>	<b>-24.4</b>	<b>-29.1</b>	<b>-26.2</b>	<b>-10.1</b>	<b>-8.6</b>	<b>-4.3</b>	<b>-4.1</b>	<b>-8.9</b>	<b>-7.0</b>	<b>-6.2</b>
<i>Persen dari PDB</i>	-2.7	-3.2	-3.0	-4.3	-3.8	-2.1	-2.0	-4.0	-3.0	-2.8
Neraca perdagangan	-1.9	-6.2	-3.6	-4.1	-2.7	1.6	1.1	-3.3	-1.0	-0.4
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-22.5	-22.9	-22.6	-6.0	-5.9	-5.9	-5.3	-5.6	-5.9	-5.8
<b>Neraca modal &amp; keuangan</b>	<b>24.9</b>	<b>22.0</b>	<b>43.6</b>	<b>8.7</b>	<b>4.6</b>	<b>8.7</b>	<b>7.2</b>	<b>13.9</b>	<b>14.7</b>	<b>7.8</b>
<i>Persen dari PDB</i>	2.7	2.4	4.9	3.7	2.0	4.2	3.4	6.2	6.4	3.5
Investasi langsung	13.7	12.3	15.3	3.3	5.5	0.3	3.3	3.5	5.9	2.6
Investasi porfolio	9.2	10.9	25.8	3.8	1.5	1.7	8.7	8.0	7.4	1.6
Investasi lain	1.9	-1.2	2.5	1.6	-2.4	6.7	-4.8	2.4	1.3	3.6
<b>Kesalahan &amp; pembulatan</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>-2.1</b>	<b>-1.0</b>	<b>1.4</b>	<b>0.1</b>	<b>-1.0</b>	<b>-0.6</b>	<b>-1.3</b>	<b>0.8</b>
<b>Cadangan devisa*</b>	<b>112.8</b>	<b>99.4</b>	<b>112.0</b>	<b>98.1</b>	<b>95.7</b>	<b>99.4</b>	<b>102.6</b>	<b>107.7</b>	<b>111.2</b>	<b>111.9</b>

Catatan: \* Cadangan devisa pada akhir periode

Sumber: BI; BPS

Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi Indonesia

	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Neraca Nasional (% perubahan)<sup>1</sup></b>								
PDB riil	8.4	4.9	5.7	6.4	6.2	6.0	5.6	5.0
Investasi riil	22.6	11.4	10.9	6.7	8.9	9.1	5.3	4.1
Konsumsi riil	21.7	4.6	64.4	4.1	5.1	5.4	5.6	4.8
Swasta	22.7	3.7	0.9	4.1	5.1	5.5	5.4	5.3
Pemerintah	14.7	14.2	6.6	4.0	5.5	4.5	6.9	2.0
Ekspor riil, barang dan jasa	18.0	30.6	16.6	15.3	14.8	1.6	4.2	1.0
Impor riil, barang dan jasa	29.6	26.6	17.8	16.6	15.0	8.0	1.9	2.2
Investasi (% PDB)	28	20	24	31	31	33	32	33
Nominal PDB (milyar dolar AS)	202	165	286	755	893	918	910	889
PDB per capita (dolar AS)	1229	948	1,560	3,233	3,663	3,718	3,644	3,524
<b>Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)<sup>2</sup></b>								
Penerimaan dan hibah	15.2	20.8	17.9	14.5	15.5	15.5	15.1	14.6
Penerimaan bukan pajak	4.8	9.0	5.3	3.9	4.2	4.1	3.7	3.7
Penerimaan pajak	10.3	11.7	12.5	10.5	11.2	11.4	11.3	10.8
Pengeluaran	13.9	22.4	18.4	15.2	16.5	17.3	17.3	16.7
Konsumsi	3.9	4.0	3.0	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0
Modal	4.6	2.6	1.2	1.2	1.5	1.7	1.9	1.3
Bunga pinjaman	1.4	5.1	2.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3
Subsidi	..	6.3	4.4	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7
Surplus/defisit	1.3	-1.6	-0.6	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.2
Utang Pemerintah	32.3	97.9	47.2	24.3	22.8	22.6	24.1	23.9
Utang luar negeri pemerintah	32.3	51.4	23.4	11.1	10.2	9.9	11.2	10.2
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	61.5	87.1	47.1	26.8	25.2	27.5	29.2	32.9
<b>Neraca Pembayaran (% PDB)<sup>3</sup></b>								
Neraca pembayaran keseluruhan	..	..	0.2	4.0	1.3	0.0	-0.8	1.7
Neraca transaksi berjalan	3.2	4.8	0.1	0.7	0.2	-2.7	-3.2	-3.0
Ekspor, barang dan jasa	26.2	42.8	35.0	22.0	23.8	23.0	22.5	22.3
Impor, barang dan jasa	26.9	33.9	32.0	19.2	21.2	23.2	23.1	22.7
Transaksi berjalan	-0.8	8.9	2.9	2.8	2.7	-0.2	-0.7	-0.4
Neraca transaksi keuangan	..	..	0.0	3.5	1.5	2.7	2.4	4.9
Penanaman modal langsung, neto	2.2	-2.8	1.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.7
Cadangan devisa bruto (USD billion)	14.9	29.4	34.7	96.2	110.1	112.8	99.4	112.0
<b>Moneter (% change)<sup>3</sup></b>								
Deflator PDB <sup>1</sup>	9.9	20.4	14.3	7.3	7.5	3.8	4.7	5.4
Suku bunga Bank Indonesia (%)	..	..	9.1	6.5	6.6	5.8	6.5	7.5
Kredit domestik	..	..	28.7	17.5	24.4	24.2	22.1	15.9
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) <sup>4</sup>	2,249	8,422	9,705	9,090	8,770	9,387	10,461	11,865
<b>Harga-harga (% perubahan)<sup>1</sup></b>								
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.0	9.4	17.1	7.0	3.8	3.7	8.1	8.4
Indeks harga konsumen (rata-rata)	9.4	3.7	10.5	5.1	5.3	4.0	6.4	6.4
Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel) <sup>5</sup>	17	28	53	79	112	113	107	60

Sumber: <sup>1</sup> BPS dan kalkulasi staf Bank Dunia; <sup>2</sup> Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia (untuk 1995 menggunakan tahun dasar FY 1995/1996; untuk tahun 2000 hanya 9 bulan); <sup>3</sup> Bank Indonesia; <sup>4</sup> IMF; <sup>5</sup> CEIC.

Catatan: Angka PDB menggunakan PDB tahun dasar 2010 (SNA 2008)

Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia

	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Kependudukan<sup>1</sup></b>								
Penduduk (juta)	199	213	227	241	244	247	250	..
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	..
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	36	42	46	50	51	51	52	..
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	61	55	54	53	53	52	52	..
<b>Angkatan Kerja<sup>2</sup></b>								
Angkatan kerja, total (juta)	84	98	106	117	117	120	120	126
Laki-laki	54	60	68	72	73	75	75	77
Perempuan	31	38	38	45	44	46	45	49
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	43	45	44	38	36	35	35	35
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	19	17	19	19	21	22	20	21
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	38	37	37	42	43	43	45	44
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	7.0	8.1	11.2	7.1	7.4	6.1	6.2	5.7
<b>Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan<sup>3</sup></b>								
Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan)	..	104	211	374	421	446	487	548
Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan)	..	73	129	212	234	249	272	303
Jumlah penduduk miskin (juta)	..	38	35	31	30	29	28	28
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	..	19.1	16.0	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3
Di perkotaan	..	14.6	11.7	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3
Di perdesaan	..	22.4	20.0	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	..	15.5	13.3	11.0	10.2	9.5	9.2	11.2
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	..	12.6	12.8	9.5	9.7	8.8	8.6	11.9
GINI indeks	..	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	..	9.6	8.7	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	..	38.6	41.4	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8
Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) <sup>4</sup>	..	..	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5
<b>Kesehatan dan Gizi<sup>1</sup></b>								
Tenaga kesehatan (per 1,000 people)	0.16	0.16	0.13	0.29	..	0.20	..	..
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun)	67	52	42	33	32	31	29	..
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup)	26	22	19	16	15	15	14	..
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	51	41	34	27	26	25	25	..
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	420	340	270	210	..	..	190	..
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun)	63	74	77	78	80	85	84	..
Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP)	1.8	2.0	2.8	2.9	2.9	3.0	..	..
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP)	0.7	0.7	0.9	1.1	1.1	1.2	..	..
<b>Pendidikan<sup>3</sup></b>								
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	..	..	92	92	92	93	92	93
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	..	48	48	49	49	50	48
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	..	..	52	61	60	60	61	65
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	..	50	50	50	49	50	50
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	..	..	9	16	14	15	16	18
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	..	55	53	50	54	54	55
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	..	91	91	91	92	93	93
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB) <sup>5</sup>	..	..	2.7	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN) <sup>5</sup>	..	..	14.5	20.0	20.2	20.1	20.0	19.9
<b>Air Bersih dan Kesehatan lingkungan<sup>1</sup></b>								
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk)	74	78	81	84	84	85	..	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	91	92	93	93	93	..	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	65	68	71	75	76	76	..	..
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	38	44	53	57	59	59	..	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	60	64	70	70	73	71	..	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	26	30	38	44	44	46	..	..
<b>Lainnya<sup>1</sup></b>								
Pengurangan resiko bencana, penilaian (skala 1-5; 5=terbaik)	..	..	..	..	3.3	..	..	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) <sup>6</sup>	..	8	11	18	18	19	19	17

Sumber: <sup>1</sup> World Development Indicators; <sup>2</sup> BPS (Sakernas); <sup>3</sup> BPS (Susenas) dan Bank Dunia; <sup>4</sup> Kementerian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia dan hanya termasuk pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, dan PKH; <sup>5</sup> MoF; <sup>6</sup> Inter-Parliamentary Union



Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.